



**SENSUS
PENDUDUK
2010**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291, Fax: 3857046
Homepage: <http://www.bps.go.id>
Email: bpsdq@bps.go.id



PROFIL INDIKATOR PENDIDIKAN INDONESIA (Laporan Sosial Indonesia 2009)

No. Katalog BPS: 4101005

PROFIL INDIKATOR PENDIDIKAN INDONESIA

(Laporan Sosial Indonesia 2009)



BADAN PUSAT STATISTIK

**PROFIL INDIKATOR PENDIDIKAN
DI INDONESIA
(Laporan Sosial Indonesia 2009)**

<https://www.bps.go.id>

**Sub Direktorat Indikator Statistik
Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik**

**PROFIL INDIKATOR PENDIDIKAN DI INDONESIA
(Laporan Sosial Indonesia 2009)**

ISSN : 1858 - 0955
No. Publikasi : 07330.0817
Katalog BPS : 4101005
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : 206 halaman

Naskah:
Sub Direktorat Indikator Statistik

Gambar Kulit:
Sub Direktorat Indikator Statistik
(Gambar bersumber dari <http://andri-mustawi.blogspot.com> dan <http://antarasumut.com>)

Diterbitkan oleh:
Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Dicetak oleh:
CV. Nario Sari

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

**PROFIL INDIKATOR PENDIDIKAN DI INDONESIA
(Laporan Sosial Indonesia 2009)**

Pengarah : Suhariyanto

Editor : Sri Indrayanti
Lestyowati Endang Widyantari

Penulis : Sri Indrayanti
Lestyowati Endang Widyantari
Sofaria Ayuni
Indah Budiati
Adwi Hastuti
Ema Tusianti
Chairul Anam
Riyadi
Yogi Ariawan

Pengolahan Data/Penyiapan Draft : Ema Tusianti
Sofaria Ayuni

Kontributor Data : Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

<https://www.bps.go.id>

Dalam upaya menjadi pelopor data statistik yang berkualitas untuk semua. BPS tidak saja menghasilkan angka yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun upaya mengedukasi pengguna data akan pemahaman terhadap angka itu sendiri dirasa sangat perlu. Selama sebelas tahun, BPS telah melakukan analisis tentang berbagai keadaan dan permasalahan dalam bidang sosial yang dituangkan dalam publikasi **Laporan Sosial**. Tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang fokus penelitian diarahkan pada upaya menggali ukuran-ukuran pembangunan, yang salah satunya berupa indikator hasil pembangunan.

Pada tahun 2009 ini, tema yang diangkat adalah indikator bidang pendidikan. Hak ini mengingat pentingnya memahami indikator pendidikan sebagai salah satu gambaran tingkat kesejahteraan penduduk. Berbagai studi literatur dan hal wawancara ditelaah dalam usaha menyusun publikasi ini. Disamping itu juga disajikan hasil studi mendalam di 5 provinsi untuk melengkapi hasil analisis.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Semua kritik dan saran sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2010
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Rusman Heriawan

Selama sebelas tahun Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencoba melakukan analisis tentang keadaan dan permasalahan sosial serta kecenderungan perubahan sosial di masyarakat yang dituangkan dalam publikasi **Laporan Sosial**. Namun mulai tahun ini BPS mencoba menggali ukuran-ukuran pembangunan manusia, dimana untuk tahun ini difokuskan pada bidang pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan suatu bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu bangsa, dapat menggambarkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduknya. Untuk mengukur tingkat pendidikan tersebut diperlukan suatu indikator yang dapat menggambarkan kualitas dan kuantitas penduduk di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, dalam publikasi ini BPS mencoba menggali indikator pendidikan dari segi konsep, definisi dan metode penghitungannya dari berbagai sumber baik lembaga yang menangani masalah pendidikan (seperti UNESCO, Kementerian Pendidikan Nasional), maupun instansi lainnya.

Informasi serta data yang digunakan untuk penulisan publikasi ini diperoleh dari Publikasi Profil Pendidikan, dan berbagai publikasi BPS. Untuk melengkapi hasil analisis, publikasi ini juga menyajikan informasi tentang ketersediaan data-data dasar, indikator dan pendapat mengenai beberapa konsep pendidikan yang telah disusun oleh BPS yang diperoleh dari hasil studi mendalam di 5 (lima) provinsi di Indonesia.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Semua kritik dan saran sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2010
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Rusman Heriawan

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	5
1.3. Ruang Lingkup	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II JENIS-JENIS INDIKATOR PENDIDIKAN	
2.1. Indikator Pendidikan Menurut UNESCO	11
2.2. Indikator Pendidikan yang Dihitung Oleh BPS	50
2.2.1. Indikator Sarana dan Prasarana Pendidikan	51
2.2.2. Partisipasi Pendidikan	53
2.2.3. Hasil Pembangunan Pendidikan	54
2.2.4. Kegiatan Diluar Jam Sekolah	54
2.2.5. Berkaitan Dengan Ketenagakerjaan	55
2.3. Indikator Pendidikan yang Dihitung Oleh Kementerian Pendidikan Nasional	56
2.3.1. Indikator Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan	56
2.3.2. Indikator Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing	57
2.3.3. Indikator Penguatan Tata Kelola Akuntabilitas dan Pencintaan Publik	59
2.4. Indikator yang Dapat Dihitung Oleh Kementerian Lain atau Lintas Kementerian	60
BAB III SUMBER DATA INDIKATOR PENDIDIKAN	
3.1. Data Statistik Pendidikan BPS	63
3.2. Data Pendidikan Kerjasama BPS dengan Kementerian Pendidikan Nasional	76
3.3. Sumber Data Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Nasional	79
BAB IV PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA	
4.1. Angka Melek Huruf	87
4.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	90
4.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Ditamatkan	91
4.4. Rata-Rata Lama Sekolah	94
4.5. Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan yang	95

Daftar Isi

4.6. Angka Putus Sekolah	96
4.7. Rasio Murid-Guru	98
4.8. Lainnya	100

BAB V STUDI KUALITATIF TENTANG INDIKATOR PENDIDIKAN

5.1. Pendahuluan	107
5.2. Indikator Pendidikan yang Tersedia Di Daerah	108
5.3. Konsep dan Definisi	112
5.3.1. Angka Melek Huruf	112
5.3.2. Angka Putus Sekolah	113
5.3.3. Rata-Rata Lama Sekolah	114
5.3.4. APM dan APS	116
5.4. Alur Pengumpulan Data Pendidikan dan Kendalanya	117
5.4.1. Alur Pengumpulan Data Pendidikan	117
5.4.2. Kendala yang Dihadapi Oleh Dinas Pendidikan	120

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN : HASIL STUDI KUALITATIF

Provinsi Sumatera Utara	135
Provinsi Riau	145
Provinsi Jawa Tengah	152
Provinsi DI. Yogyakarta	164
Provinsi Sulawesi Utara	178

Daftar Pustaka	193
Istilah Teknis	195

	Halaman
Tabel 4.1. Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, 2004-2009	89
Tabel 4.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin, 2004-2009	90
Tabel 4.3. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2005-2009	92
Tabel 4.4. Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin (tahun), 2004-2009	94
Tabel 4.5. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan, 2004-2009	95
Tabel 4.6. Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2004/05-2008/09	97
Tabel 4.7. Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2004/05-2008/09	99
Tabel 4.8. Jumlah Tenaga Edukasi Menurut Pendidikan Tertinggi di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Tahun 2004/05-2008/09	100
Tabel 4.9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2005-2009	103

PENDAHULUAN

Latar Belakang ●

Tujuan ●

Ruang Lingkup ●

Sistematika Penulisan ●

1

1.1. Latar Belakang

Masalah mendasar yang dihadapi oleh pemerintah adalah masalah kemiskinan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah karena rendahnya tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan suatu bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu bangsa, dapat menggambarkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu bangsa. Oleh karena itu, tidak sedikit pemerintah mencanangkan program-program guna meningkatkan pendidikan rakyatnya, salah satunya adalah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wjardiknas) 9 tahun. Jika dihubungkan dengan Tujuan Pencapaian Milenium Development Goals (MDGs) di Indonesia, maka pemerintah mempunyai peran penting dalam mengupayakan tujuan MDGs tersebut, yang memiliki 8 tujuan dengan 18 target dan 58 indikator, salah satunya adalah pendidikan. Tepatnya adalah pada tujuan MDGs yang kedua, yaitu **Mencapai Pendidikan Dasar (Tingkat SMP) untuk Semua**, yang memiliki target menjamin pada tahun 2015, semua anak, dimanapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya.

Masalah mendasar yang dihadapi pemerintah adalah kemiskinan, dan salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah karena rendahnya tingkat pendidikan

Oleh sebab itu pembangunan di sektor pendidikan perlu lebih ditingkatkan dan diperhatikan. Namun, persoalan pendidikan jaman sekarang ini di berbagai negara dipandang sebagai problem yang sangat luar biasa sulit, tetapi semua negara tanpa kecuali mengakui bahwa pendidikan sebagai tugas negara yang paling penting. Orang-orang yang ingin membangun dan berusaha memperbaiki keadaan dunia tentu menyatakan bahwa pendidikan merupakan kunci, dan tanpa kunci itu usaha mereka akan gagal (Edgar Faure, 2001:1).

Tidak dapat ditawarkan lagi, jika jalur pendidikan merupakan sarana yang penting dan strategis dalam meningkatkan sumber daya manusia, sehingga tidak mengherankan jika banyak negara menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan. Pentingnya pendidikan dalam upaya mencerdaskan bangsa juga tertuang dalam

Pendahuluan

Pembukaan UUD 1945, bahwa “negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”. Demikian pula yang dituangkan dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional (Renstra Depdiknas) Tahun 2005-2009, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tentang RPJMN Tahun 2004-2009, mengamanatkan tiga Misi Pembangunan Nasional, yaitu (1) mewujudkan negara Indonesia yang aman dan damai; (2) mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan demokratis; (3) mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera. Untuk dapat mewujudkannya, bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang berkualitas, sehingga setiap warga negara mampu meningkatkan kualitas hidup, produktivitas dan daya saing terhadap bangsa lain di era global. Dan salah satu bentuk perwujudan untuk meningkatkan kualitas hidup adalah dengan melaksanakan Program Pembangunan Pendidikan Nasional adalah dalam rangka Peningkatan Akses Masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, yang dilaksanakan melalui 15 program, yang terdiri dari 10 program pada fungsi pendidikan dan 5 program pada fungsi pelayanan pemerintahan umum dan fungsi perlindungan sosial. Program pembangunan Depdiknas ini diarahkan dalam rangka untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan pada tahun 2009, yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan.

Selain itu, UNESCO selaku badan internasional yang menangani masalah pendidikan, juga mempunyai target dan jenis indikator yang diterapkan pada tingkat internasional, namun demikian tidak semua indikator dihitung di tingkat nasional yang dilakukan oleh BPS maupun oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Tetapi indikator-indikator pendidikan yang strategis yang dianggap penting bagi pengambil kebijakan dan bahan evaluasi pemerintah, disajikan dalam laporan ini, seperti Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah, Rasio Murid-Guru dan Murid-Kelas, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Putus Sekolah dan lain-lain.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 205,1 juta orang dan pada tahun 2009 sebanyak 231,4 juta orang. Laju

Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun ke atas menurut hasil SUSENA 2009 sudah mencapai 92,58 persen, dengan persentase laki-laki sebesar 95,65 persen dan perempuan 89,68 persen.

pertumbuhan penduduk yang terjadi diantara dua sensus tersebut sebesar 1,35 persen pertahun. Sebagian besar penduduk Indonesia atau sekitar 59 persen lebih berada di Pulau Jawa.

Namun dengan jumlah penduduk tersebut, angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2009 sudah mencapai 92,58 persen, dengan persentase penduduk laki-laki lebih besar dari penduduk perempuan, yaitu 95,65 persen dan 89,68 persen.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk 10 Tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Tingkat Pertama ke atas pada tahun 2009 baru mencapai 42,66 persen, dengan persentase di perkotaan hampir dua kalinya persentase di perdesaan, yaitu 56,18 persen untuk perkotaan dan 29,77 persen di perdesaan.

Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Tingkat Pertama ke atas di perkotaan hampir dua kalinya persentase di perdesaan, yaitu 56,18 persen dan 29,77 persen.

Kementerian Pendidikan Nasional menyajikan indikator yang lain, yang berbeda dengan yang dihasilkan oleh BPS, diantaranya Rasio Murid-Guru, Rasio Murid-Kelas, standar baku jumlah murid dalam kelas menurut jenjang pendidikan, iKohort Siswa, Jumlah Siswa yang Lulus, Jumlah Siswa Mengulang dan Jumlah Siswa Putus Sekolah, Angka Melanjutkan, Tingkat Pendidikan guru dan lain-lain.

1.2. Tujuan Penelitian

Secara umum laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang jenis-jenis indikator pendidikan yang tersedia di BPS maupun diluar BPS dan perkembangan pendidikan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir yang dapat diketahui melalui :

1. UNESCO, Badan Internasional yang menangani masalah pendidikan di tingkat internasional.
2. BPS dan Kementerian Pendidikan Nasional yang melakukan sensus dan atau survei tentang pendidikan.

3. Melalui *in-depth interview* atau wawancara mendalam yang dilakukan di 5 (lima) wilayah penelitian.

1.3. Ruang Lingkup

Profil Indikator Pendidikan di Indonesia secara umum menguraikan tentang indikator-indikator pendidikan yang dihasilkan oleh BPS maupun oleh instansi luar BPS seperti Kementerian Pendidikan Nasional dan lintas kementerian, serta indikator-indikator pendidikan yang ada di tingkat UNESCO. Sementara indikator pendidikan yang dihasilkan dari sensus dan survei yang dilakukan oleh BPS adalah Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Keaksaraan Fungsional (KF).

Guna melengkapi dan mendukung gambaran secara kuantitatif, laporan ini juga dilengkapi dengan informasi kualitatif yang diperoleh melalui *in-depth interview* atau wawancara mendalam. *In-depth interview* dilakukan di 5 (lima) wilayah penelitian, yaitu di provinsi: Sumatera Utara, Riau, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Sulawesi Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Profil Indikator Pendidikan di Indonesia disajikan dalam 5 (lima) bab. **Bab I Pendahuluan** menguraikan tentang latar belakang, tujuan penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan. **Bab II Jenis-jenis Indikator Pendidikan** yang menguraikan tentang jenis indikator pendidikan yang dihasilkan oleh UNESCO sebagai badan internasional, BPS sebagai instansi yang melakukan sensus dan survei, Kementerian Pendidikan Nasional yang berwenang membawahi berbagai program-program pendidikan dan juga menyajikan indikator-indikator pendidikan yang dihasilkan oleh lintas kementerian. **Bab III Sumber Data Indikator Pendidikan** menguraikan tentang sensus dan survei yang menyajikan tentang berbagai indikator pendidikan yang

dilakukan oleh BPS, dan sumber lain yang berasal dari luar BPS. **Bab IV Perkembangan Pendidikan di Indonesia** menguraikan tentang perkembangan pendidikan selama periode 2004-2009. **Bab V Studi Kualitatif Tentang Indikator Pendidikan** menguraikan tentang rangkuman hasil studi kualitatif di 5 (lima) wilayah penelitian di Indonesia.

<https://www.bps.go.id>

KEPENDUDUKAN

- Indikator Pendidikan Menurut UNESCO ●*
- Indikator Pendidikan yang Dihitung Oleh BPS ●*
- Indikator Pendidikan yang Dihitung Oleh Kementerian
Pendidikan Nasional ●*
- Indikator Pendidikan yang Dapat Dihitung Oleh
Kementerian Lain dan Lintas Kementerian ●*

2

2.1. Indikator Pendidikan Menurut UNESCO

Dalam bab ini akan dibahas konsep, definisi, tujuan, metode, rumus, sumber data, interpretasi dan keterbatasan beberapa indikator pendidikan yang termuat dalam Education Indicators Technical guidelines yang disusun oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO). Indikator-indikator tersebut merupakan indikator yang sangat penting, akan tetapi tidak semuanya dapat dihitung. Beberapa indikator tersebut yang telah dihitung oleh BPS diantaranya: Angka Melek Huruf atau Angka Buta Huruf, Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Putus Sekolah. Sedangkan indikator yang telah dihitung oleh Kementerian Pendidikan Nasional diantaranya: Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah, Rasio Murid Guru, dan indikator lainnya yang merupakan proksi terhadap indikator yang telah dibuat oleh UNESCO. Berikut beberapa indikator menurut UNESCO.

Adult Literacy or Illiteracy Rate / Angka Buta Huruf atau Angka Melek huruf Penduduk Dewasa

Definisi: persentase penduduk umur 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan memahami pernyataan/kalimat sederhana yang digunakan sehari-hari. Melek huruf juga memasukkan unsur kemampuan berhitung secara sederhana. Dengan demikian, Angka Buta Huruf dewasa menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang tidak mampu membaca dan menulis pernyataan sederhana yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan: untuk menunjukkan pencapaian keberhasilan program pendidikan dasar dan program pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam memajukan penduduk sehingga mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan mampu berkomunikasi dalam bahasa tulisan. Melek huruf mencerminkan sebuah potensi dalam meningkatkan intelektualitas.

Formula:

atau

ILL menunjukkan pencapaian keberhasilan program pendidikan dasar dan program pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan oleh pemerintah

Jenis-Jenis Indikator Pendidikan

Dimana:

LIT_{15+}^t = Angka melek huruf penduduk usia 15+ tahun pada tahun t

$ILLT_{15+}^t$ = Angka buta huruf penduduk usia 15+ tahun pada tahun t

L_{15+}^t = Jumlah penduduk usia 15+ tahun yang melek huruf pada tahun t

I_{15+}^t = Jumlah penduduk usia 15+ tahun yang buta huruf pada tahun t

P_{15+}^t = Jumlah penduduk usia 15+ tahun pada tahun t

Interpretasi: tingginya angka melek huruf menunjukkan efektifitas sistem pendidikan dasar atau program pemberantasan buta huruf yang menyebabkan tingginya proporsi penduduk yang mampu menggunakan bahasa tulisan dan mampu berhitung secara sederhana. Namun, meningkatnya angka melek huruf dapat juga disebabkan oleh perubahan struktur demografi.

Keterbatasan : setiap negara dapat mempunyai definisi dan konsep yang berbeda dengan konsep yang ditetapkan tersebut, beberapa negara menyamakan konsep buta huruf dengan penduduk yang tidak pernah sekolah.

Gross Intake Ratio (GIR) In The First Grade Of Primary/ Rasio Masukan Kasar di Kelas I Sekolah Dasar

Definisi: jumlah pendaatang baru di kelas I SD, tanpa memandang usia.

Tujuan: untuk menunjukkan akses terhadap pendidikan dasar atau menunjukkan akses bagi penduduk yang sudah memasuki usia sekolah SD.

Formula:

$$GIR' = \frac{N'}{P'_a} * 100$$

Nilai GIR yang tinggi menunjukkan tingginya akses terhadap pendidikan dasar.

GIR^t = Gross Intake Rasio di sekolah SD pada tahun t

N^t = Jumlah siswa baru di kelas I SD pada tahun t

P_a^t = Jumlah penduduk yang sudah berusia sekolah a tahun pada tahun t

NB: Jika siswa baru tidak diketahui, maka dapat dihitung dengan cara mengurangi jumlah siswa kelas I dikurangi jumlah siswa yang mengulang.

Interpretasi: nilai GIR yang tinggi menunjukkan tingginya akses terhadap pendidikan dasar.

Keterbatasan: nilai GIR bisa melebihi 100% karena siswa baru tersebut bisa berumur kurang atau lebih dari usia mulai sekolah yang telah ditetapkan.

Net Intake Rate (NIR) In The First Grade Of Primary/ Angka Masukan Murni di Kelas I SD

Definisi: jumlah siswa baru kelas I sekolah dasar yang sudah memasuki usia sekolah, yang dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dengan usia yang sama.

Tujuan: untuk mengukur akses penduduk yang sudah memasuki usia sekolah dalam hal pemanfaatan pendidikan dasar.

Formula:

Dimana:

NIR^t = Angka Masukan Murni di Kelas I SD pada tahun t

N_a^t = Jumlah siswa baru di Kelas I SD yang berumur a tahun pada tahun t

P_a^t = Jumlah penduduk berusia a tahun pada tahun t

Interpretasi: nilai GIR yang tinggi menunjukkan tingginya akses terhadap pendidikan dasar. NIR 100% adalah kondisi yang menjadi tujuan kebijakan pendidikan dasar secara umum.

Jenis-Jenis Indikator Pendidikan

Keterbatasan: indikator ini mengandung kelemahan jika banyak terdapat siswa mengulang kelas I yang saat daftar masih di bawah umur, karena mereka tidak lagi dimasukkan ke dalam penghitungan.

School-Life Expectancy (SLE) / Angka Harapan Sekolah

Definisi: lama bersekolah seorang anak usia tertentu yang dapat dicapai hingga masa depan, dengan asumsi bahwa probabilitasnya terdaftar di sekolah pada setiap usia tertentu adalah sama dengan angka partisipasi usia pada tersebut.

Diperlukan kehati-hatian dalam membandingkan SLE antar negara, karena setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda.

Tujuan: untuk menggambarkan tingkat perkembangan sistem pendidikan dalam hal jumlah rata-rata tahun sekolah.

Formula:

Dimana:

SLE_a = Angka harapan sekolah untuk siswa umur a tahun pada tahun t

E_i^t = Penduduk terdaftar umur i tahun ($i = a, a+1, a+2, \dots, n$), pada tahun t , n merupakan usia maksimum yang diperbolehkan untuk sekolah

P_i^t = Penduduk usia i tahun pada tahun t

D_i = Lama waktu secara teoritis

Interpretasi: SLE yang relatif tinggi menunjukkan peluang yang lebih besar bagi anak-anak untuk menghabiskan masa sekolah yang lebih lama. Harus dicatat bahwa pengulangan tidak termasuk dalam penghitungan.

Keterbatasan: diperlukan kehati-hatian dalam membandingkan SLE antar negara, karena setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda. Selain itu diperlukan data persentase yang mengulang sebagai bahan pelengkap perbandingan.

Transition Rate (TR) / Angka Peralihan

Definisi: jumlah murid pada tingkat pendidikan tertentu yang berhasil naik pada tingkat berikutnya. Dinyatakan sebagai persentase terhadap siswa pada tingkat/level sebelumnya.

Tujuan: untuk menggambarkan transisi dari satu siklus atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi satu tingkat. Dilihat dari tingkat pendidikan yang lebih rendah dianggap sebagai indikator output, namun jika dilihat dari tingkat pendidikan yang lebih tinggi merupakan indikator akses.

Formula:

Dimana:

$TR_{h,h+1}^t$ = Angka transisi dari tingkat pendidikan h ke tingkat pendidikan h+1 pada tahun t

$E_{h+1,1}^{t+1}$ = Jumlah siswa yang terdaftar di kelas 1 pada tingkat pendidikan h+1 pada tahun t

$R_{h+1,1}^{t+1}$ = Jumlah siswa yang mengulang di kelas 1 pada tingkat pendidikan h+1 pada tahun t+1

$E_{h,n}^t$ = Jumlah siswa yang terdaftar di kelas terakhir (n) pada tingkat pendidikan h pada tahun t

Interpretasi: tingginya tingkat transisi menunjukkan tingginya akses atau transisi dari satu tingkat pendidikan ke tingkat pendidikan berikutnya. Sedangkan tingkat transisi yang rendah mengindikasikan adanya masalah dalam menjembatani dua siklus atau tingkat pendidikan, karena kelemahan dalam sistem evaluasi atau keterbatasan kapasitas.

Kelemahan: indikator tidak dapat mendeteksi siswa pendatang baru/migran dengan siswa yang mengulang.

Gross Enrolment Ratio (GER)/ Angka Partisipasi Kasar

Definisi: jumlah siswa dalam jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur, yang dinyatakan sebagai persentase dari siswa yang memenuhi syarat untuk duduk di jenjang pendidikan tersebut tanpa memperhatikan umur.

Jenis-Jenis Indikator Pendidikan

Tujuan: untuk menunjukkan partisipasi sekolah penduduk di tingkat pendidikan tertentu. Hal ini menunjukkan kapasitas sistem pendidikan dalam mengakomodir siswa dari kelompok usia tertentu. Indikator ini juga dapat menjadi indikator pelengkap Angka Partisipasi Murni (APM) untuk menunjukkan angka partisipasi sekolah penduduk yang memiliki usia diatas ataupun di bawah usia sekolah yang ditetapkan.

Formula:

Dimana:

GER_h^t = Angka partisipasi kasar di tingkat pendidikan h pada tahun t

E_h^t = Siswa yang terdaftar pada tingkat pendidikan h pada tahun t

$P_{h,a}^t$ = Jumlah penduduk yang berusia h tahun (usia yang ditetapkan untuk menduduki suatu tingkat pendidikan tertentu sesuai dengan tingkat pendidikan h pada tahun t

Contoh: Jika usia masuk sekolah SD adalah 7 tahun dengan durasi 6 tahun maka a adalah (7-12) tahun.

Interpretasi: APK yang tinggi secara umum menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi. Nilai APK yang mendekati atau melebihi 100% menunjukkan bahwa suatu wilayah, pada prinsipnya, mampu mengakomodasi semua penduduk usia sekolah. APK harus didasarkan pada partisipasi total semua jenis lembaga pendidikan, termasuk negeri, swasta dan semua lembaga lain yang menyelenggarakan program pendidikan.

Keterbatasan: APK bisa melebihi 100% karena memasukkan siswa dengan usia di atas atau di bawah usia yang ditetapkan untuk jenjang pendidikan tertentu. Hal ini disebabkan oleh pengulangan kelas, pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau program percepatan.

Net Enrolment Rate (NER)/ Angka Partisipasi Murni

NER dihitung untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya.

Definisi: siswa yang terdaftar pada tingkat pendidikan tertentu dan berumur sesuai dengan tingkat pendidikannya, yang dinyatakan sebagai persentase dari populasi yang sesuai.

Tujuan: untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya.

Formula:

Dimana:

$NER_{h,t}^t$ = Angka Partisipasi Murni pada tingkat pendidikan h pada tahun t

$E_{h,a}^t$ = Siswa kelompok umur a di tingkat pendidikan h pada tahun t

$P_{h,a}^t$ = Jumlah penduduk yang berusia a tahun (usia yang ditetapkan untuk menduduki suatu tingkat pendidikan tertentu sesuai dengan tingkat pendidikan h) pada tahun t

Contoh: Jika usia masuk SD adalah 7 tahun dengan durasi 6 tahun maka a adalah (7-12) tahun.

APM yang tinggi menunjukkan tingginya cakupan populasi usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Interpretasi: APM yang tinggi menunjukkan tingginya cakupan populasi usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nilai maksimum APM adalah 100%.

Keterbatasan: untuk pendidikan tinggi, indikator ini tidak relevan karena kesulitan dalam penentuan kelompok usia yang sesuai akibat luasnya variasi durasi program pendidikan yang diberikan. Sedangkan kesulitan yang mungkin timbul saat menghitung APM adalah:

1. tanggal referensi untuk masuk ke pendidikan dasar tidak bertepatan dengan tanggal lahir;
2. sebagian besar penduduk mulai sekolah dasar lebih awal dari usia yang ditentukan dan akibatnya tamat lebih awal;
3. ada peningkatan usia masuk pada pendidikan dasar tapi durasi tetap tidak berubah.

Jenis-Jenis Indikator Pendidikan

Age Specific Enrolment Rate (ASER)/Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur

Definisi: siswa yang terdaftar dengan umur tertentu tanpa melihat tingkat pendidikan, sebagai persentase dari penduduk dengan usia yang sama.

Tujuan: untuk menunjukkan tingkat partisipasi sekolah dari suatu kelompok usia tertentu.

Formula:

$$ASER_a^t = \frac{E_a^t}{P_a^t} * 100$$

Dimana:

ASER^t = Angka Partisipasi Sekolah penduduk umur a tahun pada tahun t

E_a^t = Siswa yang terdaftar yang berumur a tahun pada tahun t

P^t = Penduduk usia tahun t

Interpretasi: ASER yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah penduduk pada umur tertentu. Nilai maksimum ASER adalah 100%. Peningkatan tren mencerminkan peningkatan partisipasi usia tertentu. Jika 100% dikurangi nilai ASER menunjukkan persentase penduduk usia tertentu yang tidak terdaftar sekolah. Sebagai standar kualitas, penghitungan ASER harus memasukkan siswa dari semua jenis sekolah dan lembaga pendidikan, termasuk negeri, swasta dan lembaga lain yang menyelenggarakan program pendidikan.

Keterbatasan: indikator ini tidak menggambarkan kelas atau tingkat pendidikan di mana siswa terdaftar, kecuali dihitung menurut tingkat pendidikan.

Repetition Rate By Grade (RR)/Tingkat Pengulangan Menurut Kelas/Level

Definisi: proporsi siswa dari suatu kohort yang terdaftar dalam suatu kelas/level dan mengulang pada tahun ajaran berikutnya.

Tujuan: untuk mengukur siswa dari suatu kohort yang mengulang kelas dan pengaruhnya terhadap efisiensi internal sistem pendidikan. Selain itu, merupakan salah satu indikator kunci untuk menganalisis dan memproyeksikan arus murid dari satu kelas ke kelas berikutnya dalam siklus pendidikan.

Formula :

$$RR_i^t = \frac{R_i^{t+1}}{E_i^t}$$

Dimana:

RR_i^t = Tingkat Pengulangan kelas i pada tahun t

R_i^{t+1} = Jumlah siswa mengulang di kelas i pada tahun t + 1

E_i^t = Jumlah siswa terdaftar di kelas i pada tahun t

Interpretasi: Tingkat Pengulangan (RR) yang tinggi menunjukkan adanya masalah efisiensi internal dari sistem pendidikan. Jika angka pengulangan tinggi, maka membutuhkan studi tentang penyebab dan solusi yang diperlukan.

Keterbatasan: Dalam beberapa kasus, RR yang rendah hanya disebabkan oleh suatu kebijakan. RR atau jumlah maksimum siswa yang mengulang dalam beberapa kasus dapat ditentukan oleh institusi pendidikan yang berwenang, dengan tujuan menyesuaikan keterbatasan kapasitas kelas dan meningkatkan efisiensi internal serta menjaga stabilitas siklus pendidikan.

Survival Rate By Grade (SR)/Angka Keberlangsungan menurut Kelas

Definisi: persentase siswa terdaftar di kelas I dari suatu kohort yang diharapkan mampu mencapai kelas tertinggi.

Tujuan: untuk mengukur kapasitas dan efisiensi internal sistem pendidikan. Ini menggambarkan situasi tentang retensi siswa dari satu kelas ke kelas yang lebih tinggi dan menggambarkan besarnya putus sekolah.

SR dihitung untuk mengukur kapasitas dan efisiensi internal sistem pendidikan.

Jenis-Jenis Indikator Pendidikan

Formula:

Dimana:

i = Kelas (1,2,3,...n)

t = tahun (1,2,3,...m)

g = Kohort siswa

$SR_{g,i}^k$ = Survival rate kohort siswa g pada kelas i untuk tahun referensi k

E_g^k = Jumlah siswa pada kohort g untuk tahun referensi k

$P_{g,i}^t$ = Jumlah siswa yang naik kelas dari E_g^k yang mampu mencapai kelas i pada tahun t

R_i^t = Jumlah siswa yang mengulang di kelas i pada tahun t

Data yang diperlukan untuk menghitung SR diantaranya siswa terdaftar dalam suatu kelas selama dua tahun berturut-turut (tahun t dan $t + 1$), jumlah siswa yang mengulang kelas pada tahun $t + 1$ dan jumlah lulusan pada tahun t .

Interpretasi: SR mendekati 100% menunjukkan tingkat retensi yang tinggi dan rendahnya siswa putus sekolah.

Keterbatasan: indikator ini biasanya diestimasi dengan menggunakan model analisis kohort yang didasarkan pada sejumlah asumsi (yaitu aliran siswa akan tetap, tidak berubah sepanjang kehidupan kohort), sehingga untuk membandingkan hasilnya memerlukan kehati-hatian.

Percentage of Repeaters/ Angka Mengulang

Definisi: jumlah siswa yang terdaftar di kelas yang sama seperti pada tahun sebelumnya, yang dinyatakan sebagai persentase dari siswa keseluruhan pada kelas tertentu.

Tujuan: untuk mengukur tingkat dan pola pengulangan,

sebagai bagian dari pengukuran efisiensi internal sistem pendidikan.

Formula:

Dimana:

PR^t_i = Persentase siswa yang mengulang, di kelas i pada tahun t

R^t_i = Jumlah siswa mengulang di kelas i pada tahun t

E^t_i = Jumlah siswa terdaftar di kelas i pada tahun t

Interpretasi: nilai PR yang tinggi mencerminkan masalah serius yang juga menunjukkan kelemahan efisiensi internal sistem pendidikan.

Keterbatasan: tingkat dan jumlah maksimum pengulangan yang diperbolehkan dalam beberapa kasus dapat ditentukan oleh kebijakan internal suatu institusi pendidikan dengan tujuan mengatasi keterbatasan kapasitas kelas dan meningkatkan efisiensi internal.

Public Expenditure on Education as Percentage of Gross National Income/ Pengeluaran Publik dalam Bidang Pendidikan Sebagai Persentase Dari Pendapatan Nasional Bruto

Definisi: total pengeluaran publik untuk pendidikan yang dinyatakan sebagai persentase dari Produk Nasional Bruto (PNB).

Tujuan: menunjukkan proporsi kekayaan suatu negara yang dihasilkan selama tahun anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pada sektor pendidikan. Indikator ini juga dapat dihitung dengan menggunakan Domestik Bruto produk (PDB) sebagai pembandingnya.

Formula:

Jenis-Jenis Indikator Pendidikan

Dimana:

$\%XGNI^t$ = Persentase pengeluaran untuk sektor pendidikan di tahun t

PXE^t = Jumlah pengeluaran di Sektor Pendidikan pada tahun t

GNI^t = Pendapatan Nasional Bruto pada tahun t

Interpretasi: tingginya indikator ini menunjukkan tingginya perhatian pemerintah untuk investasi dalam bidang pendidikan.

Indikator ini sebaiknya menggunakan total belanja publik untuk pendidikan yang dikeluarkan oleh semua departemen/kementerian dan harus mencakup semua pengeluaran pendidikan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Indikator ini tidak dapat melebihi atau bahkan mendekati 100%.

Keterbatasan: dalam beberapa kasus, data total pengeluaran untuk pendidikan hanya mencakup pengeluaran Departemen Pendidikan.

Public Expenditure on Education as Percentage of Total Government Expenditure / Pengeluaran Pendidikan Sebagai Persentase dari Jumlah Pengeluaran Pemerintah

Definisi: total pengeluaran publik untuk pendidikan yang dinyatakan sebagai persentase dari total pengeluaran pemerintah pada tahun tertentu.

% PXE dihitung untuk melihat kebijakan pemerintah dalam hal investasi di bidang pendidikan

Tujuan: untuk melihat kebijakan pemerintah dalam hal investasi di bidang pendidikan yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia.

Formula:

$$\%PXE_t = \frac{PXE_t}{TPX_t} * 100$$

Dimana:

- $\%PXE^t$ = Pengeluaran untuk pendidikan sebagai persentase dari total pengeluaran pemerintah pada tahun t
 PXE^t = Pengeluaran untuk pendidikan pada tahun t
 TPX^t = Pengeluaran pemerintah pada tahun t

Interpretasi: Persentase yang tinggi menunjukkan perhatian pemerintah untuk pendidikan relatif tinggi dibandingkan investasi publik lainnya, termasuk pertahanan dan keamanan, perawatan kesehatan, jaminan sosial untuk pengangguran dan lanjut usia, dan sektor sosial atau ekonomi lainnya.

Untuk menjaga kualitas indikator ini, total belanja publik untuk pendidikan harus termasuk yang dikeluarkan oleh semua departemen terkait pada setiap wilayah administrasi. Selain itu, perbedaan periode tahun fiskal dan periode anggaran pendidikan mungkin akan menjadi masalah yang harus dipertimbangkan.

Keterbatasan: dalam beberapa kasus, data total pengeluaran pemerintah untuk pendidikan hanya mengacu pada anggaran yang di keluarkan oleh departemen/ kementerian pendidikan tanpa memperhatikan pengeluaran pendidikan dari instansi lainnya.

Percentage Distribution of Public Current Expenditure on Education by Level / Distribusi Persentase Pengeluaran Publik untuk Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan

Definisi: pengeluaran pendidikan untuk setiap tingkat pendidikan, yang dinyatakan sebagai persentase dari total pengeluaran pendidikan.

Tujuan: untuk menunjukkan bagaimana sumber daya keuangan untuk pendidikan telah didistribusikan di berbagai tingkat atau level pendidikan.

Formula:

Jenis-Jenis Indikator Pendidikan

Dimana:

$PCXE_h^t$ = Persentase belanja publik di tingkat pendidikan h pada tahun t

$PCXE_h^t$ = Total belanja publik pada tingkat pendidikan h pada tahun t

Interpretasi: tingginya persentase pengeluaran pendidikan pada tingkat pendidikan tertentu menunjukkan prioritas kebijakan pendidikan pemerintah terhadap tingkat pendidikan tersebut.

Catatan: dalam menghitung indikator ini, harus mencakup dana publik pada lembaga pendidikan negeri dan swasta di semua tingkatan pendidikan.

Keterbatasan: dalam beberapa kasus, data belanja publik untuk pendidikan hanya merujuk kepada pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh departemen terkait (departemen/kementerian pendidikan), tidak termasuk departemen lain yang menghabiskan anggaran untuk kegiatan pendidikan.

Public Current Expenditure per Pupil (Student) as Percentage of Gross National Income (GNI) per Capita / Pengeluaran Pendidikan per Murid (Siswa) Sebagai Persentase dari Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per Kapita

Definisi: pengeluaran pendidikan per siswa di setiap tingkat pendidikan, dinyatakan sebagai persentase dari PDB per kapita pada tahun tertentu.

Tujuan: untuk mengukur bagian dari pendapatan per kapita yang dihabiskan oleh setiap murid atau mahasiswa juga dapat mengukur investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Indikator dapat juga dihitung berdasarkan produk domestik bruto (PDB) sebagai pembaginya.

Formula:

Perbedaan tahun fiskal dan periode tahun ajaran menjadi kendala dalam penghitungan %PCXE.

Dimana:

$\%PCXE_h^t$ = Pengeluaran umum per murid pada tingkat pendidikan h sebagai persentase dari PDB per kapita pada tahun t

$PCXE_h^t$ = Pengeluaran umum di tingkat pendidikan h pada tahun t

GNI^t = Produk Nasional Bruto tahun t

E_h^t = Jumlah siswa terdaftar di tingkat pendidikan h pada tahun t

P^t = Jumlah populasi pada tahun t

Interpretasi: menunjukkan besarnya pendapatan per kapita yang dihabiskan oleh setiap murid / siswa di tingkat pendidikan tertentu. Jika indikator ini bernilai lebih rendah untuk tingkat pendidikan dasar /SD dibandingkan dengan pengeluaran pada pendidikan tersier, maka harus dipertimbangkan kembali alokasi sumber daya dalam sektor pendidikan, terutama jika pendidikan dasar merupakan prioritas.

Indikator ini bisa melebihi 100 persen di negara-negara yang memiliki GNI/PNB per kapita yang rendah dan biaya per murid yang tinggi. Indikator ini juga harus didasarkan pada data yang konsisten yang mencakup semua data di berbagai institusi pendidikan, baik lembaga pendidikan negeri atau swasta.

Keterbatasan: indikator ini mungkin terkendala oleh estimasi data GNI/PNB, jumlah penduduk dan siswa terdaftar yang tidak akurat. Di sisi lain, perbedaan tahun fiskal dan periode tahun ajaran menjadi kendala dalam penghitungan yang harus dipertimbangkan secara seksama.

Pupil-Teacher Ratio (PTR) / Rasio Murid-Guru

Definisi: rata-rata jumlah murid (siswa) per guru pada tingkat pendidikan dan tahun tertentu.

Tujuan: untuk mengukur input sumber daya manusia dalam hal jumlah guru dalam hubungannya dengan populasi murid/ siswa. Hasilnya dapat dibandingkan dengan target yang ingin dicapai oleh pemerintah.

Jenis-Jenis Indikator Pendidikan

Formula:

Dimana:

PTR_h^t = Rasio guru murid di tingkat pendidikan h pada tahun t

E_h^t = Jumlah murid/siswa pada tingkat pendidikan h pada tahun t

T_h^t = Jumlah guru di tingkat pendidikan h pada tahun t

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengukur indikator ini adalah keberadaan guru parttime, pembagian shift, dan guru yang mengajar lebih dari satu pelajaran. Hal tersebut dapat mempengaruhi keberartian dan ketepatan pengukuran.

Interpretasi: PTR yang tinggi menunjukkan bahwa setiap guru harus bertanggung jawab atas sejumlah besar murid. Dengan kata lain, semakin tinggi PTR, semakin rendah akses murid untuk mendapatkan pengajaran dari guru. Sebaliknya, jika rasio murid-guru rendah memungkinkan guru lebih memperhatikan masing-masing siswa.

Keterbatasan: indikator ini tidak memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pengajaran / pembelajaran, seperti perbedaan dalam kualifikasi guru, pengalaman dan status, metode pengajaran, bahan-bahan pengajaran dan variasi dalam kondisi kelas.

Percentage of Female Teachers/Persentase Guru Perempuan

Definisi: jumlah guru perempuan pada tingkat pendidikan tertentu dinyatakan sebagai persentase dari jumlah guru keseluruhan (laki-laki dan perempuan) pada tingkat pendidikan yang sama pada tahun tertentu.

Tujuan: untuk menunjukkan komposisi gender dan melihat peran maupun peluang perempuan dalam mengajar. Selain itu bertujuan untuk mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan mengajar di tingkat pendidikan tertentu.

FT dihitung untuk menunjukkan komposisi gender dan melihat peran maupun peluang perempuan dalam mengajar.

Formula:

$$\%FT_h^t = \frac{FT_h^t}{T_h^t} * 100$$

Dimana:

$\% FT_h^t$ = Persentase guru perempuan di tingkat pendidikan h pada tahun t

FT_h^t = Jumlah guru perempuan di tingkat pendidikan h pada tahun t

T_h^t = Jumlah guru laki-laki dan perempuan di tingkat pendidikan h pada tahun t

Perhitungan tersebut harus mencakup semua staf yang terlibat dalam mengajar. Guru didefinisikan sebagai profesional yang mampu mentransfer pengetahuan, sikap dan keterampilan yang ditetapkan dalam kurikulum.

Interpretasi: persentase guru perempuan kurang dari 50% menunjukkan adanya disparitas gender dalam komposisi mengajar. Sedangkan nilai yang lebih besar dari 50% menunjukkan lebih banyaknya kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan mengajar di tingkat pendidikan, kelas atau program pendidikan tertentu.

Keterbatasan: indikator ini hanya mengukur disparitas gender dalam profesi guru bukan efektivitas dan kualitas pengajaran.

Percentage of Private Enrolment/ Persentase Siswa di Sekolah Swasta

Definisi: siswa terdaftar di lembaga pendidikan swasta pada tingkat pendidikan tertentu, yang dinyatakan sebagai persentase total siswa yang terdaftar pada tingkat yang sama.

Tujuan: untuk mengukur seberapa besar peran swasta dalam hal penyediaan pembelajaran baik dalam skala maupun kapasitasnya.

Formula:

Jenis-Jenis Indikator Pendidikan

Dimana:

$\% EP_h^t$ = Persentase siswa terdaftar di lembaga pendidikan swasta pada tingkat pendidikan h pada tahun t

EP_h^t = Jumlah murid terdaftar di lembaga pendidikan swasta pada tingkat pendidikan h pada tahun t

E_h^t = Jumlah murid yang terdaftar di semua jenis lembaga pendidikan pada tingkat pendidikan h pada tahun t

Nilai %EP yang tinggi menunjukkan keterlibatan yang kuat dari lembaga non-pemerintah dalam memberikan program pendidikan.

Interpretasi: persentase yang tinggi menunjukkan keterlibatan yang kuat dari lembaga non-pemerintah (termasuk agama, badan, organisasi, asosiasi, perusahaan swasta atau perorangan) dalam memberikan program pendidikan.

Keterbatasan: di beberapa negara, di mana lembaga-lembaga swasta secara substansial disubsidi atau dibantu oleh pemerintah, perbedaan antara lembaga pendidikan swasta dan negeri mungkin kurang jelas, terutama saat murid (siswa) secara langsung dibiayai melalui beasiswa pemerintah. Di sisi lain, beberapa lembaga pendidikan, baik keagamaan atau swasta lainnya yang tidak terdaftar dalam catatan pemerintah atau tidak mengikuti kurikulum nasional memungkinkan lembaga tersebut tidak termasuk dalam statistik, sehingga dapat mempengaruhi cakupan penghitungan.

Percentage of Teaching Staff in Private Educational Institution / Persentase Staf Pengajar Di Lembaga Pendidikan Swasta

Definisi: jumlah guru di lembaga pendidikan swasta pada tingkat pendidikan tertentu yang dinyatakan sebagai persentase dari total staf pengajar di semua jenis lembaga pendidikan yang sama.

Tujuan: untuk mengukur peran relatif pendidikan swasta dalam hal staf pengajar, baik dalam skala maupun sumber daya.

Formula:

Tingginya TP menunjukkan keterlibatan yang tinggi dari lembaga non-pemerintah dalam menyediakan sumber daya pendidikan.

Dimana:

- $\% TP_h^t$ = Persentase staf pengajar di lembaga swasta di tingkat pendidikan h pada tahun t
- TP_h^t = Staf pengajar di lembaga pendidikan swasta di tingkat pendidikan h pada tahun t
- T_h^t = Total jumlah guru (di lembaga pendidikan negeri dan swasta) di tingkat pendidikan h pada tahun t

Interpretasi: persentase yang tinggi menunjukkan keterlibatan yang tinggi dari lembaga non-pemerintah (termasuk agama, asosiasi, masyarakat, swasta perusahaan atau perorangan) dalam menyediakan sumber daya pendidikan.

Keterbatasan: di beberapa negara, dimana lembaga swasta secara substansial disubsidi atau dibantu oleh pemerintah, perbedaan antara lembaga pendidikan swasta dan negeri mungkin kurang jelas terutama ketika guru tertentu dibayar oleh pemerintah. Beberapa lembaga pendidikan, baik keagamaan atau swasta lainnya yang tidak terdaftar dalam catatan pemerintah atau tidak mengikuti kurikulum nasional memungkinkan lembaga tersebut tidak termasuk dalam statistik, sehingga dapat mempengaruhi cakupan penghitungan.

Educational Attainment of The Population Aged 25 Years and Above/Tingkat Pendidikan Penduduk Umur 25 Tahun ke atas

Definisi: persentase penduduk berumur 25 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan tertinggi yang telah dicapai atau dilengkapi dengan ISCED.

Tujuan: untuk menunjukkan pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas dan kualitas sumber daya manusia dalam suatu negara. Indikator ini juga mencerminkan struktur dan kinerja sistem pendidikan dan dampaknya terhadap sumber daya manusia.

Formula:

Jenis-Jenis Indikator Pendidikan

Dimana:

- $\% P_{25+,h}^t$ = Persentase penduduk berusia 25 tahun ke atas yang telah mencapai pendidikan h pada tahun t
- $P_{25+,h}^t$ = Penduduk berusia 25 tahun ke atas yang telah mencapai pendidikan h pada tahun t
- P_{25+}^t = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas pada tahun t

Interpretasi: konsentrasi yang relatif tinggi pada tingkat pendidikan tertentu mencerminkan kapasitas sistem pendidikan di tingkat pendidikan tersebut. Pencapaian pendidikan berkaitan erat dengan tingkat keterampilan dan kompetensi penduduk suatu negara, dan dapat dilihat sebagai proxy baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif sumber daya manusia.

Keterbatasan: perlu adanya pertimbangan bila ingin melakukan perbandingan lintas negara, karena setiap negara memiliki standar pendidikan yang berbeda. Selain itu, indikator ini hanya mengukur pencapaian pembangunan pendidikan dalam hal pendidikan yang telah dicapai, dan tidak selalu menunjukkan kualitas pendidikan.

Number of Students In Tertiary Education per 100,000 Inhabitants/ Jumlah Mahasiswa di Perguruan Tinggi per 100.000 Penduduk

Definisi: jumlah mahasiswa yang terdaftar dalam pendidikan tersier (perguruan tinggi) pada tahun akademik tertentu per 100.000 penduduk.

Tujuan: indikator ini menunjukkan tingkat partisipasi siswa perguruan tinggi dalam populasi sebuah negara.

Formula:

Dimana:

- $S_{100.000}^t$ = Jumlah mahasiswa di perguruan tinggi per 100.000 penduduk pada tahun t

E^t = Jumlah mahasiswa terdaftar di perguruan tinggi pada tahun t

P^t = Penduduk pada tahun t

Interpretasi: nilai yang tinggi menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi pada pendidikan tersier/perguruan tinggi dalam kaitannya dengan populasi suatu negara.

Keterbatasan: indikator ini memperhitungkan seluruh penduduk di sebuah negara, tanpa melihat kelompok umur yang sesuai dengan pendidikan tersier. Jika data kelompok umur tersedia, maka ukuran yang lebih tepat menggunakan ASER (angka partisipasi kasar menurut umur) atau GER (angka partisipasi kasar).

Percentage Distribution of Enrolment In Secondary Education by Orientation Of Education Programme / Partisipasi Sekolah Menurut Program Pendidikan

Definisi: distribusi Persentase siswa yang terdaftar di pendidikan menengah sesuai dengan program pendidikan yaitu pendidikan umum, dan kejuruan, termasuk pendidikan keguruan.

Tujuan: untuk mencerminkan orientasi dan kapasitas program pendidikan menengah serta menggambarkan besarnya potensi pekerja terampil dalam spesialisasi yang berbeda.

Formula:

$$\%E_s^t = \frac{E_s^t}{\sum_{s=1}^n E_s^t} * 100$$

Dimana:

$\%E_s^t$ = Persentase siswa yang terdaftar dalam jurusan s di sekolah menengah pada tahun t

E_s^t = Jumlah siswa yang terdaftar dalam jurusan s di sekolah menengah pada tahun t

n = Jumlah jurusan pada pendidikan menengah

Jenis-Jenis Indikator Pendidikan

Interpretasi: konsentrasi yang relatif tinggi dalam suatu jurusan tertentu menggambarkan preferensi dan kapasitas yang tinggi, di sisi lain mungkin mencerminkan kesempatan kerja pada pekerjaan atau lapangan pekerjaan tertentu.

Public Current Expenditure on Education as percentage of Total Public Expenditure on Education / Pengeluaran Operasional (Non modal) Pendidikan Sebagai Persentase Total Pengeluaran untuk Pendidikan

Definisi: pengeluaran pemerintah untuk operasional pendidikan (non modal) yang dinyatakan sebagai persentase dari total pengeluaran pemerintah untuk pendidikan pada tahun tertentu.

Tujuan: untuk menunjukkan kontribusi pengeluaran operasional pendidikan (non modal) terhadap total pengeluaran pemerintah untuk pendidikan.

Formula:

Dimana:

$\% PCXE^t$ = Persentase pengeluaran operasional pendidikan (non modal) untuk pendidikan pada tahun t

$PCXE^t$ = Pengeluaran operasional pendidikan (non modal) pada tahun t

$TPXE^t$ = Total pengeluaran publik untuk pendidikan pada tahun t

Interpretasi: Persentase yang tinggi mencerminkan kebutuhan untuk mencurahkan sebagian besar dana publik untuk mempertahankan biaya operasional pendidikan. Nilai indikator dikurangi 100 mencerminkan proporsi pengeluaran pendidikan yang dikhususkan untuk belanja modal.

Keterbatasan: Dalam banyak kasus data total belanja publik untuk pendidikan hanya mencakup data yang berasal dari Departemen/Kementerian Pendidikan tidak termasuk

Keterbatasan penghitungan indikator %PCXE adalah data total belanja publik untuk pendidikan hanya mencakup data yang berasal dari Departemen/ Kementerian Pendidikan saja, tidak termasuk departemen lain

departemen lain yang menghabiskan bagian yang cukup besar dari anggaran mereka untuk kegiatan pendidikan.

Gross Intake Ratio In The Last Grade of Primary (GIRLG)/Rasio Asupan Kasar Dikelas Terakhir Sekolah Dasar

Definisi: Jumlah siswa di kelas terakhir SD tanpa memandang usia, yang dinyatakan sebagai persentase penduduk pada usia yang sesuai dengan kelas terakhir di sekolah dasar

Tujuan: untuk mencerminkan dampak kebijakan terhadap kelas sebelumnya yang berpengaruh terhadap kelas akhir. Hal ini juga menunjukkan kapasitas sistem pendidikan.

Formula:

Dimana:

$GIRLG^t$ = Rasio Asupan Kasar dikelas terakhir SD pada tahun t
 NE_1^t = Jumlah siswa kelas terakhir I SD, pada tahun t
 P^t = Penduduk usia masuk di kelas terakhir SD, pada tahun t

Siswa yang dimaksud adalah siswa baru yang menempati kelas terakhir tersebut. Untuk menghitungnya, dapat mengurangi jumlah siswa terdaftar dengan jumlah siswa yang mengulang dalam terakhir kelas.

Interpretasi: sebuah rasio yang tinggi menunjukkan arus murid yang tinggi dalam penyelesaian sistem pendidikan di sekolah dasar.

Keterbatasan: perhitungan mencakup semua siswa baru di kelas terakhir, tidak memperhitungkan usia. Oleh karena itu, rasio tersebut dapat melebihi 100 persen, karena memasukkan anak diatas/di bawah umur dan atau siswa yang mengulang kelas.

Expected Gross Intake Ratio In The Last Grade Of Primary (EGIRLG)/Angka Harapan Rasio Asupan Kasar Di Kelas Terakhir Sekolah Dasar

Jenis-Jenis Indikator Pendidikan

Definisi: jumlah siswa baru pada kelas pertama di sekolah dasar pada tahun tertentu, tanpa memandang usia, yang diharapkan dapat mencapai kelas terakhir, terlepas dari pengulangan, dinyatakan sebagai persentase dari penduduk pada usia masuk yang ditetapkan untuk pendidikan dasar pada tahun yang sama.

Tujuan: untuk mengestimasi asupan kotor di masa depan di kelas terakhir sekolah dasar berdasarkan pendatang baru saat ini (kelas I) dengan asumsi transisi dan tingkat pengulangan tetap tidak berubah.

Formula:

Dimana:

$EGIRLG^t$ = Angka harapan rasio asupan kasar di kelas terakhir Sekolah Dasar pada tahun t

GIR^t = Angka masukan kasar di kelas 1 SD pada tahun t

$SR^{t-1}_{g,l}$ = Survival Rate kohort siswa g pada kelas terakhir l pada tahun t-1

Interpretasi: nilai yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat penyelesaian pendidikan dasar di masa depan.

Keterbatasan: indikator ini diestimasi dengan menggunakan model analisis kohort yang didasarkan pada sejumlah asumsi (yaitu tingkat aliran diamati akan tetap tidak berubah sepanjang kehidupan kohort), oleh sebab itu memerlukan kehati-hatian dalam membuat perbandingan. Di sisi lain, untuk menghitung indikator pada tingkat daerah, diperlukan kehati-hatian karena bisa terjadi perpindahan siswa antar daerah.

Gross Primary Graduation Ratio (GPGR)/Rasio Kelulusan Kotor Di Sekolah Dasar

Definisi: jumlah lulusan dari kelas terakhir sekolah dasar, tanpa memandang usia, yang dinyatakan sebagai persentase penduduk pada usia lulus di sekolah primer.

Tujuan: untuk menunjukkan tingkat kelulusan pendidikan dasar secara umum. Hal ini juga menunjukkan kapasitas sistem pendidikan dalam menyediakan kelulusan bagi penduduk dengan usia yang sesuai.

Formula:

GPGR menunjukkan tingkat kelulusan pendidikan dasar secara umum.

Dimana:

$GPGR^t$ = Rasio lulusan sekolah dasar pada tahun t

G^t = Jumlah lulusan SD pada tahun t

P_a^t = Jumlah penduduk yang berusia a tahun (sesuai dengan usia kelulusan di kelas terakhir SD) pada tahun t

Untuk menghitung indikator ini data dapat diperoleh dari registrasi sekolah, survei atau sensus tertentu dan sensus penduduk. Adapun indikator ini dapat dibedakan menurut gender dan wilayah.

Interpretasi: sebuah rasio yang tinggi menunjukkan tingginya arus output pendidikan dasar.

Keterbatasan: perhitungan indikator ini mencakup semua lulusan tanpa memandang usia. Rasio tersebut bisa melebihi 100 persen, karena memasukkan anak diatas atau di bawah umur. Selain itu, di beberapa negara, hasil kelulusan mungkin didorong oleh ketersediaan tempat di pendidikan lanjutan/ menengah, sehingga perlu adanya kehati-hatian dalam membuat perbandingan.

***Expected Gross Primary Graduation Ratio (EGPGR)/
Rasio Harapan Kelulusan Kotor Di Sekolah Dasar***

Definisi: jumlah siswa baru ke kelas I SD pada tahun tertentu, tanpa memandang usia, yang diharapkan lulus hingga kelas terakhir sekolah dasar, tanpa pengulangan, yang dinyatakan sebagai persentase dari penduduk pada usia yang sesuai dengan kelulusan di sekolah dasar pada tahun yang sama.

Jenis-Jenis Indikator Pendidikan

Tujuan: untuk mengestimasi output SD di masa depan berdasarkan siswa baru saat ini di kelas I SD dengan asumsi transisi kelas saat ini dan tingkat pengulangan serta probabilitas kelulusan kelas terakhir tetap tidak berubah.

Formula:

Dimana:

$EGPGR^t$ = Rasio harapan kelulusan kotor di Sekolah Dasar pada tahun t

$EGIRLG$ = Rasio harapan asupan kasar di kelas terakhir Sekolah Dasar pada tahun t

PG^t = Probabilitas lulusan dari kelas terakhir sekolah dasar pada tahun t

G^t = Jumlah Lulusan dari kelas terakhir sekolah dasar pada tahun t

NE^t_1 = Jumlah pendatang baru di kelas terakhir I sekolah dasar pada tahun t

Untuk menghitung indikator tersebut, data yang diperlukan adalah jumlah lulusan di kelas terakhir sekolah dasar pada tahun t, siswa terdaftar selama dua tahun berturut-turut (tahun t-1 dan t), jumlah siswa mengulang pada tahun t; jumlah penduduk yang berusia sesuai dengan usia masuk sekolah SD pada tahun t.

Interpretasi: nilai yang tinggi menunjukkan tingginya masa depan output pendidikan dasar.

Keterbatasan: mengingat indikator ini diestimasi dengan menggunakan model analisis kohort yang didasarkan pada sejumlah asumsi (yaitu tingkat aliran siswa yang diamati akan tetap/tidak berubah sepanjang kehidupan kohort), maka diperlukan kehati-hatian dalam membandingkan antar negara. Di beberapa wilayah, hasil kelulusan mungkin juga didorong oleh ketersediaan kapasitas di sekolah menengah/lanjutan.

Out-Of-School Children-Primary (OOS)/ Anak Yang Tidak Terdaftar Di Pendidikan Dasar

OOS dihitung untuk mengidentifikasi jumlah penduduk yang termasuk dalam usia sekolah dasar yang harus menjadi sasaran kebijakan dalam mencapai pendidikan dasar.

Definisi: sejumlah anak yang termasuk dalam usia sekolah dasar yang tidak terdaftar baik di SD atau SMP.

Tujuan: untuk mengidentifikasi jumlah penduduk yang termasuk dalam usia sekolah dasar yang harus menjadi sasaran kebijakan dalam mencapai pendidikan dasar.

Cara Penghitungan:

Bagilah jumlah penduduk yang terdaftar di sekolah dasar dan menengah dengan jumlah penduduk usia sekolah SD dan SMP.

Dengan demikian, data yang diperlukan adalah penduduk yang termasuk dalam usia sekolah dasar dan jumlah siswa terdaftar baik di sekolah dasar atau sekolah menengah. Adapun sumber data dapat diperoleh dari registrasi, survei atau sensus tertentu dan sensus penduduk. Indikator ini dapat dibedakan menurut gender dan wilayah.

Interpretasi: semakin tinggi indikator ini, semakin besar upaya yang diperlukan untuk mewujudkan kebijakan yang berkaitan dengan pencapaian pendidikan dasar untuk semua. Kebijakan ini dapat memfokuskan upaya pada kelompok populasi prioritas atau jenis kelamin tertentu. Tingginya indikator ini mungkin disebabkan karena keterlambatan saat mendaftar sekolah bisa juga disebabkan oleh banyaknya anak yang keluar sekolah sebelum mencapai usia sekolah.

Keterbatasan: indikator ini tidak dapat mengukur secara tepat, karena menggunakan sumber data yang berbeda.

***Promotion Rate by Grade (PR)*/Angka Kenaikan Menurut Kelas**

Definisi: proporsi siswa dari kohort yang terdaftar dalam kelas tertentu yang mampu bertahan hingga kelas berikutnya.

Tujuan: untuk mengukur kinerja sistem pendidikan dalam hal kenaikan kelas dan mengukur efisiensi internal sistem pendidikan. Indikator ini juga merupakan indikator kunci untuk menganalisis dan memproyeksikan arus murid dari kelas ke kelas dalam siklus pendidikan.

Jenis-Jenis Indikator Pendidikan

Formula:

PR mengandung kelemahan, karena dalam beberapa kasus, kenaikan kelas dapat ditentukan oleh lembaga pendidikan.

Dimana:

PR_i^t = Angka kenaikan kelas i pada tahun t

NE_{i+1}^{t+1} = Jumlah siswa pada kelas i + 1, pada tahun t+1

E_i^t = Jumlah siswa terdaftar di kelas 1, pada tahun t

Interpretasi: nilai yang mendekati 100 persen menunjukkan efisiensi internal yang tinggi dalam suatu sistem pendidikan. Bila indikator ini dibandingkan antar kelas, maka dapat terlihat kelas mana yang menunjukkan angka kenaikan yang tinggi.

Keterbatasan: dalam beberapa kasus, kenaikan kelas dapat ditentukan oleh lembaga pendidikan, dengan tujuan mengatasi keterbatasan kapasitas kelas dan untuk meningkatkan efisiensi internal dan aliran siswa.

Dropout Rate by Grade (DR)/Angka Putus Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan

Definisi: proporsi siswa dari kohort yang terdaftar dalam tingkat pendidikan tertentu yang tidak lagi terdaftar pada tahun ajaran berikutnya.

Tujuan: untuk mengukur fenomena siswa dari kohort yang meninggalkan sekolah sebelum waktunya, dan mengukur pengaruhnya terhadap efisiensi internal sistem pendidikan. Selain itu, merupakan salah satu indikator kunci untuk menganalisis dan memproyeksikan aliran siswa dari kelas ke kelas berikutnya.

Formula:

$$DR_i^t = 100 - (PR_i^t + RR_i^t)$$

Dimana:

DR_i^t = Dropout di kelas i pada tahun t

PR_i^t = Jumlah siswa naik kelas i tahun t

RR_i^t = Angka pengulangan di kelas i pada tahun t

Nilai DR yang mendekati 0 persen menunjukkan efisiensi internal dari sistem pendidikan.

Interpretasi: nilai yang mendekati 0 persen menunjukkan rendahnya angka putus sekolah yang dapat menggambarkan efisiensi internal dari sistem pendidikan. Perbandingan antar tingkat pendidikan dapat menunjukkan sasaran prioritas kebijakan.

Keterbatasan: dalam beberapa kasus, tingkat dan jumlah maksimum pengulangan kelas yang diperbolehkan dapat ditentukan oleh lembaga pendidikan yang berwenang dengan tujuan mengatasi keterbatasan kapasitas kelas dan dalam rangka meningkatkan efisiensi internal dan aliran siswa.

Gross Enrolment Ratio In Early Childhood Care and Education (GER/ECCE)/Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Usia Dini

Definisi: jumlah anak yang terdaftar dalam pendidikan usia dini tanpa memandang usia, yang dinyatakan sebagai persentase dari populasi dalam kelompok usia yang relevan.

Tujuan: untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah bagi anak usia dini. Hal ini juga menunjukkan kapasitas negara dalam mempersiapkan anak sebelum memasuki pendidikan dasar.

Formula:

Dimana:

GER_{Ecce}^t = Angka partisipasi sekolah pendidikan usia dini pada tahun t

E_{Ecce}^t = Jumlah anak yang terdaftar dalam program pendidikan usia dini pada tahun t

P_{Ecce}^t = Jumlah penduduk pada usia yang relevan untuk masuk pendidikan usia dini pada tahun t

Interpretasi: nilai indikator ini menunjukkan kapasitas yang memadai untuk pendidikan usia dini. Nilai yang mendekati atau melebihi 100 persen menunjukkan bahwa adanya kemampuan dalam menampung semua anak usia pada pendidikan usia dini.

Jenis-Jenis Indikator Pendidikan

Keterbatasan: perlu kehati-hatian dalam membandingkan data karena terdapat perbedaan kualifikasi mengenai pendidikan usia dini, karena tujuannya berbeda-beda, beberapa pendidikan usia dini menekankan pada pendidikannya sementara yang lain menekankan pengembangan ketrampilan, pengembangan akademis, seni visual, dll.

Percentage of New Entrants To Primary Education With ECCE Experience/ Persentase Siswa Baru di Sekolah Dasar yang Pernah Masuk dalam Pendidikan Usia Dini

Definisi: jumlah siswa baru di kelas 1 SD yang sebelumnya pernah duduk di pendidikan usia dini yang telah menyelenggarakan pendidikan minimal 200 jam, dinyatakan sebagai persentase dari total siswa baru di kelas 1 SD.

Tujuan: untuk menilai proporsi siswa baru kelas 1 yang diduga telah menerima beberapa persiapan melalui program pendidikan usia dini.

Formula:

Dimana:

$$\%NE_{1,ECCE}^t = \frac{NE_{1,ECCE}^t}{NE_1^t} \times 100$$

$\% NE_{1,ECCE}^t$ = Persentase siswa baru kelas 1 SD yang sebelumnya pernah duduk di pendidikan usia dini pada tahun t

$NE_{1,ECCE}^t$ = Jumlah siswa baru kelas 1 SD yang sebelumnya pernah duduk di pendidikan usia dini pada tahun t

NE_1^t = Jumlah siswa baru kelas 1 SD pada tahun t

Interpretasi: persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah berpartisipasi dalam kegiatan belajar sebelum memasuki sekolah dasar. Hal ini menunjukkan kondisi yang positif, sebab siswa yang memasuki sekolah dasar telah mempunyai kemampuan kognitif sebelumnya. Seperti diketahui, pendidikan usia dini memainkan peran penting

dalam masa depan pendidikan anak, karena mereka telah dipersiapkan untuk menerima pembelajaran dan pendidikan.

Keterbatasan: di beberapa wilayah/negara, indikator ini dapat memberikan gambaran yang berlebihan, karena anak-anak yang memiliki akses ke program pendidikan usia dini cenderung memiliki akses ke sekolah dasar.

Percentage of Trained Teachers/Persentase Guru Terlatih

Definisi: jumlah guru yang telah menerima pelatihan keguruan (pre-service or in-service) untuk mengajar di tingkat pendidikan tertentu di negara tertentu, dinyatakan sebagai persentase dari total jumlah guru di tingkat pendidikan yang sama.

Tujuan: untuk mengukur proporsi guru terlatih dalam keterampilan pedagogis, sesuai dengan standar nasional agar mampu mengajar secara efektif dengan menggunakan bahan ajar yang tersedia. Hal tersebut juga mencerminkan upaya negara dalam pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan mengajar.

Formula:

Dimana:

$\% T_{h,c}^t$ = Persentase guru pada tingkat pendidikan h yang pernah mendapatkan pelatihan keguruan pada tahun t

$T_{h,c}^t$ = Jumlah guru pada tingkat pendidikan h yang pernah mendapatkan pelatihan keguruan pada tahun t

T_h^t = Jumlah guru pada tingkat pendidikan h pada tahun t

Interpretasi: persentase yang tinggi menunjukkan tingginya jumlah guru yang memiliki keterampilan pedagogis yang diperlukan untuk mengajar yang mampu menggunakan bahan ajar yang tersedia secara efektif.

Jenis-Jenis Indikator Pendidikan

Keterbatasan: indikator ini tidak mempertimbangkan perbedaan dalam pengalaman mengajar, metode, bahan ajar dan variasi kondisi kelas, dan semua faktor yang juga mempengaruhi kualitas belajar-mengajar. Hal lain yang perlu dicatat adalah beberapa guru mungkin tidak memperoleh pelatihan formal, namun mereka telah memperoleh pelatihan pedagogis lain yang setara melalui pengalaman lain.

Public Expenditure on A Specific ISCED Level As % of Total Public Expenditure on Education / **Pengeluaran Untuk Tingkat Pendidikan Tertentu Terhadap Pengeluaran Pendidikan**

Definisi: pengeluaran untuk tingkat pendidikan tertentu sebagai persentase dari total pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan.

Tujuan: untuk menunjukkan kontribusi pengeluaran untuk tingkat pendidikan tertentu dalam pengeluaran publik keseluruhan.

Formula:

Dimana:

$\%PXE_i^t$ = Pengeluaran untuk tingkat pendidikan i sebagai persentase dari total pengeluaran pemerintah untuk pendidikan pada tahun t

PXE_i^t = Pengeluaran untuk tingkat pendidikan i pada tahun t

PXE_h^t = Pengeluaran pendidikan pada tingkat pendidikan h pada tahun t

Interpretasi: persentase yang tinggi menunjukkan prioritas kebijakan yang diberikan pada tingkat pendidikan tertentu. Sebagai catatan, ketika menginterpretasikan indikator ini, kita harus mempertimbangkan partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan terkait kemudian melihat pengeluaran pendidikan per siswa pada tingkat pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Usia Dini menunjukkan kapasitas negara dalam mempersiapkan anak sebelum memasuki pendidikan dasar.

Keterbatasan: dalam beberapa kasus, data pengeluaran pendidikan hanya mengacu pada intitusi yang bergerak dalam pelayanan pendidikan, tidak termasuk departemen lain yang menghabiskan bagian dari anggarannya untuk kegiatan pendidikan pada tingkat pendidikan tertentu.

Gender Parity Index (GPI)/ Indeks Paritas Gender

Definisi: rasio perempuan terhadap laki-laki mengenai indikator tertentu.

Tujuan: GPI mengukur kemajuan kesetaraan gender dalam partisipasi pendidikan dan atau kesempatan memperoleh pengajaran. Hal ini juga mencerminkan tingkat pemberdayaan perempuan dalam masyarakat.

Formula:

Dimana:

GPI_i^t = Indeks paritas gender untuk indikator i pada tahun t

F_i^t = Nilai indikator i perempuan pada tahun t

M_i^t = Nilai indikator i laki-laki pada tahun t

Interpretasi: GPI sama dengan 1 menunjukkan tidak adanya disparitas antara laki-laki dan perempuan. Nilai kurang dari 1 menunjukkan lebih tingginya indikator laki-laki dan sebaliknya.

Keterbatasan: indeks tidak menunjukkan adanya peningkatan atau penurunan kinerja salah satu kelompok gender. Selain itu, interpretasi memerlukan analisis terhadap indikator yang mendasarinya.

Youth Literacy Rate/Tingkat Melek Huruf Penduduk Usia Muda

Definisi: jumlah penduduk berusia 15-24 tahun yang dapat membaca dan menulis secara sederhana mengenai kalimat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dibagi dengan penduduk dalam kelompok umur 15-24 tahun. Umumnya, 'literasi' juga mencakup kemampuan berhitung atau

GPI mengukur kemajuan kesetaraan gender dalam partisipasi pendidikan dan atau kesempatan memperoleh pengajaran.

Jenis-Jenis Indikator Pendidikan

kemampuan untuk membuat perhitungan aritmetika sederhana.

Tujuan: untuk mencerminkan hasil akhir dari proses pendidikan dasar. Indikator ini juga mencerminkan ukuran singkat mengenai efektivitas sistem pendidikan.

Formula:

$$LIT_{15-24}^t = \frac{L_{15-24}^t}{P_{15-24}^t} * 100$$

Dimana:

LIT_{15-24}^t = Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun pada tahun t

L_{15-24}^t = Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mampu membaca dan menulis pada tahun t

P_{15-24}^t = Jumlah penduduk usia 15-24 tahun pada tahun t

Interpretasi: nilai yang tinggi menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dan efektivitas dalam program keterampilan dasar membaca dan menulis. Karena orang yang tergolong kelompok usia ini memasuki usia dewasa, pemantauan tingkat melek aksara pada kelompok ini sangat penting sehubungan dengan kebijakan peningkatan sumber daya manusia.

Keterbatasan: beberapa negara menerapkan definisi dan konsep yang berbeda dalam hal kemampuan keaksaraan. Di sisi lain, praktek untuk mengidentifikasi melek huruf dan buta huruf selama sensus/survei sangat bervariasi.

Coefficient Of Efficiency (CE) / Koefisien Efisiensi

Definisi: jumlah tahun-murid ideal yang diperlukan (yaitu dengan tidak adanya pengulangan dan putus sekolah) untuk menghasilkan sejumlah lulusan dari kohort murid tertentu yang dinyatakan sebagai persentase dari jumlah tahun-murid yang sebenarnya dihabiskan untuk menghasilkan jumlah lulusan yang sama. Indikator yang sering digunakan sebagai alternatif koefisien efisiensi adalah rasio input output yang merupakan kebalikannya.

Catatan: satu tahun sekolah di dalam kelas yang dihabiskan oleh seorang murid dihitung sebagai satu tahun-murid.

Tujuan: indikator ini merupakan indikator efisiensi internal dalam sistem pendidikan yang merangkum konsekuensi pengulangan dan putus sekolah untuk melihat efisiensi sistem pendidikan untuk menghasilkan sejumlah lulusan.

Formula:

CE merupakan indikator efisiensi internal dalam sistem pendidikan yang merangkum konsekuensi pengulangan dan putus sekolah untuk melihat efisiensi.

Dimana:

CE_g = Koefisien efisiensi untuk kohort murid g

$G_{g,n}$ = Jumlah lulusan kohort g pada kelas akhir n setelah belajar n tahun studi (tanpa pengulangan)

$G_{g,j}$ = Jumlah lulusan dari kohort g pada kelas akhir n setelah j tahun studi.

$D_{g,j}$ = Jumlah murid (dari kelompok g) yang putus sekolah setelah j tahun studi.

k = Jumlah pengulangan yang diperbolehkan

n = Masa studi normal pada suatu tingkat pendidikan tertentu

g = kohort murid

j = jumlah tahun studi

Interpretasi: angka CE yang mendekati 100% menunjukkan tingginya tinggi tingkat efisiensi internal dalam menghasilkan lulusan dan tidak adanya kerugian karena ada yang mengulang dan putus sekolah. Koefisien CE di bawah 100% mencerminkan dampak dari adanya murid yang mengulang dan putus sekolah.

Keterbatasan: mengingat indikator ini biasanya didapatkan dengan menggunakan model analisis kelompok(kohort) yang didasarkan pada sejumlah asumsi maka harus berhati-hati dalam melakukan perbandingan. Dari sudut pandang konsep, banyaknya murid yang lulus dalam waktu yang ditentukan

Jenis-Jenis Indikator Pendidikan

berkaitan dengan efisiensi ekonomi dan pemanfaatan sumber daya, tetapi ini hal tersebut tidak selalu berarti sebagai hasil pembelajaran. Selain itu, dengan metode ini, putus sekolah di awal kelas (yaitu dari kelas bawah) dapat mengakibatkan nilai efisiensi internal lebih tinggi daripada putus sekolah di kelas yang lebih tinggi).

Years Input Per Graduate (YIG) / Tahun Masuk Lulusan

Definisi: perkiraan jumlah rata-rata tahun-murid yang dihabiskan oleh seorang murid (mahasiswa) dari kelompok kohort tertentu yang lulus dari suatu siklus atau tingkat pendidikan tertentu, memperhitungkan tahun-murid sia-sia karena putus sekolah dan mengulang.

Tujuan: untuk menilai sejauh mana efisiensi internal pendidikan dalam hal perkiraan rata-rata jumlah tahun yang akan diinvestasikan dalam menghasilkan lulusan.

Formula:

YIG berguna untuk menilai sejauh mana efisiensi internal pendidikan dalam hal perkiraan rata-rata jumlah tahun yang akan diinvestasikan dalam menghasilkan lulusan.

dimana :

YIG_g = Tahun masuk lulusan (untuk lulusan dari kelompok kohort g)

G_{gj} = Jumlah lulusan dari kohort g setelah j tahun studi

D_{gj} = Jumlah murid (dari kelompok g) yang putus sekolah setelah j tahun studi

k = Jumlah pengulangan yang diperbolehkan

n = Masa studi normal pada tingkat pendidikan tertentu

g = kohort murid

j = jumlah tahun studi

Interpretasi: secara teori, jika durasi dari siklus pendidikan tertentu semakin dekat dengan nilai indikator, semakin tinggi efisiensi internal dan semakin kecil dampak negatif dari adanya murid yang mengulang dan putus sekolah.

Keterbatasan: dari sudut pandang konsep, banyaknya murid yang lulus dalam waktu yang ditentukan berkaitan dengan efisiensi ekonomi dan pemanfaatan sumber daya, tetapi ini hal tersebut tidak selalu berarti sebagai hasil pembelajaran. Selain itu, dengan metode ini, putus sekolah di awal kelas (yaitu dari kelas bawah) dapat mengakibatkan nilai efisiensi internal lebih tinggi daripada putus sekolah di kelas yang lebih tinggi).

Percentage Distribution of Student In Tertiary Education by ISCED Level/Distribusi Persentase Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Berdasarkan Tingkat ISCED

Definisi: jumlah mahasiswa yang terdaftar di pendidikan tinggi pada tiap tingkat ISCED yang dinyatakan dalam persentase dari total mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi.

Tujuan: untuk menunjukkan distribusi mahasiswa pendidikan tinggi berdasarkan tingkat ISCED. Hal ini juga membantu untuk menganalisis derajat dan struktur kualifikasi perguruan tinggi yang diatur suatu negara.

Formula:

dimana:

$\%E_h^t$ = Persentase mahasiswa perguruan tinggi pada tingkat ISCED h pada tahun akademik t

E_h^t = Jumlah mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi di tingkat ISCED h pada tahun akademik t

Interpretasi: konsentrasi mahasiswa pada suatu program (jangka panjang/pendek) kemungkinan besar akan didorong oleh kesempatan kerja yang berkaitan dengan tingkat/program tersebut. Hal ini juga mencerminkan kapasitas dan kebijakan untuk pengembangan level ISCED tertentu.

Keterbatasan: dalam melakukan perbandingan lintas negara dan lintas waktu memerlukan kehati-hatian, karena

Jenis-Jenis Indikator Pendidikan

program perguruan tinggi sangat bervariasi dalam hal durasi, intensitas dan tingkatan kontennya secara teori dan praktek.

Percentage of Female Students In Each ISCED Level of Tertiary Education/Persentase Mahasiswa Perempuan Pada Perguruan Tinggi Di Masing-Masing Tingkat ISCED

Definisi: mahasiswi yang terdaftar di masing-masing tingkat ISCED pada suatu perguruan tinggi, yang dinyatakan dalam persentase dari total mahasiswa (laki-laki dan perempuan) di tingkat level yang sama.

Tujuan: untuk menilai perbedaan gender dalam kaitannya dengan partisipasi dalam berbagai tingkat perguruan tinggi.

Formula:

$$\%FE_h^t = \frac{FE_h^t}{E_h^t} * 100$$

dimana:

$\%FE_h^t$ = Persentase mahasiswi perguruan tinggi di tingkat ISCED h pada tahun akademik t

FE_h^t = Jumlah mahasiswi perguruan tinggi di tingkat ISCED h pada tahun akademik t

E_h^t = Total mahasiswa perguruan tinggi (laki-laki dan perempuan) di tingkat ISCED h pada tahun akademik t

Interpretasi: nilai mendekati angka 50% menunjukkan tingkat paritas gender yang baik. Hal ini juga berguna untuk membandingkan persentase mahasiswi dalam berbagai tingkat dan bidang pendidikan. Jika indikator ini di bedakan berdasarkan bidang pendidikan, dapat mengidentifikasi bidang-bidang yang menarik bagi gender tertentu.

Keterbatasan: diperlukan kehati-hatian dalam membandingkan indikator ini lintas negara dan lintas waktu, karena program di setiap perguruan tinggi sangat bervariasi dalam hal durasi, intensitas dan tingkat kontennya secara teori dan praktek.

Percentage Distribution of Students In Tertiary Education by ISCED Fields of Education/Distribusi Persentase Mahasiswa Perguruan Tinggi Menurut Bidang ISCED

Definisi: mahasiswa perguruan tinggi yang terdaftar di masing-masing bidang ISCED, dinyatakan dalam persentase dari total mahasiswa perguruan tinggi.

Tujuan: untuk mengukur tingkat pengembangan perguruan tinggi dalam kaitannya dengan berbagai bidang yang ditawarkan, kemampuan mahasiswa pada masing-masing bidang, serta preferensi mahasiswa. Dengan demikian mencerminkan potensi permintaan dan pasokan sumber daya manusia yang berkualitas di berbagai keahlian.

Formula:

%E_h^t digunakan untuk menganalisis derajat dan struktur kualifikasi perguruan tinggi yang diatur suatu negara.

dimana:

$\%E_f^t$ = Persentase mahasiswa yang terdaftar di bidang pendidikan f pada tahun akademik t

E_f^t = Jumlah mahasiswa yang terdaftar di bidang pendidikan f pada tahun akademik t

n = Jumlah banyaknya bidang pendidikan

Interpretasi: Konsentrasi mahasiswa dalam bidang pendidikan tertentu yang menggambarkan preferensi dan kapasitas. Di sisi lain mencerminkan kesempatan kerja dari sektor yang berbeda.

Keterbatasan: perbandingan lintas negara sangat bergantung pada seberapa jauh negara itu menggunakan definisi bidang pendidikan secara konsisten.

Percentage Distribution of Graduates by ISCED Fields of Education At The Tertiary Level/Distribusi Persentase Lulusan Perguruan Tinggi Menurut Bidang ISCED

Jenis-Jenis Indikator Pendidikan

Definisi: jumlah lulusan dari masing-masing bidang pendidikan ISCED pada perguruan tinggi, yang dinyatakan sebagai persentase dari total jumlah lulusan perguruan tinggi.

Tujuan: untuk menunjukkan distribusi lulusan perguruan tinggi dari berbagai bidang pendidikan. Hal ini juga mencerminkan perkembangan perguruan tinggi dalam hal kisaran bidang yang ditawarkan serta penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas di berbagai keahlian.

Formula:

$$\%G_f^t = \frac{G_f^t}{\sum_{f=1}^n G_f^t} * 100$$

dimana:

$\%G_f^t$ = Persentase lulusan mahasiswa dari bidang pendidikan f pada tahun akademik t

G_f^t = Jumlah lulusan mahasiswa dari bidang pendidikan f pada tahun akademik t

f = Jumlah banyaknya bidang pendidikan

Interpretasi: konsentrasi mahasiswa dalam bidang pendidikan tertentu yang menggambarkan preferensi dan kapasitas tinggi, serta kesempatan kerja yang bersesuaian dengan bidang tersebut.

Keterbatasan: perbandingan lintas negara sangat bergantung pada seberapa jauh negara itu menggunakan definisi bidang pendidikan secara konsisten.

2.2. Indikator Yang Dihitung oleh BPS

Sebagai salah satu institusi yang memiliki wewenang dalam hal pengumpulan data, BPS melakukan berbagai survei maupun sensus yang salah satu kegunaannya adalah untuk melihat perkembangan dan hasil pembangunan di bidang pendidikan. Akan tetapi survei atau sensus tersebut merupakan kegiatan pengumpulan data dengan pendekatan rumah

BPS melakukan berbagai survei maupun sensus untuk melihat perkembangan dan hasil pembangunan di bidang pendidikan. Sensus/survei tersebut menggunakan pendekatan rumah tangga.

tangga. Beberapa indikator pendidikan yang dihitung oleh BPS, di antaranya:

2.2.1. Indikator sarana dan prasarana pendidikan, meliputi:

- a. Persentase penduduk 5 tahun ke Atas yang masih sekolah menurut sarana pergi ke sekolah
- b. Rata-rata biaya pendidikan per siswa
- c. Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang bersekolah dan menerima beasiswa
- d. Persentase siswa penerima beasiswa menurut sumber beasiswa
- e. Persentase desa yang memiliki sekolah/fasilitas pendidikan TK
- f. Persentase desa yang memiliki sekolah/fasilitas pendidikan SD sederajat
- g. Persentase desa yang memiliki sekolah/fasilitas pendidikan SMP sederajat
- h. Persentase desa yang memiliki sekolah/fasilitas pendidikan SMU sederajat
- i. Persentase desa yang memiliki sekolah/fasilitas pendidikan akademi/universitas
- j. Persentase desa yang memiliki lembaga pendidikan keterampilan
- k. Persentase desa yang memiliki fasilitas Program Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional
- l. Persentase desa yang memiliki fasilitas Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- m. Persentase desa yang memiliki fasilitas Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Konsep yang berkaitan dengan indikator diatas diantaranya:

- 1). Sarana pergi ke sekolah adalah sarana yang dipergunakan untuk pergi bersekolah yang terdiri dari kendaraan yang dikuasai rumah tangga, kendaraan umum bermotor, kendaraan umum tidak bermotor, kendaraan orang lain gratis dan jalan kaki.
- 2). Beasiswa adalah bantuan yang diberikan langsung kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau

Jenis-Jenis Indikator Pendidikan

siswa yang berprestasi, baik dalam bentuk uang maupun barang. Termasuk beasiswa yang diperoleh karena tugas belajar dan sekolah ikatan dinas.

- 3). Biaya pendidikan adalah semua biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan, baik yang sudah dibayarkan maupun belum dibayarkan (berupa uang atau barang) untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan di kelas yang saat ini sedang ditempuh. Biaya meliputi: pendaftaran, SPP, BP3, praktek, OSIS, ujian, bahan belajar, pakaian sekolah, buku, alat tulis, transportasi, kursus dan lainnya.
- 4). Pendidikan keterampilan adalah pendidikan luar sekolah yang dikelola oleh suatu lembaga tentang keterampilan tertentu yang sifatnya khusus, jangka waktunya relatif pendek, ditujukan kepada masyarakat umum dan menyediakan sertifikat bagi peserta yang lulus serta diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Misal: kursus montir mobil/motor yaitu kursus membetulkan sepeda motor dan mobil. Kursus elektronik antara lain kursus membetulkan radio, TV, AC, kulkas, komputer dan sebagainya.
- 5). Keaksaraan fungsional adalah metode pemberantasan buta aksara dengan suatu pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, mengamati dan menganalisis yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari serta memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya. Keaksaraan fungsional yang dimaksud adalah kelompok belajar yang ada kegiatannya.
- 6). Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) adalah program layanan pendidikan yang diintegrasikan dengan program Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Peserta didik adalah anak usia 0 – 6 tahun yang tidak terlayani di lembaga pendidikan anak dini usia lainnya. Pendidik umumnya para kader PKK. Untuk anak 0 – 2 tahun dilaksanakan dalam bentuk "Pengasuhan

Bersama” oleh para orang tua atau pengasuh, dengan didampingi oleh seorang kader. Kelompok anak usia 2 – 6 tahun dilaksanakan dalam bentuk “Bermain Bersama”. Pos PAUD dilaksanakan 1 kali dalam seminggu yang jadwalnya dapat disesuaikan dengan hari layanan BKB dan Posyandu. Lama kegiatan Pos PAUD untuk kelompok pengasuhan bersama (0 – 2 tahun) dilaksanakan sekitar 2 jam, sedangkan kelompok bermain bersama (2 – 6 tahun) sekitar 3 jam.

- 7). Taman Bacaan Masyarakat merupakan salah satu program riil Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Departemen Pendidikan Nasional, yang merupakan sarana pendukung dalam pemberantasan buta aksara. Syarat berdirinya TBM antara lain: (1). Tersedia tempat/ruangan yang memadai dan nyaman berukuran minimal 3m x 4m; (2). Lokasi yang mungkin dipergunakan adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), balai desa, PAUD, masjid atau tempat tinggal yang memadai; (3). Tersedia koleksi buku minimal 50 judul buku dengan minimal 2 eksemplar untuk setiap judul. Jadi total buku yang tersedia minimal ada 100 buku; (4). Tersedia rak buku sederhana berikut karpet atau meja-kurs; (5). Tersedia papan nama TBM. Disebut TBM, minimal syarat 1 dan 3 terpenuhi. Buku-bukunya disuplai oleh orang-orang yang peduli akan pentingnya membaca buku.

2.2.2. Partisipasi pendidikan

- a. Persentase anak usia 2-6 tahun yang mengikuti pendidikan pra sekolah
- b. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
- c. Angka Partisipasi Murni (APM)
- d. Angka Partisipasi Kasar (APK)
- e. Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan kesetaraan dengan Paket A/B/C

Konsep yang berkaitan dengan indikator diatas diantaranya:

- 1). APS, APM dan APK yang dihitung oleh BPS mengikuti konsep yang ditetapkan oleh UNESCO akan tetapi sumber

Jenis-Jenis Indikator Pendidikan

data diperoleh dari survei dengan pendekatan rumah tangga, yaitu berasal dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional)

- 2). Paket A/B/C merupakan program pendidikan informal yang setara dengan SD untuk Paket A, SMP untuk Paket B dan, SMU sederajat untuk Paket C. Program ini ditujukan bagi mereka yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak pernah sekolah, putus sekolah, putus lanjut, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup.

2.2.3. Hasil pembangunan pendidikan

- a. Angka Melek Huruf
- b. Rata-rata lama sekolah (tahun)
- c. Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut status pendidikan
- d. Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan (ijazah tertinggi yang dimiliki)
- e. Persentase penduduk umur 7-18 tahun yang tidak/ belum pernah sekolah/tidak bersekolah lagi menurut alasan tidak melanjutkan sekolah

Konsep yang berkaitan dengan indikator diatas diantaranya:

- 1). Melek huruf adalah dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya
- 2). Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai oleh penduduk.

2.2.4. Kegiatan di luar jam sekolah

- a. Perkiraan jumlah dan persentase penduduk 5 tahun keatas yang sekolah menurut jenis media yang diakses
- b. Persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang bersekolah dan membaca buku selain buku pelajaran sekolah

- c. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang masih sekolah menurut jenis bacaan yang dibaca
- d. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang masih sekolah dan melakukan olah raga di luar jam sekolah
- e. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang masih sekolah dan melakukan olah raga di sekolah
- f. Persentase penduduk usia 5-39 tahun yang pernah dan atau sedang mengikuti kursus

Konsep yang berkaitan dengan indikator diatas diantaranya:

- 1). Media yang dimaksud adalah media elektronik berupa televisi dan radio
- 2). Kursus adalah penyelenggaraan pendidikan non formal yang mempunyai kurikulum tertentu, jangka waktu tertentu, dan tempat tertentu, yang dikelola oleh suatu lembaga/yayasan. Lama belajar/kursus biasanya kurang dari satu tahun dan mendapat sertifikat.

2.2.5. Berkaitan dengan ketenagakerjaan

- a. Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan
- b. Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menanggur menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Konsep yang berkaitan dengan indikator diatas diantaranya:

- 1). Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
- 2). Penganggur adalah mereka yang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

2.3. Indikator Yang Dihitung oleh Kementerian Pendidikan Nasional

Sebagai lembaga yang berwenang dalam penentuan program/kebijakan bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional tentunya mempunyai berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program pendidikan yang telah dijalankan maupun melihat sejauh mana program pendidikan telah berjalan. Akan tetapi indikator yang dihitung oleh Kemendiknas terbatas pada lembaga pendidikan yang berada di bawah naungannya, seperti SD, SMP dan SM (SMU dan SMK), tidak memasukkan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Indikator tersebut dihitung berdasarkan hasil survei maupun registrasi sekolah dengan unit samplingnya adalah sekolah, berbeda dengan BPS yang menggunakan unit sampling rumah tangga.

Indikator yang dihitung Kemendiknas berdasarkan hasil survei maupun registrasi sekolah dengan unit samplingnya adalah sekolah.

Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2005 - 2009, terdapat 3 kelompok indikator yang menggambarkan hal tersebut, antara lain:

2.3.1. Indikator pemerataan dan perluasan akses pendidikan

Indikator ini merupakan suatu petunjuk atau keterangan yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan dilihat dari segi peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, diantaranya adalah:

- a. Angka Masukan Kasar (AMK)
- b. Angka Melanjutkan (AM)
- c. Angka Partisipasi Kasar (APK)
- d. Angka Partisipasi Murni (APM)
- e. Angka Partisipasi Murni Usia Sekolah (APMUS)
- f. Rasio Pendidikan
- g. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS)

Konsep yang berkaitan dengan indikator diatas adalah:

- 1). AMK yang dimaksud sesuai dengan konsep UNESCO, yaitu

konsep GIR (Gross Intake Ratio), demikian halnya dengan cara penghitungannya, hanya saja untuk usia sekolah SD, yang ditetapkan di Indonesia adalah 7 tahun. Hal ini mungkin berbeda dengan yang ditentukan oleh negara lain.

- 2). Demikian halnya dengan APM, APK dan APMUS, indikator tersebut sama dengan konsep UNESCO, yaitu NER, GER dan ASER, dalam hal umur, di Indonesia, umur yang ditetapkan adalah 7-12 tahun untuk SD, 13-15 tahun untuk SMP, 16-18 tahun untuk SMA dan sederajat dan 19-24 tahun untuk perguruan tinggi.
- 3). Rasio pendidikan meliputi: rasio siswa/sekolah, rasio siswa/guru, rasio siswa/kelas, rasio kelas/ruang kelas dan rasio guru/sekolah.
- 4). Tingkat pelayanan sekolah adalah rasio jumlah siswa atau calon siswa (lulusan pada tingkat pendidikan sebelumnya) dengan jumlah sekolah ekuivalen (terdiri dari 6 kelas) pada tingkat pendidikan tertentu .

2.3.2. Indikator peningkatan mutu, relevansi dan daya saing

Indikator ini merupakan suatu petunjuk atau keterangan yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan masyarakat yang bermutu, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Indikator ini diantaranya:

- a. Persentase asal siswa SD dan MI menurut jenis pendidikan
- b. Rata-rata UAS/UAN menurut jenis pendidikan
- c. Angka mengulang, putus sekolah dan lulusan menurut jenjang pendidikan
- d. Persentase guru menurut kelayakan mengajar
- e. Kesesuaian mengajar guru SMP/SMA dengan jurusan ijazah

Jenis-Jenis Indikator Pendidikan

- f. Persentase guru SMP dan SMA menurut bidang studi yang diajarkan
- g. Persentase ruang kelas menurut kondisi
- h. Persentase ketersediaan fasilitas
- i. Kontribusi biaya pendidikan pemerintah pusat, pemda, dan orangtua serta satuan biayanya
- j. Persentase siswa SMA menurut jurusan dan kriteria penjurusan
- k. Persentase SMK yang melaksanakan sistem ganda dan siswa SMK menurut kelompok/rumpun

Konsep yang berkaitan dengan indikator diatas adalah:

- 1). Guru yang layak mengajar pada setiap tingkat pendidikan yang ditetapkan di Indonesia adalah minimal berpendidikan DIV atau S1
- 2). Angka mengulang dan putus sekolah sesuai dengan konsep UNESCO, yaitu PR (percentage of repeaters) dan DR (drop out rate).
- 3). Ruang kelas menurut kondisi di bagi menjadi 3 kondisi, yaitu baik, rusak ringan dan rusak berat. Kondisi ruang kelas baik artinya tidak perlu perbaikan. Kondisi ruang kelas rusak ringan artinya tidak membahayakan kegiatan belajar mengajar tetapi perlu perbaikan ringan, tidak perlu dirobek. Kondisi ruang kelas rusak berat artinya membahayakan kegiatan belajar mengajar dan perlu perbaikan total, dengan cara dirobek/dibongkar terlebih dahulu.
- 4). Fasilitas yang dimaksud adalah Perpustakaan Lapangan olah raga, ruang UKS (Unit Kesehatan Sekolah) dan Laboratorium (terdiri dari laboratorium biologi, kimia, fisika, bahasa, dan IPS).
- 5). Jurusan SMA terdiri dari IPA, IPS dan bahasa, sedangkan kelompok/rumpun jurusan SMK terdiri dari: Teknik dan Industri, Pertanian dan Kehutanan, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Kesejahteraan Masyarakat, Seni dan Kerajinan.

2.3.3. Indikator penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencintaan publik

Indikator ini merupakan suatu petunjuk atau keterangan yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan dengan mewujudkan sistem pengelolaan pendidikan yang efisien, efektif, dan akuntabel dengan menekankan pada peranan desentralisasi dan otonomi pendidikan di setiap jenjang pendidikan dan masyarakat, dan meningkatkan citra publik. Indikator ini diantaranya:

- a. Rata-rata Lama Belajar
- b. Tahun Masukan per Lulusan
- c. Siswa bertahan dan putus sekolah per 1.000 siswa menurut jenjang pendidikan

Konsep yang berkaitan dengan indikator diatas adalah:

- 1). Rata-rata lama belajar diperoleh dengan menggunakan data kohort dari 1.000 siswa. Seribu siswa ini diikuti perkembangannya dari tingkat I sampai lulus dan mereka diasumsikan boleh mengulang maksimum 2 kali. Cara penghitungannya adalah dengan menghitung jumlah siswa (lulusan tanpa mengulang + lulusan pernah mengulang 1 kali + lulusan pernah mengulang 2 kali) kemudian membaginya dengan jumlah tahun yang digunakan oleh siswa yang lulus, berasal dari 1.000 siswa.
- 2). Tahun masukan per lulusan menggunakan data kohort dari 1.000 siswa. Seribu siswa ini di ikuti perkembangannya dari tingkat I sampai lulus dan diasumsikan mereka hanya boleh mengulang maksimum 2 kali. Cara penghitungannya adalah dengan menghitung jumlah lulusan tanpa mengulang + lulusan pernah mengulang 1 kali + lulusan pernah mengulang 2 kali kemudian dibagi dengan jumlah tahun yang dihabiskan oleh 1.000 siswa, sampai mereka keluar dari sistem pendidikan karena lulus atau putus sekolah.
- 3). Siswa bertahan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bertahan dengan mengulang dan bertahan tanpa mengulang

2.4. Indikator yang Dapat Dihitung oleh Kementerian Lain atau Lintas Kementerian

Instansi selain Kemendiknas dan BPS dapat menjadi kontributor data untuk menghitung beberapa indikator pendidikan, misalnya Kementerian Agama yang menghitung beberapa indikator seperti yang dihitung Kemendiknas, akan tetapi indikator tersebut dihitung dari registrasi lembaga pendidikan yang berada di bawahnya seperti MI, MTs, MA dan beberapa Institut/Universitas/Akademi seperti UIN, IAIN dan STAIN. Indikator tersebut misalnya: rasio murid guru, rasio murid kelas, persentase guru menurut ijazah dan lainnya.

Indikator lain yang dapat dihitung oleh instansi lain adalah:

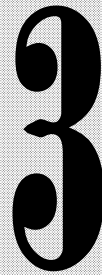
1. Rasio pengeluaran pendidikan terhadap PNB, data dapat diperoleh dari laporan keuangan pemerintah dalam APBN/APBD atau realisasinya dari Kementerian Keuangan, sedangkan PNB dapat diperoleh dari BPS
2. Persentase pengeluaran pendidikan dari total pengeluaran pemerintah, data dapat diperoleh dari laporan keuangan pemerintah dalam APBN/APBD atau realisasinya dari Kementerian Keuangan
3. Persentase pengeluaran pendidikan menurut tingkat pendidikan, data dapat diperoleh dari laporan keuangan pemerintah dalam APBN/APBD atau realisasinya dari Kementerian Keuangan
4. Pengeluaran pendidikan per siswa sebagai persentase dari PNB per kapita, data dapat diperoleh dari BPS, Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Keuangan

SUMBER DATA INDIKATOR PENDIDIKAN

Data Statistik Pendidikan BPS ●

*Data Pendidikan Kerjasama BPS dengan Kementerian
Pendidikan Nasional ●*

*Sumber Data Pendidikan dari Kementerian Pendidikan
Nasional ●*



3.1. Sensus Penduduk (SP)

Sensus Penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan penerbitan data demografi, ekonomi dan sosial yang menyangkut semua penduduk/orang pada waktu tertentu di suatu negara atau wilayah. Pelaksanaan sensus penduduk adalah sepuluh tahun sekali dan sejak Indonesia merdeka sudah dilakukan sebanyak 6 kali (tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010). Sensus penduduk yang terakhir dilakukan adalah sensus penduduk tahun 2010 (SP2010).

Sensus penduduk atau biasa disebut dengan pencacahan penduduk merupakan pengumpulan data/informasi yang dilakukan terhadap seluruh penduduk yang tinggal di teritorial Indonesia. Data yang dikumpulkan dalam sensus penduduk antara lain nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, kewarganegaraan, pekerjaan, dan tempat tanggal lahir. Hasil dari sensus penduduk adalah jumlah penduduk beserta karakteristiknya, yang sangat berguna sebagai bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Sensus penduduk tahun 2010 (SP2010) dapat menggambarkan secara aktual mengenai kondisi penduduk, perumahan, pendidikan dan ketenagakerjaan sampai wilayah administrasi terkecil.

Dalam SP2010, pertanyaan yang berkaitan dengan pendidikan ditanyakan pada Blok II Keterangan Anggota Rumah Tangga, khusus untuk anggota rumah tangga (art) yang berusia 5 tahun ke atas. Pertanyaan dalam blok tersebut ada tiga pertanyaan, dimana pada pertanyaan pertama menanyakan status sekolah masing-masing art, apakah tidak/belum pernah sekolah, masih sekolah atau tidak bersekolah lagi. Tidak/belum pernah sekolah adalah status sekolah bagi mereka yang sama sekali belum pernah sekolah, termasuk mereka yang telah tamat atau belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak/belum melanjutkan ke Sekolah Dasar. Sedangkan masih bersekolah adalah status sekolah bagi mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal. Sementara tidak bersekolah lagi adalah status sekolah bagi mereka yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

Sedangkan pertanyaan kedua, menanyakan kepemilikan ijazah/STTB tertinggi. Ijazah/STTB tersebut

Sumber Data Indikator Pendidikan

meliputi tidak/belum tamat SD, tamat SD/MI/ sederajat, tamat SLTP/MTs/ sederajat, tamat SLTA/MA/ sederajat, tamat SM Kejuruan, tamat Diploma I/II, tamat Diploma III/Akademi, tamat Diploma IV/S1 dan tamat S2/S3.

Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, menanyakan kemampuan membaca dan menulis baik untuk huruf latin maupun huruf lainnya. Seseorang dikatakan dapat membaca dan menulis jika ia dapat membaca dan menulis kata-kata/ kalimat sederhana dalam huruf latin. Huruf latin adalah huruf yang biasanya digunakan sehari-hari seperti huruf yang digunakan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya. Seseorang dikatakan dapat membaca dan menulis huruf lainnya jika ia dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf lainnya, seperti Arab, Jawa, aksara Batak, aksara Lampung, China/Mandarin, Kanji (Jepang), Korea dan India.

Indikator yang bisa dibangun dari sensus penduduk ini antara lain angka partisipasi sekolah (APS) dan angka partisipasi murni (SD, SMP, SM dan PT).

3.2. SUPAS

Seperti diketahui hampir semua rencana pembangunan perlu didukung dengan data jumlah penduduk, persebaran dan susunannya menurut umur penduduk yang relevan dengan rencana tersebut. Data yang diperlukan tidak hanya menyangkut keadaan pada waktu rencana itu disusun, tetapi juga informasi masa lampau dan yang lebih penting lagi adalah informasi perkiraan pada waktu yang akan datang. Data penduduk pada waktu yang laly dan waktu kini sudah dapat diperoleh dari hasil-hasil survei dan sensus, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan data penduduk pada masa yang akan datang perlu dibuat proyeksi penduduk yaitu perkiraan jumlah penduduk dan komposisinya di masa mendatang.

Proyeksi penduduk bukan merupakan ramalan jumlah penduduk tetapi suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Untuk menentukan asumsi dari tingkat

perkembangan kelahiran, kematian dan perpindahan di masa yang akan datang diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing komponen itu, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain serta target yang akan dicapai atau diharapkan pada masa yang akan datang.

Badan Pusat Statistik (BPS) sudah berapa kali membuat proyeksi penduduk berdasarkan data hasil sensus penduduk (SP) 1971, 1980, 1990, 2000 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1985 dan 1995. Proyeksi penduduk yang terakhir dibuat adalah proyeksi penduduk berdasarkan hasil SP 2000. Untuk keperluan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang diperlukan data jumlah penduduk sampai dengan tahun 2015.

Data yang dikumpulkan pada kegiatan SUPAS dan berkaitan dengan indikator pendidikan yaitu:

a. Kepandaian membaca dan menulis

1. Orang yang dapat membaca dan menulis surat atau kalimat sederhana dalam huruf latin ataupun lainnya.
2. Orang buta yang dapat membaca dan menulis Huruf Braille.
3. Orang yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena cacat mereka tidak dapat membaca dan menulis.
4. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis dianggap tidak dapat membaca dan menulis.

b. Pendidikan yang ditamatkan

Yang dimaksud dengan "tamat" adalah selesai mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu sekolah sampai akhir dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi, tetapi ia mengikuti ujian dan lulus, dianggap "tamat". Dalam SUPAS 2005, pendidikan yang ditamatkan dibagi menjadi 9 golongan yaitu:

1. Tidak punya
2. Sekolah Dasar (SD)/MI/Sederajat
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/MTs/Sederajat/Kejuruan

Sumber Data Indikator Pendidikan

4. Sekolah Menengah Umum (SMU)/MA/Sederajat
5. Sekolah Menengah Kejuruan
6. Diploma I/II 7. Diploma III/Sarjana Muda
8. Diploma IV/S1
9. S2 dan S3

3.3. PODES

Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas dan berfungsi sebagai penyedia data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan di berbagai bidang baik, sektoral maupun regional. Untuk itu, BPS dituntut untuk menyediakan data yang akurat, relevan, tepat waktu dan mutakhir, karena data tersebut digunakan sebagai acuan pokok bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional di Indonesia.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah (Otda), maka kegiatan perencanaan pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data kewilayahan yang akurat dan lengkap hasil pendataan Potensi Desa (PODES) 2008. Lebih jauh lagi data yang berkaitan dengan potensi suatu wilayah merupakan masukan penting bagi para perumus kebijakan dan perencana pembangunan di daerah. Dengan demikian, informasi tentang potensi yang dimiliki suatu wilayah misalnya setingkat desa/kelurahan, akan sangat berguna bagi perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan desa/kelurahan tersebut secara menyeluruh dan terpadu.

Pendataan PODES 2008 ini merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk menyajikan data yang layak sebagai sumber rujukan sekaligus memperhatikan kelengkapan dan kecukupan isi sehingga diharapkan mampu mengakomodasi dan memfasilitasi kebutuhan data di daerah. Dengan demikian pendataan PODES 2008 harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memperhatikan aspek keakuratan serta kualitas datanya.

Data PODES merupakan satu-satunya sumber data kewilayahan yang isinya beragam yang memberi gambaran tentang situasi pembangunan di suatu wilayah (regional). Data ini berbeda dengan data dari hasil pendekatan rumah

tangga yang lebih menekankan pada dimensi aktivitas sektoral. Dengan demikian data PODES menjadi penting untuk melengkapi kekayaan data di BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pendataan PODES sejak tahun 1980 bersamaan dengan penyelenggaraan Sensus Penduduk 1980 hingga yang terakhir pada tahun 2008 menjelang pelaksanaan Sensus Penduduk 2010. Dengan demikian, pendataan PODES dilaksanakan selama 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

Data yang dikumpulkan pada kegiatan PODES 2008 dan berkaitan dengan indikator pendidikan yaitu:

Pada kuesioner PODES S08-Desa terdapat pada Blok VI yaitu Pendidikan dan Kesehatan yang mencakup beberapa pertanyaan antara lain :

Tingkat pendidikan :

1. TK/ sederajat
2. SD/ Sederajat
3. SMP/ sederajat
4. SMU/ sederajat
5. SMK
6. Akademi/PT yand sederajat
7. Sekolah Luar Biasa
8. Pondok Pesantren
9. Madrasah Diniyah
10. Seminari/Sejenisnya

Dari tingkat pendidikan di atas yang menjadi pertanyaan adalah berapa jumlah sekolah dari tiap jenjang pendidikan dan statu pengelolaan baik yang dikelola oleh pemerintah dalam hal ini sekolah negeri maupun yang dikolala oleh pihak swasta. Disamping itu juga di tanyakan jarak terdekat dari sekolah apabila desa tersebut tidak memiliki fasilitas sekolah seprti yang dimaksud.

Disamping pendidikan formal pada kegiatan PODES ditanyakan pula jumlah keberadaan kegiatan pendidikan keterampilan yang antara lain :

Sumber Data Indikator Pendidikan

1. Bahasa Asing
2. Komputer
3. Menjahit/Tata Busana
4. Kecantikan
5. Montir mobil/motor
6. Elektronik, dan
7. Lainnya

Hal yang ditanyakan pula dalam PODES keberadaan kegiatan yang berkaitan dengan ;

1. Pemberantasan buta aksara/keaksaraan fungsional dalam tiga tahun terakhir
2. Pos pendidikan anak usia dini (PAUD), dan
3. Taman Bacaan Masyarakat

3.4. SUSENAS

Susenas merupakan survei tahunan yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang relatif sangat luas. Data yang dikumpulkan antara lain menyangkut bidang pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan, sosial ekonomi lainnya, kegiatan sosial budaya, konsumsi/pengeluaran dan pendapatan rumah tangga, perjalanan, dan pendapat masyarakat mengenai kesejahteraan rumah tangganya. Susenas pertama kali dilaksanakan pada tahun 1963. Pada tahun 1992, sistem pengumpulan data Susenas diperbaharui, yaitu informasi yang digunakan untuk menyusun indikator kesejahteraan rakyat (Kesra) yang terdapat dalam Modul (keterangan yang dikumpulkan tiga tahun sekali) ditarik ke dalam Kor (kelompok keterangan yang dikumpulkan tiap tahun). Sejak itu, Susenas tersedia perangkat data yang dapat digunakan memantau taraf kesejahteraan masyarakat, merumuskan program pemerintah yang khusus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sektor-sektor tertentu dalam masyarakat, dan menganalisis dampak berbagai program peningkatan kesejahteraan penduduk.

Pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala dalam pertanyaan modul adalah

1. Konsumsi/Pengeluaran Rumah Tangga

2. Kesehatan, Perumahan dan Pemukiman
3. Serta Sosial Budaya dan Pendidikan

Susenas modul ini setiap modul dilaksanakan setiap 3 tahun sekali secara bergiliran.

Susenas dilaksanakan pada rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh wilayah geografis Indonesia. Jumlah rumah tangga sampel yang dipilih tersebut telah memenuhi persyaratan representative. Rumah tangga sampel Susenas adalah rumah tangga yang terdapat dalam blok sensus biasa, tidak termasuk yang tinggal dalam blok sensus khusus seperti kompleks militer dan sejenisnya, serta rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa. Pengumpulan data di setiap rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara langsung antara pencacah dan responden. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada individu, perlu diusahakan agar individu yang bersangkutanlah yang menjadi responden. Keterangan tentang rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan.

Data dari sampel Kor representative disajikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Data dari sampel Kor-Modul representative disajikan pada tingkat nasional dan provinsi. Data dari sampel Kor-Modul dapat dibedakan menurut tipe daerah perkotaan dan perdesaan dan data dari data sampel Kor pada tingkat nasional dan provinsi dapat disajikan menurut tipe daerah, sedangkan data Kor yang disajikan pada tingkat kabupaten/kota tidak dapat dibedakan menurut tipe daerah.

3.4.1. Susenas Kor:

Susenas Kor memuat keterangan-keterangan pokok yang dikumpulkan setiap tahun. Salah satu keterangan pokok tersebut diantaranya berhubungan dengan pendidikan. Keterangan tentang pendidikan yang dapat diperoleh antara lain keterangan mengenai partisipasi sekolah, kegiatan sekolah yang sedang diikuti, ijazah pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan kemampuan dalam membaca dan menulis.

Berikut bentuk-bentuk pertanyaan berhubungan dengan pendidikan pada Susenas Modul Kor:

Sumber Data Indikator Pendidikan

1. Untuk anggota rumah tangga berusia 0-6 tahun, jenis pendidikan pra sekolah yang sedang diikuti atau yang pernah diikuti. (TK/BA/RA, kelompok bermain, taman penitipan anak, PAUD terintegrasi BKB/Posyandu, lembaga lainnya)
2. Partisipasi sekolah. (Tidak/belum pernah bersekolah, masih bersekolah, tidak bersekolah lagi).
3. Waktu dan alasan tidak/belum pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi? (tidak ada biaya, bekerja/mencari nafkah, menikah/mengurus rt, tidak diterima, sekolah jauh, merasa pendidikan cukup, cacat, menunggu pemngumuman, belum cukup umur, lainnya).
4. Jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki. (SD, Madrasah Ibtidaiyah, SMP Umum/Kejuruan, Madrasah Tsanawiyah, SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Program Diploma I/II, Program Diploma III, Program Diploma IV/S1, S2/S3).
5. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
6. Ijasah/STTB tertinggi yang dimiliki. (Tidak punya ijasah SD, SD, Madrasah Ibtidaiyah, SMP Umum/Kejuruan, Madrasah Tsanawiyah, SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Program Diploma I/II, Program Diploma III, Program Diploma IV/S1, S2/S3).
7. Program paket A, B, atau C.
8. Kemampuan membaca dan menulis. (huruf latin, huruf lainnya, huruf latin dan huruf lainnya, tidak dapat).

Berdasarkan bentuk-bentuk pertanyaan di atas, maka berikut indikator yang dapat dihitung sesuai yang ada di publikasi Statistik Pendidikan berdasarkan Susenas Kor:

1. Persentase anak usia 2-6 tahun yang mengikuti pendidikan pra sekolah menurut tipe daerah, jenis kelamin, dan kelompok umur.
2. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut tipe daerah jenis kelamin dan partisipasi sekolah.
3. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut kelompok umur jenis kelamin dan partisipasi sekolah.

4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut tipe daerah, jenis kelamin dan kelompok umur.
5. APS penduduk menurut tipe daerah, status ekonomi rumah tangga dan kelompok umur.
6. APK menurut tipe daerah, jenis kelamin, dan jenjang pendidikan.
7. APM menurut tipe daerah, jenis kelamin, dan jenjang pendidikan.
8. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang buta huruf menurut tipe daerah, jenis kelamin, dan kelompok umur.
9. Rata-rata lama sekolah (dalam tahun) penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut tipe daerah dan jenis kelamin.
10. Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut tipe daerah, jenis kelamin, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
11. Angka melek huruf (AMH)

3.4.2. Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP)

Susenas MSBP memuat keterangan-keterangan rumah tangga, keterangan perorangan mengenai disabilitas/kecacatan, keterangan perorangan sosial budaya dan pendidikan, serta keterangan modal sosial dan sosial lainnya. Keterangan tentang pendidikan yang dapat diperoleh antara lain keterangan mengenai partisipasi sekolah, kegiatan jalur pendidikan atau kursus yang diikuti, jenjang pendidikan yang sedang diikuti, aksesibilitas menuju sekolah, biaya pendidikan dan beasiswa. Berikut bentuk-bentuk pertanyaan berhubungan dengan pendidikan pada Susenas Modul MSBP:

1. Jenis jenjang pendidikan yang sedang diikuti/terdaftar, (SD/SDLB, MI, SMP/SMPLB, MTs, SMU/SMLB, MA, SMK, D1/D2, D3, D4/S1, S2/S3)
2. Penyelenggara pendidikan (Diknas/dinas, Kemenag, Negeri lainnya, Swasta)
3. Jarak, lama waktu tempuh, sarana yang digunakan menuju ke sekolah dari tempat tinggal.

Sumber Data Indikator Pendidikan

4. Biaya transport dan uang saku sekolah per hari.
5. Beasiswa/bantuan pendidikan, sumber darimana, besarnya beasiswa, serta penggunaan uang beasiswa/bantuan pendidikan.
6. Biaya pendidikan yang dikeluarkan.
7. Jenis media akses yang digunakan dalam mendukung kegiatan pendidikan.
8. Jalur pendidikan dan kursus yang diikuti.
9. Jenis kegiatan olahraga yang diikuti dan intensitas melakukan olahraga.
10. Jenis buku bacaan yang dibaca selain buku sekolah.

Berdasarkan bentuk-bentuk pertanyaan di atas, maka berikut indikator yang dapat dihitung sesuai yang ada di publikasi Statistik Pendidikan berdasarkan Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan:

1. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang masih sekolah menurut sarana pergi sekolah dan jenjang pendidikan.
2. Rata-rata biaya pendidikan per siswa selama bulan Januari s/d Juni menurut tipe daerah, jenis kelamin, dan jenjang pendidikan.
3. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang bersekolah dan menerima beasiswa menurut tipe daerah, jenis kelamin, dan jenjang pendidikan.
4. Persentase siswa penerima beasiswa menurut sumber beasiswa dan jenjang pendidikan.
5. Persentase penduduk yang berusia 5 tahun ke atas yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan kesetaraan dengan program paket A/B/C pada Januari-Juni menurut tipe daerah, jenis kelamin, dan jenis program paket.
6. Persentase penduduk berumur 7-18 tahun yang tidak/ belum pernah sekolah/tidak bersekolah lagi menurut alasan tidak melanjutkan sekolah, tipe daerah, dan jenis kelamin.
7. Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang sekolah menurut tipe daerah, jenis media yang diakses dan jenjang pendidikan.

8. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bersekolah dan membaca buku selain buku pelajaran sekolah menurut tipe daerah, jenis kelamin, dan jenjang pendidikan.
9. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang masih sekolah menurut tipe daerah, jenis bacaan yang dibaca, dan jenjang pendidikan.
10. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bersekolah dan melakukan olahraga di luar jam sekolah menurut tipe daerah, jenis kelamin, dan jenjang pendidikan.
11. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bersekolah dan melakukan olahraga di sekolah menurut jenis olahraga, dan jenjang pendidikan.
12. Persentase penduduk berumur 5-39 tahun yang pernah dan/atau sedang mengikuti kursus dua tahun terakhir menurut tipe daerah, jenis kelamin, dan partisipasi sekolah.
13. Persentase penduduk berumur 5-39 tahun yang sedang/pernah mengikuti kursus setahun yang lalu menurut jenis kursus, dan partisipasi sekolah.

3.5. SAKERNAS

Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) merupakan survei yang termasuk dalam kegiatan pokok Sub Direktorat Statistik Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan Indonesia. Oleh karena itu, Sakernas dirancang khusus untuk dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Sakernas itu sendiri dilakukan dengan menggunakan konsep dan definisi tidak pernah berubah sejak tahun 1976 kecuali pada tahun 2001 untuk konsep pengangguran terbuka dan status pekerjaan yang mengalami perluasan. Sakernas juga mengalami berbagai perubahan baik dalam periode pencacahan maupun cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Tahun 1986 sampai dengan 1993 Sakernas dilaksanakan secara triwulanan, tahun

Sumber Data Indikator Pendidikan

1994 sampai dengan 2001 secara tahunan setiap bulan Agustus, sedangkan tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 selain secara tahunan juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 Sakernas dilaksanakan secara semesteran.

Pengumpulan data ketenagakerjaan melalui Sakernas mempunyai tiga tujuan utama yaitu untuk mengetahui karakteristik:

- a. Penduduk yang bekerja,
- b. Pengangguran dan setengah pengangguran,
- c. Penduduk yang tercakup dalam kategori bukan angkatan kerja yaitu mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lainnya, selain kegiatan pribadi.

Pengambilan sampel terpilih pada Sakernas dilakukan dengan pertimbangan representative untuk dapat menyajikan data sampai tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengumpulan data dilakukan oleh para petugas lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden. Sampai dengan semester II (Agustus) 2006, petugas Sakernas hanya terdiri dari pencacah dan pengawas/pemeriksa. Mulai Sakernas semester I (Februari) 2007 hingga Februari 2010 pencacahan dilakukan secara tim, di dalam satu tim terdiri dari dua pencacah dan satu koordinator tim. Petugas-petugas tersebut pada umumnya adalah pegawai BPS yang berada di kecamatan (KSK/Koordinator Statistik Kecamatan) dan BPS Kabupaten/Kota setempat. Sebagian besar dari mereka umumnya telah mempunyai pengalaman dalam berbagai survei maupun sensus serta lebih menguasai medan/lapangan.

Berikut bentuk-bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan pendidikan:

1. Partisipasi sekolah untuk setiap anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas.
(Tidak/belum pernah bersekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi).
2. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan
(Tidak/belum pernah bersekolah, tidak/belum tamat SD, SD/Ibtidaiyah, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan,

Sumber Data Indikator Pendidikan

SMA/Aliyah, SMK, Program Diploma I/II/III, Program D.IV/S1, Program S2/S3).

3. Jurusan pendidikan/bidang studi.
4. Tahun tamat pendidikan.
5. Pelatihan kerja yang pernah diikuti dan sertifikat yang diperoleh.
6. Jenis pelatihan pekerjaan utama.

Berdasarkan bentuk-bentuk pertanyaan tersebut, dapat dihitung beberapa indikator sebagai berikut:

1. Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan kegiatan selama seminggu yang lalu.
2. Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja menurut provinsi dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
3. Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
4. Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
5. Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jumlah jam kerja seluruhnya.
6. Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut jenis pekerjaan utama dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
7. Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut provinsi dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
8. Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk pengangguran terbuka menurut golongan umur dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Sumber Data Indikator Pendidikan

9. Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk pengangguran terbuka menurut provinsi dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
10. Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan kategori pengangguran terbuka.
11. Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pengangguran terbuka dan kategori setengah pengangguran.

3.6. Keaksaraan Fungsional (KF)

Keaksaraan Fungsional (KF) merupakan suatu pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam menguasai dan menggunakan ketrampilan membaca, menulis, berhitung, mengamati dan menganalisa, yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari serta memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Program KF di Indonesia dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap pemberantasan, pembinaan dan pelestarian.

Survei mengenai program KF pernah dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2007 yaitu "Survei Efektifitas Program Keaksaraan Fungsional". Pertanyaan yang berkaitan dengan pendidikan dalam kuesioner survei tersebut terdapat pada keterangan anggota ruma tangga, khusus untuk art berusia 5 tahun ke atas. Jumlah pertanyaannya sekitar 8 pertanyaan, antara lain ditanyakan :

1. Partisipasi sekolah
2. Jenjang pendidikan terakhir
3. Jenis pendidikan, apakah pendidikan formal atau non formal (Pendidikan Luar Sekolah)
4. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki
5. Lokasi sekolah, apakah di dalam kecamatan atau di luar kecamatan
6. Apakah dapat membaca/menulis huruf latin atau huruf lainnya

7. Keikutsertaan dalam program KF dan
8. Tahun keikutsertaan dalam program KF.

Selain informasi umum mengenai partisipasi sekolah dan tingkat pendidikan, Survei KF juga bertujuan untuk menggali informasi mengenai Evaluasi Warga Belajar Keaksaraan Fungsional, yang di tuangkan dalam 30 pertanyaan untuk masing-masing individu yang pernah atau sedang mengikuti program KF. Dari 30 pertanyaan tersebut antara lain ditanyakan :

1. Kapan waktu mulai dan kapan waktu selesainya mengikuti program KF
2. Apakah sebelum mengikuti program KF warga yang bersangkutan dapat membaca, menulis dan berhitung
3. Mampukah memperoleh informasi adanya kegiatan program KF tersebut dari mana, apakah dari Penilik Luar Sekolah (PLS), Tenaga Lapangan Ditmas (LTD), Fasilitas Desa Binaan Intensif (FDI), tutor, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota rumah tangga lainnya, kader, tetangga/kerabat atau informasi dari lainnya
4. Alasan utama mengikuti program KF
5. Selain program KF apakah pernah mengikuti program lain, seperti Kelompok Belajar Usaha (KBU), magang, kursus, life skills/kecakapan hidup atau program lainnya
6. Tempat kegiatan KF, apakah dilakukan di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), Kelompok Belajar Masyarakat (KBM), sanggar belajar, sekolah/madrasah/ponpes, tempat ibadah, rumah penduduk atau di tempat lainnya
7. Apakah di ruang belajar tersebut tersedia kursi, meja tulis, papan tulis, kapur/spidol, buku bacaan, alat peraga calistung dan ketrampilan, sarana penerangan dan lainnya
8. Apakah warga memperoleh alat tulis
9. Penggunaan sarana belajar pelengkap seperti buku paket program KF atau program lainnya, buku pelajaran sekolah formal atau sarana lainnya
10. Sarana belajar tersebut diperoleh dari mana

Sumber Data Indikator Pendidikan

11. Berapa kali seminggu kegiatan belajar KF dilakukan
12. Dalam satu kali pertemuan berapa jam dilakukan belajar KF
13. Jumlah warga belajar dalam kelompok belajar yang diikuti, berapa laki-laki dan berapa perempuan
14. Apakah materi dibuat sesuai dengan kebutuhan WB secara bersama-sama
15. Materi yang dipelajari selama mengikuti program KF (membaca, menulis, berhitung dan ketrampilan)
16. Jika ada materi ketrampilan, jenis ketrampilan apa saja yang diajarkan (apakah ketrampilan rumah tangga, ketrampilan untuk usaha atau ketrampilan jenis lain)
17. Selain pertanyaan mengenai warga belajarnya, juga ditanyakan mengenai tutornya siapa, apakah mahasiswa, guru, kader, pengurus organisasi/lembaga penyelenggara, TDL, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu rumah tangga atau yang lainnya
18. Apakah tutornya laki-laki atau perempuan
19. Bagaimana kehadiran tutornya
20. Keaktifan tutor dalam mengingatkan jadwal belajar
21. Bahasa pengantar yang digunakan oleh tutor, apakah dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa lainnya
22. Apakah selama mengikuti kegiatan KF tutor pernah memberikan tes/ujian harian
23. Ditanyakan juga kepada warga belajar apakah selain belajar di KF, mereka juga berlatih membaca, menulis dan berhitung
24. Jika iya, siapa yang paling banyak membantu mereka belajar, apakah anggota rumah tangga lain, tetangga/teman, belajar sendiri atau dibantu pihak lainnya
25. Biasanya berlatih pada waktu pagi, siang, sore atau malam hari
26. Hambatan yang dirasakan selama mengikuti program apakah karena waktu yang tidak sesuai, tempat belajar sulit dijangkau, bahan bacaan kurang, tutor sering tidak hadir atau tutor kurang komunikatif

27. Apakah warga belajar mengikuti ujian akhir KF
28. Apakah memiliki sertifikat melek aksara seperti Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) atau Bersertifikat Melek Aksara Lainnya.
29. Jika mereka tidak mempunyai sertifikat alasannya apa, apakah karena tidak lulus ujian, tidak diberi oleh penyelenggara KF/tutor, tidak tahu ada sertifikat melek aksara atau merasa tidak perlu sertifikat
30. Apakah materi KF yang diberikan selama mereka mengikuti program KF bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

3.7. Sumber Data Pendidikan Instansi Non BPS

Di luar BPS, Kemendiknas (Kementerian Pendidikan Nasional) adalah lembaga yang juga ikut mengolah data pendidikan. Dalam pengolahan data pendidikan, Kemendiknas mempunyai metode tersendiri, yaitu dengan menggunakan form kuisisioner yang biasa disebut Laporan Individu Sekolah. Yang nantinya data dari form kuisisioner tersebut akan diisikan ke data Profil Pendidikan yang terbit tiap tahun.

Mekanisme pengumpulan data pendidikan yang dilakukan oleh Kemendiknas adalah dengan cara pendataan dengan menggunakan instrumen berupa *dummy table* dari Kemendiknas yang kemudian didistribusikan ke Diknas (Dinas Pendidikan) sampai ke tingkat kabupaten. Kemudian dari kabupaten diteruskan ke sekolah-sekolah, yang meliputi TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK serta SLB. Setelah pihak sekolah mengisi instrumen tersebut dan mengirimkan ke Diknas Kabupaten/Kota, data akan dikirim ke Diknas Provinsi. Ketika form kuisisioner terkumpul di Diknas Provinsi, data akan dientry, setelah data divalidasi dan diverifikasi data akan di kirim ke Kemendiknas. Data yang disajikan diupdate setiap tahun, tepatnya Bulan Agustus sebulan setelah tahun ajaran baru masuk (Bulan Juli). Sedang untuk penghitungan data menggunakan tahun berjalan (sampai bulan tertentu).

Dari form kuisisioner tersebut akan didapat data-data pendidikan, antara lain:

1. Tingkat Taman Kanak-kanak

Sumber Data Indikator Pendidikan

- a. Siswa baru, Siswa, dan Rombongan Belajar menurut Jenis Kelamin tiap Kelompok Belajar
 - b. Siswa Menurut Umur, Tamatan Menurut Jenis Kelamin tiap Kelompok Belajar
 - c. Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Administrasi Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin
 - d. Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Administrasi Menurut Ijazah Tertinggi
 - e. Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Administrasi Menurut Kelompok Umur dan Masa Kerja
 - f. Ruang Menurut Jenis, Status Kepemilikan, Kondisi dan Luas
 - g. Luas Tanah Menurut Status Kepemilikan
 - h. Jumlah Buku Kurikulum dan Pedoman Pelaksanaannya menurut Kondisi
 - i. Jumlah dan Jenis Meubeler menurut Kondisi (meja, kursi, lemari, papan tulis)
 - j. Alat Peraga dan Alat Bermain
2. Tingkat Sekolah Dasar
- a. Penerimaan Siswa Baru Tingkat I
 - b. Siswa Baru Tingkat I menurut Umur tiap Jenis Kelamin
 - c. Siswa menurut Tingkat dan Jenis Kelamin tiap Kelompok Umur
 - d. Siswa menurut Agama
 - e. Siswa Mengulang dan Putus Sekolah menurut Tingkat dan Jenis Kelamin
 - f. Jumlah Siswa SD yang juga bersekolah di MI menurut Jenis Kelamin
 - g. Jumlah Siswa Inklusi menurut Jenis Ketunaan dan Kelas (Rombongan Belajar)
 - h. Kelas (Rombongan Belajar) Menurut Tingkat
 - i. Siswa Tingkat VI, Peserta Ujian Akhir Sekolah dan Lulusan
 - j. Daftar Tingkat Ujian Sekolah Dasar tiap Mata Pelajaran

- k. Kepala Sekolah, Guru menurut Jabatan dan Jenis Kelamin tiap Status Kepegawaian
- l. Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Administrasi, Petugas Perpustakaan menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
- m. Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Administrasi, Petugas Perpustakaan, dan Penjaga Sekolah Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin
- n. Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Administrasi, Petugas Perpustakaan, dan Penjaga Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Masa
- o. Ruang Kelas Milik menurut Kondisi dan Bukan Milik serta Perpustakaan
- p. Buku Pegangan Guru dan siswa tiap Mata Pelajaran
- q. Buku Bacaan dan Buku Sumber di Perpustakaan (eksemplar)
- r. Jumlah alat Peraga/Praktik
- s. Kondisi Perlengkapan Sekolah/Madrasah

3. Tingkat Sekolah Menengah

- a. Jumlah Siswa Baru Tkt. I yang diterima menurut Sekolah Asal dan Jenis Kelamin
- b. Siswa Baru Tkt. I menurut Umur dan Jenis Kelamin
- c. Siswa Menurut Tingkat dan Agama
- d. Kelas (Rombongan Belajar) dan Siswa menurut Tingkat dan Jenis Kelamin tiap Program Pengajaran (*SMP/MTs dan SMA/MA*)
- e. Kelas (Rombongan Belajar) dan Siswa menurut Tingkat dan Jenis Kelamin tiap Bidang Keahlian dan Akreditasi Bidang Keahlian (*Khusus SMK*)
- f. Siswa menurut Tingkat, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
- g. Siswa Penyandang Cacat Fisik menurut Tingkat dan Jenis Kelamin

Sumber Data Indikator Pendidikan

- h. Siswa Mengulang, Putus Sekolah, dan Mutasi menurut Tingkat dan Jenis Kelamin tiap Program Pengajaran
 - i. Peserta Ujian Nasional dan Lulusan Tahun Pelajaran Sebelumnya menurut Jenis Kelamin tiap Program Studi
 - j. Buku dan Alat Pendidikan tiap Mata Pelajaran
 - k. Ruang menurut Jenis, Status Pemilikan, Kondisi dan Luas
 - l. Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Administrasi menurut Status Kepegawaian, Golongan, dan Jenis Kelamin
 - m. Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga hamenurut Kelompok Umur dan Masa Kerja Seluruhnya
 - n. Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Administrasi menurut Ijazah Tertinggi
 - o. Guru dan Kebutuhan Guru menurut Status Kepegawaian tiap Mata Pelajaran yang Diajarkan
 - p. Jumlah Tenaga Administrasi menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin
4. Tingkat Sekolah Luar Biasa
- a. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB)
 - b. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)
 - c. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)
 - d. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB)
 - e. Data Sarana Pendidikan
 - f. Data Bantuan yang Pernah Diterima
 - g. Kepala Sekolah menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin
 - h. Kepala Sekolah menurut Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
 - i. Guru menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin
 - j. Guru menurut Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin

k. Tenaga Administrasi Menurut Kualifikasi Pendidikann dan Jenis Kelamin

Dalam pengumpulan data pendidikan tersebut di atas, pihak Kemendiknas juga menemui kendala. Kendala yang sering dijumpai pada proses pengumpulan data adalah sering terjadi keterlambatan pada tahap pengembalian instrumen yang sudah terisi, sehingga berpengaruh pada dimulainya proses pengolahan data, dan akhirnya berdampak pada keterlambatan penyajian data dari target waktu yang direncanakan. Salah satu faktor keterlambatan data adalah kemampuan sumber daya tenaga pendata terhadap penguasaan pendataan yang sangat terbatas.

Di samping itu kelengkapan data yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Nasional tidak diimbangi keberagaman penghitungan indikator yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan di kabupaten/kota tidak memiliki Badan Litbang. Pegawai yang diberi kewenangan penghitungan indikator-indikator pendidikan juga belum memahami cara penghitungannya dan tidak ada tuntutan untuk menghasilkan indikator-indikator lainnya.

Di luar kendala tersebut, data pendidikan dari Kemendiknas telah melengkapi data pendidikan yang telah dihimpun oleh BPS.

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

- Angka Melek Huruf* ●
- Angka Partisipasi Sekolah (APS)* ●
- Angka Partisipasi Murni (APM)* ●
- Rata-Rata Lama Sekolah* ●
- Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan* ●
- Angka Putus Sekolah* ●
- Rasio Murid-Guru* ●
- Lainnya* ●

4

Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga pemerintah memiliki tanggungjawab yang besar untuk mencerdaskan bangsanya. Pendidikan merupakan suatu investasi bagi pembangunan bangsa kita sebab indikator pendidikan sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Selain itu, seiring dengan perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia, maka pendidikan juga berperan penting dalam menentukan kualitas manusia itu sendiri. Salah satu kebijakan pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia dan mendapatkan perhatian khusus adalah penuntasan wajib belajar sembilan tahun, yaitu wajib belajar pada tingkat SD sampai SMP.

Meskipun dalam pelaksanaannya belum optimal, program Wajar Dikdas masih terus dilaksanakan dan pemerintah sedang merencanakan untuk meningkatkannya menjadi wajib belajar dua belas tahun. Sedang pada pendidikan PLS (Pendidikan Luar Sekolah) yang berperan sebagai pengganti dalam pendidikan formal, wajib belajar sembilan tahun diselenggarakan dalam bentuk kejar paket A dan B sebagai bentuk penyetaraan yang berperan menjadi jalur pendidikan alternatif dari pencapaian pemerataan pendidikan dan peningkatan rata-rata lama sekolah guna tercapainya pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas. Dengan diadakannya wajib belajar dua belas tahun, diharapkan mutu pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Berikut adalah perkembangan beberapa indikator penting pendidikan selama tahun 2004-2009.

4.1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia yang masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. Disamping itu dapat menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, serta menunjukkan kemampuan untuk

berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Angka melek huruf juga merupakan salah satu indikator penunjang bagi penghitungan *Human Development Index (HDI)*. HDI merupakan salah satu indikator dalam pembangunan untuk menganalisis perbandingan status pembangunan sosial ekonomi suatu negara dan sekaligus menggambarkan pembangunan manusia di suatu negara.

Perkembangan angka melek huruf di Indonesia cukup menggembirakan. Menurut data Susenas, Selama tahun 2004-2009 jumlah penduduk di Indonesia yang melek huruf sudah lebih dari 90 persen (Tabel 4.1). Selama kurun waktu tersebut, angkanya terus meningkat setiap tahun, dari 90,38 persen pada tahun 2004 menjadi 92,58 persen pada tahun 2009. Meskipun tiap tahun terjadi peningkatan, rata-rata angka melek huruf perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan seperti yang tertuang dalam MDGs belum terpenuhi. Padahal menurut hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa investasi sebesar 1 US dollar untuk pendidikan bagi anak perempuan akan menghasilkan peningkatan 10 kali lipat produktivitas lebih banyak dibandingkan dengan investasi pada anak laki-laki (pernyataan Direktur Eksekutif UNICEF Ann M. Veneman pada peringatan Hari Penghapusan Kemiskinan Sedunia, 17 October 2009). Perlu campur tangan pemerintah dan masyarakat agar terjadi kesetaraan angka melek huruf antara laki-laki dan perempuan. Mempercepat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang melek huruf akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan produktivitas yang meningkat. Namun demikian perlu dicermati bahwa selisih angka melek huruf antara laki-laki dan perempuan selama kurun waktu tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat mulai meningkat kesadarannya akan pentingnya pendidikan tanpa melihat status jenis kelamin.

Berdasarkan kelompok umur, nampak kelompok umur 50 tahun atau lebih yang melek huruf jauh lebih rendah dibandingkan kelompok umur lainnya (15-49 tahun). Namun

angkanya setiap tahun cenderung menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2004 baru mencapai 70,13 persen, terus meningkat hingga mencapai 78,03 persen pada tahun 2007. Meskipun pada tahun 2008 sempat turun 75,73 persen, tahun berikutnya naik lagi menjadi 77,82 persen. Pada kelompok umur lain polanya hampir sama, cenderung meningkat dalam kurun waktu yang sama. Usaha pemerintah untuk lebih memfokuskan pemberantasan buta huruf pada penduduk usia muda mulai menampakkan hasilnya, terbukti pada tahun 2009 angka melek huruf penduduk kelompok umur 15-19 tahun meraih angka tertinggi sebesar 99,64 persen, kemudian kelompok umur 20-24 tahun dan kelompok umur 25-34 tahun sekitar 99 persen, untuk kelompok umur 35-49 tahun lebih rendah hanya 94,84 persen. Pemberantasan buta huruf pada penduduk berusia muda ini untuk mengantisipasi munculnya kembali buta huruf usia muda. Kegiatan yang dilakukan antara lain lewat sarana Biaya Operasional Sekolah (BOS), Wajar Dikdas 9 tahun dan jalur sekolah non formal berupa kejar Paket A dan Paket B.

4.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi dalam suatu kegiatan berguna untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut disukai atau tidak disukai. Semakin besar angka partisipasi suatu kegiatan, maka semakin berkualitas kegiatan tersebut. Demikian juga partisipasi yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Salah satunya adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang berguna untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan.

APS didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Dalam perkembangannya, selama tahun 2004-2009 APS penduduk usia 7-12 tahun mengalami peningkatan. Pada

tahun 2004 APS penduduk usia 7-12 tahun sekitar 96,77 persen, kemudian secara berturut-turut meningkat setiap tahun hingga menjadi 97,95 persen pada tahun 2009. APS penduduk perempuan usia 7-12 tahun sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki di usia yang sama, namun persentasenya tidak jauh berbeda.

Secara nasional, APS penduduk usia 13-15 tahun lebih rendah dibandingkan APS penduduk usia 7-12 tahun. Pada tahun 2004 APS penduduk usia 13-15 tahun 83,49 persen, kemudian tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 angkanya meningkat sekitar 84 persen, hingga tahun 2009 mencapai sekitar 85 persen.

Semakin tinggi kelompok umur penduduk, maka semakin rendah partisipasi sekolahnya. Demikian juga dengan APS kelompok usia 16-18 tahun, paling rendah dibandingkan kelompok usia lainnya yaitu hampir setengah dari APS penduduk usia 7-12 tahun. Meskipun lambat, APS di kelompok usia ini mengalami pertumbuhan dari 53,48 persen pada tahun 2004 menjadi 54,70 persen pada tahun 2008, kemudian pada tahun 2009 meningkat lagi menjadi 55,05 persen. Berbeda dengan dua kelompok umur lainnya, APS laki-laki pada kelompok umur 16-18 tahun ini sedikit lebih tinggi dibandingkan APS perempuan.

4.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni merupakan salah satu indikator pendidikan yang menunjukkan keadaan proses pendidikan atau bagaimana program pendidikan yang diimplementasikan terjadi di masyarakat. Angka ini membatasi usia murid sesuai dengan jenjang pendidikan, sehingga dapat menggambarkan proporsi anak yang bersekolah tepat waktu sesuai dengan umurnya dan juga dapat melihat anak usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan disuatu daerah. Angka indikator ini tidak boleh melebihi 100 persen (dibawah 100 persen atau mendekati 100 persen), semakin tinggi APM suatu daerah berarti semakin baik karena banyak anak usia sekolah

Perkembangan Pendidikan di Indonesia

yang bersekolah di jenjang pendidikan disuatu daerah. Indikator ini rutin setiap tahun selalu dihitung oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan data yang diperlukan untuk penghitungan indikator ini adalah data jumlah murid dan penduduk menurut kelompok umur yang berkaitan dengan seluruh tingkatan pendidikan. Data murid biasanya berasal dari data administratif sekolah yang dilaporkan/dikirim ke Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota, lalu dari dinas laporan tersebut dikirim ke Kementerian Pendidikan Nasional. Kemudian dikomfile, sedangkan data penduduk pada kelompok usia tertentu bisa diperoleh dari hasil sensus penduduk yang dilakukan BPS.

Rumus :

$$\text{APM} = \frac{X^*)}{Y} \times 100 \%$$

Keterangan :

X : Jumlah siswa kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu

Y : Jumlah penduduk kelompok usia

- *) Tingkat SD : kelompok usia 7 - 12 tahun*
Tingkat SLTP : kelompok usia 13 - 15 tahun
Tingkat SM : kelompok usia 16 - 18 tahun

Pencanangan program pemerintah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini diharapkan semua anak dapat menyelesaikan pendidikannya di tingkat SD dan SMP. Program ini menunjukkan keberhasilan, jika dilihat dari APM selama periode 2005-2009 menunjukkan peningkatan untuk semua jenjang pendidikan. Bahkan APM untuk jenjang pendidikan SD dan sederajat pada tahun 2005 baru mencapai 93,25 persen dan di tahun 2009 sudah mencapai 94,37 persen, sedangkan pada jenjang pendidikan SMP dan sederajat pada tahun 2005 tercatat 65,37 persen dan pada tahun 2009 menjadi 67,40 persen. Untuk tingkat SD sudah di atas 93 persen namun di tingkat SMP masih jauh dari target 100 persen.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pencapaian rasio APM perempuan terhadap laki-laki di jenjang pendidikan SD menunjukkan angka dibawah 100 persen setiap tahunnya berarti lebih banyak murid laki-laki dibandingkan perempuan yang bersekolah di tingkat SD. Sebaliknya yang terjadi di tingkat SMP, dimana rasio APM perempuan terhadap laki-laki menunjukkan angka diatas 100 persen setiap tahunnya berarti APM perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki untuk jenjang pendidikan SMP, kecuali tahun 2006 lebih banyak murid laki-laki dibanding murid perempuan.

Perkembangan APM untuk jenjang pendidikan SM pada tahun 2009 mencapai 45,06 persen atau mengalami kenaikan sekitar 0,20 persen dibanding dengan tahun 2008 yang baru mencapai 44,97 persen. Untuk melihat kesetaraan gender dalam jenjang pendidikan SM, jika dibandingkan antara APM perempuan terhadap laki-laki menunjukkan angka dibawah 100 persen. Ini berarti bahwa pada jenjang pendidikan SM lebih banyak murid laki-laki yang bersekolah dibandingkan perempuan kecuali rasio APM tahun 2006.

4.4. Rata-rata Lama Sekolah

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjangkau sebanyak-banyaknya masyarakat untuk menjadi warga terdidik agar kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Namun peluang untuk meraih pendidikan bagi masyarakat harus disertai dengan jaminan pendidikan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan di lapangan. Mobilitas untuk memperluas jangkauan meraih kesempatan berpendidikan harus mengarah pada kompetensi lulusan dan penyebaran lulusan, sebab seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pada kenyataannya kualitas angkatan kerja di Indonesia mayoritas masih angkatan kerja dengan pendidikan rendah. Hal ini berkaitan dengan lama pendidikan yang ditempuh.

Dilihat perkembangannya rata-rata lama sekolah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Indonesia selama tahun 2004 sampai dengan 2009 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2004 rata-rata lama sekolah mencapai 7,2 tahun dan terus meningkat hingga 7,7 tahun pada tahun 2009. Akan tetapi secara umum selama kurun waktu tersebut, rata-rata lama sekolah penduduk masih relatif rendah dan dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, yaitu baru mencapai sekitar kelas 8 atau kelas dua Sekolah Menengah Pertama (SMP). Atau dengan kata lain rata-rata penduduk di Indonesia baru mampu menempuh pendidikan hanya sampai kelas 7 atau kelas satu SMP dan putus sekolah di kelas 8 atau kelas dua SMP.

4.5. Penduduk 10 Tahun Ke atas menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tertinggi yang dimiliki penduduk merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh rata-rata penduduk suatu negara maka mencerminkan semakin tinggi taraf intelektualitas bangsa dari negara tersebut.

Tingkat pendidikan penduduk Indonesia yang dilihat melalui ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki sebagian besar masih rendah. Pada tahun 2009, persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum memiliki ijazah/STTB sebanyak 26,82 persen. Sementara penduduk yang sudah memiliki ijazah terdiri dari Tamat SD/MI sebanyak 30,51 persen, tamat SLTP/MTs sebanyak 17,64 persen, tamat SMU/SMK/MA sebanyak 19,40 persen, dan tamat Diploma I sampai dengan Universitas sebesar 5,61 persen. Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas pendidikan mayoritas penduduk Indonesia mengakibatkan mereka kalah bersaing di bursa tenaga kerja internasional. Mayoritas tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara lain hanya berprofesi sebagai

pembantu rumah tangga. Hal ini tentunya dapat mengurangi citra dan martabat bangsa Indonesia di negara-negara tujuan tempat penduduk Indonesia bekerja.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya maka proporsi tingkat pendidikan penduduk Indonesia usia 10 tahun ke atas menunjukkan perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kumulatif proporsi tingkat pendidikan penduduk dari yang tidak/belum pernah sekolah sampai dengan tamat SMP/MTs selama kurun tahun 2004-2009 yang relatif menurun.

4.6. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu sering pula digunakan sebagai ukuran dari tingkat pendidikan. Dari indikator dapat menunjukkan tingkat kegagalan sistem pendidikan menurut jenjangnya.

Putus sekolah pada anak usia sekolah dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait, bisa berasal dari diri anak itu sendiri maupun yang berasal dari luar (eksternal). Salah satu faktor eksternal adalah keterbatasan dan kemampuan sebagian masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka mengakibatkan terjadinya putus sekolah, selain itu karena keterbatasan akses. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk maka makin banyak anak usia sekolah yang terus bersekolah. Semoga dengan adanya program pemerintah di bidang pendidikan kejar 9 tahun dapat mengurangi anak-anak usia sekolah yang putus sekolah.

Dari tabel dibawah terlihat bahwa pada tahun 2004/05-2005/06 dan 2005/06-2006/07 angka putus sekolah seluruh jenjang pendidikan di Indonesia masih diatas 1 juta anak dan dua tahun kemudian sudah turun hingga dibawah 900 ribu anak saja yang putus sekolah. Dari jumlah itu sebagian besar adalah anak yang masih duduk di jenjang pendidikan SD.

Jika dilihat secara persentase, siswa yang putus sekolah di tingkat SD memang hanya berkisar 3 persen lebih dari total jumlah siswa SD pada tahun 2004/05-2005/06 dan terus turun hingga tersisa sekitar 1,64 persen dari total jumlah siswa SD pada tahun 2007/08-2008/09. Namun persentase yang kecil tersebut menjadi besar jika dilihat angka sebenarnya. Jumlah anak sekolah SD yang tidak mampu menyelesaikan sekolahnya sampai tamat dan putus ditengah jalan, pada tahun ajaran 2004/05-2005/06 tercatat sebanyak 824 684 anak. Sampai tahun ajaran 2007/08-2008/09 anak putus sekolah SD hanya tersisa 437 608 anak yang tidak dapat bersekolah lagi.

Sementara itu angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP pada tahun 2004/05-2005/06 tercatat sebanyak 148 890 anak atau sekitar 1,97 persen dari total jumlah siswa SMP. Namun di dua tahun ajaran berikutnya angka putus sekolah di tingkat SMP terus mengalami kenaikan masing-masing menjadi 232 828 anak dan 332 824 anak atau naik 56,38 persen dan 42,95 persen. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk segera menuntaskan wajar pendidikan dasar yang didukung dengan program Dana BOS yang diperuntukkan bagi semua siswa SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB baik negeri maupun swasta. Dengan adanya program ini semoga dapat mengurangi angka putus sekolah khususnya di jenjang pendidikan SMP. Hingga tahun ajaran 2007/08-2008/09 angka

putus sekolah SMP di seluruh Indonesia mencapai 214 775 anak atau sekitar 2,49 persen dari seluruh jumlah siswa SMP.

Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SM selama tahun ajaran 2006/07-2007/08 tercatat sebanyak 160 618 anak atau sekitar 2,68 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yang mencapai 3,33 persen atau sekitar 208 522 anak. Pada jenjang pendidikan SM putus sekolah banyak terjadi pada anak SMA dibandingkan anak SMK. Sedangkan pada tahun ajaran 2007/08-2008/09 semakin banyak anak yang putus sekolah di jenjang pendidikan SM yaitu mencapai 235 744 anak atau sekitar 3,63 persen, dimana di SMA tercatat sebanyak 141 712 anak dan di SMK sebanyak 94 032 anak.

4.7. Rasio Murid-Guru

Rasio murid-guru yaitu menghitung perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan bersangkutan. Dari angka rasio ini Dapat memberikan gambaran seberapa besar beban kerja guru dalam mengajar terhadap jumlah murid. Karena semakin banyak peserta didik yang diajarkan oleh seorang guru akan berdampak pada rendahnya efektivitas proses belajar mengajar berarti semakin berkurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar selama tahun ajaran 2004/05 – 2006/07 rasio murid terhadap guru tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 19 murid per guru. Idealnya seorang guru dapat mengajar antara 8-18 orang murid dan pada tahun 2007/08 untuk jenjang pendidikan SD secara nasional sudah mencapai angka yang ideal untuk seorang guru yaitu memiliki beban mengajar 18 murid dan terus menurun pada tahun 2008/09 menjadi 17 murid per guru.

Rasio murid terhadap guru untuk tingkat pendidikan SLTP sebanyak 14 murid per guru pada tahun 2004/05 dan

turun pada tahun 2005/06 menjadi 13 murid per guru. Beban guru di jenjang pendidikan SMP pada tahun 2006/07 kembali naik menjadi 14 murid dan rasio murid-guru ini terus sama yaitu 14 murid hingga tahun 2008/09. Untuk mengetahui efektivitas proses belajar mengajar di jenjang pendidikan SM dilihat dari seberapa besar beban mengajar seorang guru terhadap jumlah menunjukkan bahwa satu orang guru memiliki beban mengajar sebanyak 12 murid pada tahun 2004/05. Beban seorang guru pada jenjang pendidikan SM tidak pernah berubah setiap tahun bebannya tetap yaitu mengajar 12 murid hingga tahun 2008/09. Hal menarik yang dapat disimpulkan dari informasi tersebut bahwa kondisi pendidikan khususnya dalam pemenuhan tenaga pengajar untuk tiap jenjang pendidikan secara umum sudah cukup baik.

4.8. Lainnya

Peningkatan akses pendidikan harus dibarengi dengan upaya peningkatan mutu pendidikan yang berimbang, agar meningkatkan kemampuan anak didik dan mampu bersaing dikancah internasional. Karena itu peran guru dan dosen sebagai pengajar dan pembimbing bukanlah hal yang mudah.

Pekerjaan yang dilakukan oleh pendidik adalah pekerjaan yang sangat mulia dan terhormat, salah satu pendidik yang menjalankan tugas pendidikan adalah dosen. Dosen merupakan tenaga pendidik dalam jenjang pendidikan

Perkembangan Pendidikan di Indonesia

tinggi. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dosen mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Peran dosen sangatlah penting karena dosen harus mampu membina dan mengembangkan potensi mahasiswa serta harus banyak berinovasi sehingga dapat menciptakan SDM yang berkualitas. Setiap dosen sudah seharusnya memiliki kemampuan dasar agar dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan fungsional dengan baik. Kemampuan dasar yang dimaksud, menurut **Soehendro (1996)** adalah: kemampuan subyek, yakni kemampuan sebagai seorang ahli atau spesialis dalam disiplin ilmu yang ditekuni. Kemampuan pedagogik, yakni kemampuan untuk proses pembelajaran mata kuliah yang menjadi tanggungjawabnya.

Untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan berkualitas, diperlukan staf akademik yang profesional.

Banyak cara untuk menjadi dosen yang profesional. Antara lain dosen harus terus menimba ilmu salah satunya dengan melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi (S2 dan S3), harus memiliki minat baca yang tinggi guna memperoleh informasi yang mukhtahir, membuat makalah dan mengikuti forum diskusi, dosen harus memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian.

Jika dilihat tingkat pendidikan dosen di perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia sudah baik, walaupun sebagian besar pendidikan tertinggi dosen di perguruan tinggi baik negeri adalah S1 diikuti S2. Harapannya adalah makin banyak dosen yang profesional dan diimbangi dengan tingkat pendidikan yaitu melakukan pendidikan lanjutan hingga ke jenjang S3.

Jika dilihat pada tabel 4.8. tenaga edukatif dengan pendidikan tertinggi D4 dan S1 terus mengalami penurunan setiap tahunnya sedangkan tenaga edukatif yang pendidikan tertingginya S2 dan S3 menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Jumlah tenaga edukatif/dosen dengan pendidikan tertinggi S3 pada tahun 2004/05 tercatat sebanyak 6 794 orang atau rasio terhadap seluruh tenaga edukatif mencapai 4,04 persen. Dosen dengan pendidikan tertinggi S3 setiap terus mengalami kenaikan hingga tahun 2007/08 tercatat sebanyak 13 181 orang dosen dengan pendidikan tertinggi S3 atau sekitar 5,48 persen. Namun pada tahun 2008/09 tenaga edukatif dibedakan menjadi tenaga tetap dan tidak tetap, dimana dari 228 781 orang tenaga edukatif 156 969 orang adalah tenaga tetap sedangkan sisanya sebanyak 71 812 orang tidak tetap. Untuk tenaga edukatif tetap dengan pendidikan tertinggi S3 tercatat sebanyak 12 608 orang, sedangkan tenaga edukatif tidak tetap tidak dibedakan menurut pendidikan tertinggi sehingga untuk yang pendidikan tertinggi sampai S3 tidak diketahui.

Masalah pengangguran di Indonesia merupakan masalah serius yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan secara tuntas. Pengangguran terjadi karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil atau terbatas

dibanding jumlah pencari kerja. Keterbatasan lapangan pekerjaan berpotensi pada tidak tertampungnya lulusan-lulusan baru dengan pendidikan yang lebih tinggi dilapangan kerja. Sehingga banyak lulusan pendidikan tinggi (D III/akademi keatas) yang bekerja pada posisi yang sebetulnya bisa diisi oleh penduduk yang lulusannya lebih rendah, sehingga banyak angkatan kerja yang bekerja pada posisi yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Pengangguran sering menyebabkan timbulnya masalah sosial lainnya

Pengangguran adalah orang-orang yang sebenarnya mampu dan ingin bekerja, tetapi tidak tertampung atau mendapatkan lapangan pekerjaan sama sekali. Pada tabel di bawah ini adalah tingkat pengangguran terbuka yang merupakan salah satu tolok ukur ketenagakerjaan yang banyak digunakan untuk melihat sampai sejauh mana penawaran tenaga kerja serta bagaimana permintaan akan kesempatan kerja. TPT cenderung tinggi untuk mereka yang mempunyai pendidikan tinggi dan cenderung rendah untuk mereka yang tidak berpendidikan. Penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih sulit mendapatkan pekerjaan karena lapangan usaha untuk pendidikan yang lebih tinggi justru lebih terbatas, karena jenis pekerjaannya lebih spesifik dan lebih membutuhkan keahlian tertentu, sehingga jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan tidak terlalu banyak.

Jika dilihat tingkat pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan pada jenjang pendidikan SMP selama periode 2005-2009 terus mengalami penurunan dari 14,1 persen pada tahun 2005 turun hingga tersisa sekitar 8,4 persen saja di tahun 2009. Hal yang sama terjadi pada jenjang pendidikan SMA, dimana pada tahun 2005 tingkat pengangguran pada jenjang ini mencapai 20,4 persen dan turun setiap tahunnya hingga tahun 2008 tercatat hanya sekitar 14,3 persen dan sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2009 menjadi 14,5 persen. Sekolah menengah kejuruan (seperti SMEA, STM) pada dasarnya adalah diarahkan untuk menyiapkan tenaga kerja siap pakai untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja, namun dari tabel di bawah terlihat bahwa lulusan sekolah kejuruan pada tahun 2005-2006 lebih

Perkembangan Pendidikan di Indonesia

ke dua jenjang pendidikan tersebut mengalami peningkatan masing-masing menjadi 13,3 persen dan 13,6 persen. TPT penduduk yang berpendidikan D I/II/III/Akademi dan yang berpendidikan Universitas pada tahun 2009 masing-masing mencapai 13,7 persen dan 13,1 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2008 yang masing-masing hanya mencapai 11,2 persen dan 12,6 persen.

<https://www.bps.go.id>

STUDI KUALITATIF TENTANG PENDIDIKAN DI INDONESIA

- Pendahuluan* •
- Indikator Pendidikan yang Tersedia di Daerah* •
- Konsep dan Definisi* •
- Metodologi* •

5

5.1. Pendahuluan

Dalam kajian mengenai profil Indikator Pendidikan Indonesia yang dilakukan pada tahun 2009 dilengkapi dengan studi mendalam yang dilakukan di 5 (lima) wilayah. Studi mendalam dilakukan untuk mengumpulkan data dasar dan indikator-indikator pendidikan yang sudah dihitung serta menggali informasi mengenai beberapa konsep dalam penghitungan indikator pendidikan dan mencari indikator baru yang dapat dijadikan sebagai indikator kunci pembangunan dalam bidang pendidikan dari beberapa informan di Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan nara sumber lainnya.

BPS sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertugas melakukan pengumpulan data, juga menghitung beberapa indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (MYS), Angka Putus sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut juga dihitung oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan jajaran dibawahnya sampai tingkat Kabupaten/Kota. Ada kemungkinan konsep yang dipakai BPS berbeda dengan yang dipakai oleh Kemendiknas. Oleh karena itu, melalui studi mendalam ini diharapkan dapat diperoleh masukan dari para pakar pendidikan yang berkompeten dibidangnya terkait dengan konsep yang digunakan oleh BPS.

Penentuan kelima wilayah dilakukan secara purposive, tanpa merujuk kepada suatu metode sampling tertentu, hanya mempertimbangkan dari beberapa indikator yang dihitung oleh BPS juga dijadikan kriteria penentuan wilayah penelitian. *Interview* atau wawancara dilakukan di beberapa bidang di dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan Kabupaten/Kota kepada responden yang dianggap berkompeten dibidangnya, karena hasil wawancara ini sangat penting.

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengumpulkan indikator-indikator pendidikan yang tersedia di tingkat provinsi, untuk mengetahui alur/mekanisme pengumpulan data dari

sekolah hingga ke Kementerian Pendidikan Nasional, mencari indikator baru yang dapat dijadikan sebagai indikator kunci pembangunan dalam bidang pendidikan dan dapat mengetahui kendala yang dihadapi untuk membangun suatu indikator serta untuk mendapatkan masukan mengenai konsep-konsep indikator pendidikan yang dihitung oleh BPS sebagai masukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

5.2. Indikator yang Tersedia Di Daerah

Ketersediaan data dan indikator pendidikan di 5 (lima) wilayah/provinsi cukup lengkap untuk setiap tahun ajaran. Ketersediaan data pendidikan di dinas Pendidikan daerah berdasarkan instruksi Kementrian Pendidikan Nasional bahwa setiap Dinas Pendidikan di Daerah harus mengumpulkan data-data dasar pendidikan dan beberapa indikator pendidikan yang harus dihitung setiap tahun untuk masing-masing wilayahnya yang harus dilaporkan setiap tahun sampai tingkat pusat dalam bentuk publikasi "Profil Pendidikan". Dimana data dasar dan indikator sudah ditentukan dari pusat sehingga dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota data dasar, indikator yang dikumpulkan memiliki format yang baku, sama atau seragam.

Beberapa data dasar yang telah dikumpulkan di tiap-tiap Provinsi di meliputi :

1. Tingkat Taman Kanak-Kanak (TK)
Jumlah Taman Kanak-Kanak, Siswa, Lulusan, Guru, Kelas (Rombongan Belajar), dan Ruang Kelas
2. Data yang Berkaitan dengan Sekolah, dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) :
 - Jumlah Sekolah, Siswa Baru Tingkat I, Siswa, Kelas (Rombongan Belajar), dan Rata-Rata UAS (untuk

Studi Kualitatif Tentang Indikator Pendidikan

- SD dan MI) , Rata-Rata UAN (untuk SMP, MTs, SMA, dan SMK), atau NEM (untuk MA)
 - Jumlah Lulusan, Siswa, Mengulang, Putus Sekolah, Siswa Tingkat VI (khusus SD dan MI), dan Siswa Tingkat III (untuk MA)
 - Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi
 - Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi dan Fasilitas Sekolah
 - Jumlah Dana di Sekolah Dasar Menurut Sumber
 - Jumlah Guru Sekolah Menurut Latar Belakang Program Studi (hanya SMP dan SMA)
 - Jumlah Guru Menurut Bidang Studi yang Diajarkan (hanya SMP dan SMA)
 - Jumlah Siswa Menurut Jurusan dan Sistem Penjurusan (hanya SMA)
 - Pelaksanaan Program Sistem Ganda, Jumlah Siswa dan Lulusan Menurut Kelompok Program Studi (hanya SMK)
3. Program Paket :
- Program Paket A, Paket B, dan Paket C
4. Verifikasi Data :
- Persentase Penduduk Kelompok Usia Sekolah Terhadap Total Seluruh Penduduk
 - Persentase Siswa Baru Tingkat I, Siswa Kelompok Usia 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, dan Kenaikan Siswa
 - Persentase Siswa Baru Tingkat I, Siswa Kelompok Usia 16-18 Tahun, dan Kenaikan Siswa
 - Rasio Siswa Per sekolah Menurut Jenis Pendidikan
 - Rasio Siswa Per Guru Menurut Jenis Pendidikan
 - Rasio Siswa Per Kelas Menurut Jenis Pendidikan
 - Rasio Kelas Per Ruang Kelas Menurut Jenis Pendidikan
5. Efisiensi Internal meliputi data yang dibutuhkan

Studi Kualitatif Tentang Indikator Pendidikan

- Siswa mengulang, putus sekolah, naik tingkat dan lulusan menurut jenis kelamin, SD, MI dan SD + MI
 - Siswa mengulang, putus sekolah, naik tingkat dan lulusan menurut jenis kelamin, SMP, MTs dan SMP + MTs
 - Siswa mengulang, putus sekolah, naik tingkat dan lulusan menurut jenis kelamin, SMA, MA, SMA + MA, SMK dan SM + MA
6. Kohort Siswa
- Kohort per 1000 siswa (laki-laki + perempuan) SD, MI dan SD + MI
 - Kohort per 1000 siswa (laki-laki + perempuan) SMP, MTs dan SMP + MTs
 - Kohort per 1000 siswa (laki-laki + perempuan) SMA, MA, SMA + MA, SMK dan SM + MA

Indikator pendidikan yang dihitung oleh Dinas Pendidikan Provinsi adalah sebagai berikut yang meliputi empat kelompok yaitu Indikator Pemerataan, Indikator Mutu, Indikator Relevansi dan Indikator Efisiensi Internal, dimana masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Pendidikan

- Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan
- Angka Partisipasi Kasar menurut Jender, Desa/Kota dan Tingkat Pendidikan
- Perbandingan Sekolah Antar Jenjang Pendidikan dan Rasio Pendidikan Tingkat SD dan SMP
- Rasio Pendidikan SMA+MA dan SMK
- Angka Melanjutkan (AM) ke Tingkat SMP dan SM
- Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) Tingkat SD, SMP, dan SM
- Hubungan Antara Angka Partisipasi dengan Keadaan Sekolah

Studi Kualitatif Tentang Indikator Pendidikan

- Hubungan Antara Angka Partisipasi dengan Keadaan Daerah
 - Hubungan Antara Angka Melanjutkan (AM) dengan Keadaan Sekolah dan Daerah
2. Indikator Peningkatan Mutu
- Persentase Asal Siswa SD dan MI Serta Rata-Rata UAS/UAN Menurut Jenis Pendidikan
 - Angka Mengulang, Putus Sekolah dan Lulusan (Tingkat SD, SMP, SMA, dan MA)
 - Persentase Guru (Tingkat SD, SMP, SMA, MA, dan SMK) Menurut Kelayakan Mengajar
 - Kesesuaian Mengajar Guru (SMP dan SMA) dengan Jurusan Ijazah
 - Persentase Guru (SMP dan SMA) Menurut Bidang Studi yang Diajarkan
 - Persentase Ruang Kelas Milik SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK Menurut Kondisi
 - Persentase Ketersediaan Fasilitas Milik SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK
 - Kekurangan/Kelebihan Fasilitas Milik SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK
 - Kontribusi Biaya Pendidikan Pemerintah Pusat, Pemda, dan Orang Tua Siswa (SD dan MI, SD+MI, serta SMP dan MTs)
 - Kontribusi Biaya Pendidikan Pemerintah Pusat, Yayasan, Pemda, dan Orang Tua Siswa (SMP+MTs, SMA dan MA, SMA+MA, SMK, SM+MA) serta Satuan Biaya
3. Indikator Relevansi Pendidikan
- Persentase Siswa SMA Menurut Jurusan dan Kinerja Penjurusan

- Persentase SD yang Melaksanakan Sistem Ganda dan Siswa SMK Menurut Kelompok/Rumpun
4. Indikator Efisiensi Internal Pendidikan
- Indikator Efisiensi Internal Sekolah
 - Siswa Bertahan dan Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
 - Hubungan Tahun Siswa Terbuang dengan Biaya Pendidikan

5.3. Konsep dan Definisi Beberapa Indikator Pendidikan

5.3.1. Angka Melek Huruf (AMH)

BPS mendefinisikan Melek Huruf yaitu bisa membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulis. Sementara Konsep internasional, melek huruf (*Adult Literacy Rate*) adalah bisa membaca, menulis dan mengerti apa yang dibaca minimal kalimat sederhana yang ada dalam kehidupan sehari-hari, serta mencakup bisa melakukan penghitungan sederhana.

Berdasarkan hasil diskusi ke Dinas Pendidikan di 5 provinsi tentang definisi melek huruf diperoleh keterangan dan informasi yang sama yaitu Konsep melek huruf dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, dan Sulawesi Utara bahwa dikatakan melek huruf bila dapat membaca, menulis dan berhitung dan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia.

Namun dari definisi ini ada narasumber dari Dinas Provinsi Jawa Tengah yang mengatakan bahwa huruf "lainnya" dalam konsep melek huruf bisa meliputi huruf daerah atau huruf etnis bangsa lain seperti Arab, China, dan lainnya. Akan tetapi yang diutamakan pada bahasa daerah setempat. Sebagai contoh, di Jawa Tengah lebih diutamakan yang bisa membaca dan menulis huruf Jawa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Nara sumber dari Uninersitas Negeri

Medan (Uimed) Provinsi Sumatera Utara dan nara sumber dari Dirjen PNFI DI Yogyakarta.

Bahkan dari nara sumber Dirjen PNFI DI Yogyakarta diperoleh keterangan lebih luas lagi untuk mengetahui seseorang memiliki kompetensi keaksaraan, dapat dilihat dari indikator keaksaraan yang terbagi dalam tiga tingkatan kompetensi keaksaraan, yaitu:

1. Tingkat dasar, dalam membaca, menulis dan berhitung serta berkomunikasi
2. Tingkat lanjut, dalam membaca, menulis dan berhitung serta berkomunikasi
3. Tingkat mandiri, dalam membaca, menulis dan berhitung serta berkomunikasi

Nara sumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara kemampuan seseorang dalam mengerti aksara atau huruf latin yaitu huruf yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia. Jika seseorang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin tetapi memiliki kemampuan membaca dan menulis dalam bentuk huruf lain seperti arab atau daerah maka orang tersebut dikatakan memiliki kemampuan atau keahlian lain dan orang tersebut termasuk dalam buta huruf/aksara.

5.3.2. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah di BPS disingkat APTS, menurut konsep BPS, adalah persentase siswa/murid dengan jenjang pendidikan tertentu yang tidak lagi mengikuti pendidikan pada jenjang tersebut. Setiap tahun BPS selalu menghitung indikator angka putus sekolah.

Demikian halnya dengan Kementerian Pendidikan Nasional juga menghitung indikator angka putus sekolah. Sementara berdasarkan hasil wawancara dengan para nara sumber yang berkompeten di bidang pendidikan di daerah diperoleh keterangan yang sama untuk konsep angka putus sekolah, yaitu bahwa untuk angka putus sekolah konsep Kemendiknas sama dengan konsep BPS konsep tersebut adalah persentase siswa/murid dengan jenjang pendidikan

tertentu yang tidak lagi mengikuti pendidikan pada jenjang tersebut.

Menurut para nara sumber perbedaan adalah dari sumber data dan unit analisis yang digunakan dalam penghitungan. Jika BPS menghitungnya berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional dengan pendekatan rumah tangga dan unit observasinya adalah anggota rumah tangga yang bersangkutan. Sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan di daerah menghitung Angka Putus Sekolah melalui hasil registrasi dengan pendekatan sekolah dan unit observasinya adalah siswa yang bersekolah di sekolah yang bersangkutan. Sehingga otomatis angka putus sekolah yang dihitung oleh BPS berbeda dengan yang dihitung oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

5.3.3 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah dalam konsep internasional menggunakan istilah *School Life Expectancy (SLE)*, yang artinya adalah lama jumlah tahun sekolah seorang anak pada umur tertentu. Atau dapat diartikan lamanya seorang anak akan menempuh suatu pendidikan dihitung dari mulai anak tersebut berpartisipasi sekolah. Namun konsep ini tidak bisa dihitung secara langsung di Indonesia mengingat adanya kesulitan dalam menganalisis kohort tersebut dari waktu ke waktu. Sehingga penghitungannya dilakukan dengan cara yang disebutkan di atas.

Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh sebab itu, indikator ini

digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari aspek pendidikan. Di BPS, rata-rata lama sekolah dihitung dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) terhadap individu yang berumur 15 tahun ke atas.

Sementara untuk indikator rata-rata lama sekolah Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan tingkat daerah tidak pernah menghitung. Jadi untuk indikator rata-rata lama sekolah Kemendiknas atau Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota memakai data yang sudah dihitung oleh BPS.

Namun ada salah satu nara sumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang mengusulkan seandainya rata-rata lama sekolah dihitung dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), karena APK PAUD juga dihitung. Tujuannya untuk melihat layanan anak di usia dini. Beliau menganggap usia 0-6 tahun adalah waktu yang cukup bagus dalam perkembangan pendidikan anak (konsep *golden age*). Pendidikan non formal juga perlu dimasukkan dalam penghitungan rata-rata lama sekolah, namun hanya sebatas kesetaraan Paket A dan Paket B. Beliau tidak menyarankan pendidikan informal dihitung dalam rata-rata lama sekolah. Masih usulan nara sumber dari UNES juga menyarankan untuk menambahkan pendidikan non formal dalam penghitungan, seperti kursus atau pelatihan yang menunjang pendidikan formal seseorang.

Untuk batasan umur 15 tahun keatas yang dipakai oleh BPS, semua nara sumber di Dinas Pendidikan daerah memberikan komentar yang sama yaitu bahwa umur 15 tahun menunjukkan usia dewasa sehingga sudah tepat jika digunakan sebagai batasan umur, sangat ideal dan wajar.

Namun beberapa nara sumber di Dinas Pendidikan dari Provinsi Riau, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa Kemendiknas mempunyai atau menghitung indicator yang hamper sama dengan rata-rata lama sekolah yaitu indicator Rata-rata Lama Belajar (RBL). Rata-rata lama belajar diperoleh dengan menggunakan kohort dari 1000 siswa. Seribu siswa ini diikuti

Studi Kualitatif Tentang Indikator Pendidikan

perkembangannya dari tingkat I sampai lulus dan mereka diasumsikan boleh mengulang maksimum 2 kali. Namun Dinas Pendidikan Jawa Tengah belum menghitung indikator ini.

Contoh Rata-Rata Lama Belajar lulusan SD (RLBLsd) =

$$\frac{\text{Jumlah (lulusan I x 6) + (lulusan II x 7) (lulusan II x 8)}}{\text{Jumlah (lulusan I) + (lulusan II) + (lulusan III)}}$$

$$\text{Jumlah (lulusan I) + (lulusan II) + (lulusan III)}$$

Contoh Rata-Rata Lama Belajar lulusan SMP/SM (RLBLsmp/sm) =

$$\frac{\text{Jumlah (lulusan I x 3) + (lulusan II x 4) (lulusan II x 5)}}{\text{Jumlah (lulusan I) + (lulusan II) + (lulusan III)}}$$

$$\text{Jumlah (lulusan I) + (lulusan II) + (lulusan III)}$$

5.3.4. APM dan APS

APK, APM dan APS merupakan indikator proses, Indikator ini sebenarnya lebih tepat dikategorikan sebagai statistik atau informasi dasar karena belum dipersentasekan atau dibandingkan dengan variabel pendidikan lain. Tetapi data dasar ini bisa digunakan untuk memperkirakan kebutuhan sarana pendidikan seperti gedung sekolah, bangku, dan kebutuhan lain. APM merupakan proporsi dari anak yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya dibagi dengan penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APS adalah proporsi dari semua anak pada satu kelompok umur tertentu yang masih sekolah dibagi dengan penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan APK adalah proporsi semua anak yang masih sekolah di jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut

Seperti halnya angka putus sekolah, BPS dan Kementerian Pendidikan Nasional sama-sama menghitung indikator APK, APS dan APM berdasarkan informasi dari nara

sumber Dinas Pendidikan Provinsi di 5 wilayah semua menyatakan bahwa konsep tidak ada perbedaan. Perbedaan terjadi pada sumber data untuk menghitung APK, APS dan APM, dimana BPS menggunakan data Susenas dengan pendekatannya adalah rumah tangga dengan ART yang berusia 7-18 tahun. Sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional dalam menghitung indikator tersebut berdasarkan hasil registrasi atau pelaporan dari masing-masing sekolah berdasarkan tingkat/jenjang pendidikan tertentu dan umur siswa. Jadi setiap sekolah melaporkan jumlah siswa menurut usia pada tahun ajaran tertentu. Sedangkan untuk jumlah penduduk menurut kelompok umur Diknas memakai data dari BPS.

Pengelompokan umur yang dipakai oleh BPS sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yaitu kelompok umur untuk usia Sekolah Dasar 7-12 tahun, SLTP 13-15 tahun, SM 16-18 tahun. Semua penyebut dalam menghitung indikator ini sama yaitu jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu (7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun).

5.4. Alur Pengumpulan Data Pendidikan dan Kendalanya

5.4.1. Alur Pengumpulan Data Pendidikan

Alur pengumpulan data pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan nasional dan jajaran dibawahnya berdasarkan hasil wawancara dengan para nara sumber di daerah diperoleh informasi sebagai berikut :

Alur pengumpulan data pendidikan di Provinsi Sumatera Utara yaitu Pengumpulan data pendidikan dari masing-masing sekolah di kabupate/kota dilakukan secara rutin setiap tahun menggunakan kuesioner dari PSP. Data yang dikumpulkan terdiri dari identitas sekolah, siswa, guru dan pegawai administrasi, dan sarana prasarana. Untuk data siswa dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Pengumpulan data pendidikan dilakukan oleh Kelompok Kerja

Studi Kualitatif Tentang Indikator Pendidikan

Data Pendidikan (KK Datadik) dengan instrumen pendataan dan dukungan dana dari pemerintah pusat. Kuesioner TK dan SD dikirimkan ke cabang dinas pendidikan kecamatan untuk selanjutnya dibagikan ke masing-masing sekolah. Penerimaan kuesioner TK dan SD yang sudah diisi oleh sekolah dilakukan oleh petugas di dinas pendidikan kecamatan. Sedangkan kuesioner SMP, SMA dan SMK dikirim langsung dari Dinas Pendidikan kabupaten ke masing-masing sekolah. Penerimaan kuesioner SMP, SMA dan SMK yang sudah diisi oleh sekolah dilakukan oleh petugas dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada umumnya dinas memiliki petugas yang bertanggung jawab mencatat dan mengelola instrumen. Dinas pendidikan kecamatan melakukan perangkuman data TK dan SD menggunakan format rangkuman tingkat kecamatan (RC-TK/RA/BA dan RC-SD/MI). Perekaman data umumnya masih secara manual, meski sudah ada beberapa kecamatan yang melakukan perangkuman dan perekaman data menggunakan komputer yaitu dengan program excel.

Pengumpulan data pendidikan di Provinsi Riau dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Diknas) adalah dengan cara pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Instrumen berupa *dummy table* dari pemerintah pusat didistribusikan sampai ke tingkat kabupaten. Kemudian dari kabupaten diteruskan ke sekolah-sekolah. Setelah pihak sekolah mengisi instrumen tersebut dan mengirimkan ke Diknas Kabupaten/Kota, data akan dikirim ke Diknas Provinsi yang kemudian diteruskan ke Kementrian Pendidikan Nasional. Data yang disajikan diupdate setiap tahun, tepatnya Bulan Agustus sebulan setelah tahun ajaran baru masuk (Bulan Juli).

Alur pengumpulan data pendidikan di Provinsi Jawa Tengah dimulai dari Instrumen/bahan pendataan dari pemerintah pusat didistribusikan sampai ke tingkat kabupaten dalam bentuk dummy tabel yang siap diisi. Kemudian dari kabupaten diteruskan ke sekolah-sekolah unit pendataan dengan cara mengisi instrumen yang sudah diberikan. Instrumen yang sudah diisi dikumpulkan dan diolah di masing-masing kabupaten. Sistem pengolahan data sudah menggunakan software khusus yang diprogram dari

pemerintah pusat. Data yang disajikan di Dinas Pendidikan diupdate setiap tahun, tepatnya Bulan Agustus sebulan setelah tahun ajaran baru masuk (Bulan Juli). Penghitungan data dengan menggunakan tahun berjalan (sampai bulan tertentu) akan dilakukan jika ada permintaan khusus dari pemerintah pusat atau permintaan khusus dari anggota DPR yang sedang berkunjung ke provinsi ini.

Alur pengumpulan data yang dikumpulkan oleh Dinas Pendidikan DI Yogyakarta baik pada tingkat SD/MI, SMP, SMA/SMK maupun SLB dilakukan secara rutin setiap akhir tahun. Adapun penanggungjawab pengumpulan dan pengolahan data tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA//MA/SMK adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang melakukan imputasi data secara komputerisasi dengan menggunakan program Profil04 yang merupakan aplikasi MS Excel 1997. Sedangkan untuk SLB penanggung jawab/pengolah data ditangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Instrumen yang digunakan untuk registrasi tersebut berupa kuesioner terstruktur dengan format baku yang berasal dari Kementerian Pendidikan Nasional. Kuesioner tersebut diisi dan ditandatangani oleh masing-masing kepala sekolah. Dengan demikian alur pengumpulan datanya dimulai dari sekolah kemudian dikumpulkan ke dinas kecamatan, setelah terkumpul maka di entry di dinas kabupaten/kota hingga akhirnya sampai di dinas provinsi dan nasional.

Kegiatan pengumpulan data pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara dengan cara melakukan registrasi sekolah dilakukan rutin setiap tahun dan dilakukan per jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/SMK/ sederajat, kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan. Selain registrasi sekolah setiap tahun dilakukan pula pengumpulan data identitas pendidik dan tenaga pendidikan atau pengajar/guru. Pengumpulan data tersebut dilakukan oleh Dinas Pendidikan Tingkat Kabupaten/ Kota. Pengumpulan datanya adalah dengan cara menyebarkan kuesioner ke setiap sekolah yang ada di wilayahnya baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Format kuesioner sudah baku dan ditetapkan oleh

Studi Kualitatif Tentang Indikator Pendidikan

Kementerian Pendidikan Nasional. Kuesioner yang sudah diisi tersebut dikembalikan ke Dinas Pendidikan tingkat Kecamatan. Setelah kuesioner dari tiap sekolah perjenjang pendidikan sudah lengkap masuk di Dinas Pendidikan Kecamatan. Selanjutnya Dinas Pendidikan tingkat Kecamatan mengirim kuesioner yang telah terisi ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab pengumpulan data. Kemudian dari kuesioner tersebut diolah di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Hasilnya dikirim langsung ke Pusat dan juga ke Dinas Pendidikan Provinsi. Dinas Pendidikan Provinsi akan mengkompilasi semua data yang sudah masuk dari Dinas Kabupaten/Kota untuk disajikan sesuai format yang telah ditentukan dari pusat.

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Utara juga melakukan pengumpulan data yang dikhususkan pada tenaga kependidikan dan sertifikasi guru. Kuesioner di sebar ke semua sekolah berdasarkan tingkat pendidikan untuk mendata jumlah guru/pengajar termasuk kepala sekolah di setiap kabupaten, serta mendata jumlah guru di setiap kabupaten yang sudah mengikuti sertifikasi yang lulus dan yang tidak lulus/mengulang. Seluruh kuesioner yang sudah terisi dikumpulkan di dinas pendidikan kabupaten/kota setelah lengkap langsung dikirim ke LPMP.

5.4.2. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Dinas Pendidikan

Kendala yang dihadapi oleh masing-masing Dinas Pendidikan di daerah dalam mengumpulkan data pendidikan berbeda-beda. Menurut nara sumber dari Provinsi Sumatera Utara kendala-kendala yang dihadapi dalam pengumpulan data antara lain kondisi geografis yang tidak semuanya mudah terjangkau menambah waktu dalam pengiriman kuesioner ke masing-masing sekolah. Selain itu juga karena keterlambatan pengiriman kuesioner dari PSP mengakibatkan keterlambatan pengiriman kuesioner ke sekolah-sekolah. Kendala lain juga karena jumlah kuesioner yang dikirim oleh PSP biasanya kurang dari jumlah sekolah yang ada. Selain

itu juga kurangnya sosialisasi dalam pengisian kuesioner tersebut karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dari dinas pendidikan, sehingga petugas pengisian disekolah kurang pemahaman dan kesulitan dalam pengisian kuesioner. Terlalu banyak kuesioner atau instrumen pendataan yang diterima oleh masing-masing sekolah menyebabkan kejenuhan dalam mengisi kuesioner tersebut juga menjadi kendala. Kendala lainnya adalah permasalahan yang ditemui saat pengolahan data antara lain kurangnya tenaga yang bisa mengoperasikan komputer dan yang bisa program aplikasi dan juga kurangnya jumlah komputer yang tersedia untuk mengolah data. Selain itu karena masalah kualitas data yang kurang baik menyulitkan dalam petugas melakukan pengolahan data.

Informasi dari nara sumber Provinsi Riau menyatakan bahwa salah satu kendala yang sering dijumpai pada proses pengumpulan data adalah sering terjadi keterlambatan pada tahap pengembalian instrumen yang sudah terisi, sehingga berpengaruh pada dimulainya proses pengolahan data, dan akhirnya berdampak pada keterlambatan penyajian data dari target waktu yang direncanakan. Hal ini dikarenakan kemampuan sumber daya tenaga pendata terhadap penguasaan pendataan yang sangat terbatas. Atau ketika pegawai yang sudah dilatih dan ahli dalam pengolahan data pindah atau promosi ke subdit lain, atau bahkan pindah ke instansi lain.

Kendala yang sering dijumpai di Dinas Provinsi Jawa Tengah adalah pada proses pengumpulan data yang sering terjadi keterlambatan pada tahap pengembalian instrumen yang sudah terisi, sehingga berpengaruh pada dimulainya proses pengolahan data, dan akhirnya berdampak pada keterlambatan penyajian data dari target waktu yang direncanakan. Salah satu faktor keterlambatan data adalah kemampuan sumber daya tenaga pendata terhadap penguasaan pendataan yang sangat terbatas. Disamping itu kemampuan sumber daya manusia dalam pengolahan data juga belum memadai. Personil yang memahami masalah pendataan masih sedikit dan belum banyak yang tertarik pada pendataan. Kegiatan pengolahan data masih dianggap pekerjaan sambil lalu saja. Tenaga yang dibebani tugas

pengolahan juga masih terbebani tugas rutin lainnya, sehingga kesempatan untuk mengeksplorasi lebih jauh indikator-indikator pendidikan sangat terbatas. Kendala lainnya yaitu Belum seluruh kabupaten memiliki bidang perencanaan sebagai bidang yang biasanya bertugas melakukan pengolahan dan analisis data, sehingga banyak dilempar ke bidang Tata Usaha yang tidak memiliki kapasitas kemampuan pengolahan dan analisis data. Pada saat Dinas Pendidikan membutuhkan data tertentu, kabupaten tersebut tidak dapat menyediakan.

Berdasarkan nara sumber dari Provinsi DI Yogyakarta kendala yang dihadapi dalam pengumpulan data relatif tidak ditemui, hanya saja terkadang pengkoordinasiannya memakan waktu cukup lama. Tidak semua sekolah memberikan data pada batas waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan kendala dalam hal survei khusus antara lain masalah dana, sehingga tidak dapat dilakukan secara rutin. Adapun kendala dalam penghitungan indikator adalah keterbatasan dalam pengembangannya karena selama ini indikator yang dihitung mengacu pada apa yang dibuat oleh Pusat (dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Nasional), sehingga indikator lain tidak dihitung. Jikalau dilakukan penghitungan indikator lain, itu hanya terbatas pada ada tidaknya permintaan khusus.

Informasi dari nara sumber di Provinsi Sulawesi Utara, kendala yang dihadapi dalam pengumpulan data di tingkat dinas pendidikan Kabupaten/Kota relatif tidak ditemui, karena kegiatan pengumpulan data ini sifatnya rutin setiap tahun, biasanya hanya waktu pengembalian/pengiriman kuesioner dari tingkat kecamatan terkadang terlambat/ bergeser dari waktu yang telah ditetapkan. Karena disebabkan oleh kesibukan guru dan kepala sekolah, teruma sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar sehingga telat atau lambat dalam mengisi dan mengembalikan kuesioner ke dinas pendidikan kecamatan. Pada saat ini kendala pengumpulan data terjadi di Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi, hal ini terjadi sejak diberlakukannya sistem otonomi daerah. Sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setelah mengumpulkan data

Studi Kualitatif Tentang Indikator Pendidikan

pendidikan selesai langsung melaporkan hasil/data ke Kementerian Pendidikan Nasional jarang dinas kabupaten/kota mengirim ke Dinas Provinsi. Dinas Provinsi mengalami kesulitan dalam melakukan pengumpulan data pendidikan dari masing-masing Kabupaten/Kota. Sehingga dalam menerbitkan publikasi "Profil Pendidikan selalu mengalami keterlambatan, seperti yang terjadi pada tahun 2009 ini sampai bulan November 2009 masih ada 3 kabupaten/kota yang belum memberikan laporan data pendidikan ke Dinas Pendidikan Provinsi. kendala dalam hal survei khusus antara lain masalah dana, sehingga tidak dapat dilakukan secara rutin dan biasanya juga tidak dilakukan oleh semua kabupaten/kota hanya kabupaten/kota yang terpilih sampel saja yang melakukan.

<https://www.pns.go.id>
PENUTUP

6

Sebagai penutup dari profil indikator pendidikan Indonesia, berikut beberapa butir pokok yang disarikan dari isi adalah sebagai berikut:

- ◆ Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan dari tingkat Provinsi sampai Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota setiap tahun selalu mengumpulkan/menyajikan data dasar pendidikan per jenjang pendidikan (dari tingkat SD-SM). Dimana data dasar yang dikumpulkan telah ditentukan langsung oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Sehingga format yang disajikan sudah baku dan seragam.
- ◆ Selain data dasar Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota juga menghitung beberapa indikator pendidikan, yang telah ditetapkan juga oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
- ◆ BPS sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertugas melakukan pengumpulan data, juga menghitung beberapa indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (MYS), Angka Putus sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut juga dihitung oleh Kementerian Pendidikan Nasional
- ◆ BPS mendefinisikan Melek Huruf yaitu bisa membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulis. Ada berbagai tanggapan yang beragam dari para informan dari Dinas Pendidikan Provinsi
 - Dinas Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta bahwa seseorang dikatakan melek huruf bila dapat membaca, menulis dan berhitung dan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, termasuk huruf lainnya (meliputi huruf daerah atau huruf etnis bangsa lain seperti Arab, China, dan lainnya).

Penutup

- Sedangkan Dinas Pendidikan Riau dan Sulawesi Utara menyatakan bahwa seseorang dikatakan melek huruf bila dapat membaca, menulis dan berhitung dan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, tidak termasuk huruf lainnya.
- ◆ BPS mendefinisikan angka putus sekolah, adalah persentase siswa/murid dengan jenjang pendidikan tertentu yang tidak lagi mengikuti pendidikan pada jenjang tersebut. Defini atau konsep yang dipakai oleh BPS sama dengan yang dipakai oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Semua nara sumber menyatakan perbedaannya adalah dari sumber data dan unit analisis yang digunakan dalam penghitungan.
- ◆ BPS setiap tahun menghitung APS dan APM, konsep yang dipakai oleh BPS sama dengan yang dipakai oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Termasuk dalam pengelompokan umur yang dipakai oleh BPS sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yaitu kelompok umur untuk usia Sekolah Dasar 7-12 tahun, SLTP 13-15 tahun, SM 16-18 tahun. Perbedaan terjadi pada sumber data untuk menghitung APK, APS dan APM, dimana BPS menggunakan data Susenas dengan pendekatannya adalah rumah tangga dengan ART yang berusia 7-18 tahun. Sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional dalam menghitung indikator tersebut berdasarkan hasil registrasi atau pelaporan dari masing-masing sekolah berdasarkan tingkat/jenjang pendidikan tertentu dan umur siswa.
- ◆ BPS mendefinisikan Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Untuk indikator ini kementerian Pendidikan Nasional tidak pernah menghitung, dipakai adalah data/hasil hitungan BPS. Namun nara sumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mengusulkan seandainya rata-rata lama sekolah dihitung dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

dan Pendidikan non formal juga perlu dimasukkan dalam penghitungan rata-rata lama sekolah, namun hanya sebatas kesetaraan Paket A dan Paket B. Dan nara sumber dari UNES juga menyarankan untuk menambahkan pendidikan non formal dalam penghitungan rata-rata lama sekolah, seperti kursus atau pelatihan yang menunjang pendidikan formal seseorang.

- ◆ Perkembangan angka melek huruf di Indonesia cukup menggembirakan. Menurut data Susenas, Selama tahun 2004-2009 jumlah penduduk di Indonesia yang melek huruf sudah lebih dari 90 persen.
- ◆ Dalam perkembangannya, selama tahun 2004-2009 APS penduduk usia 7-12 tahun mengalami peningkatan, dari sekitar 96,77 persen pada tahun 2004, kemudian secara berturut-turut meningkat setiap tahun hingga menjadi 97,95 persen pada tahun 2009. APS penduduk usia 13-15 tahun lebih rendah dibandingkan APS penduduk usia 7-12 tahun. Pada tahun 2004 APS penduduk usia 13-15 tahun 83,49 persen, hingga tahun 2009 mencapai sekitar 85 persen. Semakin tinggi kelompok umur penduduk, maka semakin rendah partisipasi sekolahnya. Demikian juga dengan APS kelompok usia 16-18 tahun, paling rendah dibandingkan kelompok usia lainnya yaitu hampir setengah dari APS penduduk usia 7-12 tahun. Pada tahun 2004 tercatat 53,48 persen naik menjadi 55,05 persen pada tahun 2009. Berbeda dengan dua kelompok umur lainnya, APS laki-laki pada kelompok umur 16-18 tahun ini sedikit lebih tinggi dibandingkan APS perempuan.
- ◆ APM selama periode 2005-2009 menunjukkan peningkatan untuk semua jenjang pendidikan. Bahkan APM untuk jenjang pendidikan SD dan sederajat pada tahun 2005 baru mencapai 93,25 persen dan di tahun 2009 sudah mencapai 94,37 persen, sedangkan pada jenjang pendidikan SMP dan sederajat pada tahun 2005 tercatat 65,37 persen dan pada tahun 2009

menjadi 67,40 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pencapaian rasio APM perempuan terhadap laki-laki di jenjang pendidikan SD lebih banyak murid laki-laki dibandingkan perempuan yang bersekolah di tingkat SD. Sebaliknya yang terjadi di tingkat SMP, dimana perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, kecuali tahun 2006 lebih banyak murid laki-laki dibanding murid perempuan.

- ◆ Perkembangan APM untuk jenjang pendidikan SM pada tahun 2009 mencapai 45,06 persen atau mengalami kenaikan sekitar 0,20 persen dibanding dengan tahun 2008 yang baru mencapai 44,97 persen. Jika dibandingkan antara APM perempuan terhadap laki-laki menunjukkan lebih banyak murid laki-laki yang bersekolah di SM dibandingkan perempuan kecuali APM tahun 2006.
- ◆ Rata-rata lama sekolah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Indonesia selama tahun 2004 sampai dengan 2009 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2004 rata-rata lama sekolah mencapai 7,2 tahun dan terus meningkat hingga 7,7 tahun pada tahun 2009. Namun secara umum rata-rata lama sekolah penduduk masih relatif rendah dan dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, yaitu baru mencapai sekitar kelas 8 atau kelas dua Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- ◆ pada tahun 2004/05-2005/06 dan 2005/06-2006/07 angka putus sekolah seluruh jenjang pendidikan di Indonesia masih diatas 1 juta anak dan dua tahun kemudian sudah turun hingga dibawah 900 ribu anak saja yang putus sekolah. Dari jumlah itu sebagian besar adalah anak yang masih duduk di jenjang pendidikan SD.
 - Jumlah anak sekolah SD yang tidak mampu menyelesaikan sekolahnya sampai tamat dan putus ditengah jalan, pada tahun ajaran 2004/05-2005/06 tercatat sebanyak 824 684 anak. Sampai tahun

ajaran 2007/08-2008/09 anak putus sekolah SD hanya tersisa 437 608 anak yang tidak dapat bersekolah lagi.

- Sementara itu angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP pada tahun 2004/05-2005/06 tercatat sebanyak 148 890 anak atau sekitar 1,97 persen dari total jumlah siswa SMP. Hingga tahun ajaran 2007/08-2008/09 angka putus sekolah SMP di seluruh Indonesia mencapai 214 775 anak atau sekitar 2,49 persen dari seluruh jumlah siswa SMP.
- Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SM selama tahun ajaran 2006/07-2007/08 tercatat sebanyak 160 618 anak atau sekitar 2,68 persen . Pada jenjang pendidikan SM putus sekolah banyak terjadi pada anak SMA dibandingkan anak SMK. Sedangkan pada tahun ajaran 2007/08-2008/09 semakin banyak anak yang putus sekolah di jenjang pendidikan SM yaitu mencapai 235 744 anak atau sekitar 3,63 persen, dimana di SMA tercatat sebanyak 141 712 anak dan di SMK sebanyak 94 032 anak.
- ◆ Pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar selama tahun ajaran 2004/05 – 2006/07 rasio murid terhadap guru tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 19 murid per guru. Idealnya seorang guru dapat mengajar antara 8-18 orang murid dan pada tahun 2007/08 untuk jenjang pendidikan SD secara nasional sudah mencapai angka yang ideal untuk seorang guru yaitu memili beban mengajar 18 murid dan terus menurun pada tahun 2008/09 menjadi 17 murid per guru. Rasio murid terhadap guru untuk tingkat pendidikan SLTP dan SM sudah mencapai angka ideal, dimana pada tahun 2008/09 masing-masing rasio murid-guru tercatat 14 murid dan 12 murid.

LAMPIRAN
HASIL STUDI KUALITATIF
TENTANG PROFIL INDIKATOR
PENDIDIKAN DI INDONESIA

Editor : Sri Indrayanti
Lestyowati Endang W

Penulis : Sofaria Ayuni
Indah Budiati
Ema Tusianti
Adwi Hastuti
Yogi Ariawan

PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Indikator merupakan suatu konsep sekaligus ukuran. Indikator juga didefinisikan sebagai perbandingan antara dua atau lebih variabel sehingga dapat diinterpretasikan. Indikator tidak mungkin dihasilkan tanpa dukungan data, sebaliknya data tidak memiliki acuan konseptual apapun tanpa dilakukannya definisi tentang indikator. Data dan indikator secara konsep maupun secara teknis keduanya sangat berlainan, namun keduanya selalu berkaitan, tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Pembangunan manusia yang telah dicapai di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat diukur dengan indikator komposit, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menggambarkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Komponen yang digunakan dalam penghitungan IPM untuk indikator pendidikan adalah rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, angka putus sekolah dan angka partisipasi sekolah.

Rata-rata lama sekolah menunjukkan lamanya pendidikan yang telah/sedang di tempuh oleh penduduk suatu wilayah, semakin tinggi rata-rata lama sekolah semakin baik tingkat pendidikan di wilayah tersebut. Sedangkan angka melek huruf digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan pendidikan dasar dan program pemberantasan buta huruf. Sementara untuk melihat perluasan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan yaitu dengan indikator angka putus sekolah dan angka partisipasi sekolah, baik angka partisipasi kasar maupun angka partisipasi murni.

Indikator pendidikan telah dihitung oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sumber data, metode dan cara penghitungan yang digunakan oleh kedua instansi ini berbeda, masing-masing memiliki kekurangan dan keterbatasan dalam mengukur indikator tersebut. Oleh sebab itu perlu dilakukan studi mendalam untuk memperbaiki metode atau cara pengukuran yang telah dilakukan BPS tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan studi mendalam mengenai "Pengembangan Indikator Pendidikan". Cara yang dilakukan adalah dengan konsultasi dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi dan konsultasi dengan orang yang ahli dalam bidang pendidikan.

Dilakukan konsultasi dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai perbedaan konsep, sumber data dan metode penghitungan. Sedangkan konsultasi dengan orang yang ahli dalam bidang pendidikan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam perbaikan pengukuran indikator yang dilakukan oleh BPS dimasa yang akan datang. Selain itu, dengan adanya studi mendalam

dapat diperoleh masukan mengenai pengukuran indikator baru. Salah satu provinsi yang dilakukan studi mendalam adalah Provinsi Sumatera Utara.

1.2. Tujuan

Studi mendalam ini dilakukan dengan beberapa tujuan, antara lain untuk mengumpulkan indikator-indikator pendidikan yang tersedia di Dinas Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara sekaligus mencari indikator baru yang dapat dijadikan sebagai indikator kunci pembangunan dalam bidang pendidikan. Selain itu juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam membangun suatu indikator di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan yang lain adalah untuk mengetahui alur/mechanisme pengumpulan data dari sekolah hingga Dinas Pendidikan. Disamping itu studi mendalam ini juga bertujuan untuk mendapatkan masukan dalam rangka perbaikan konsep-konsep indikator pendidikan yang dihitung oleh BPS sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

1.3. Ruang Lingkup

Instansi yang dikunjungi dalam studi mendalam ini antara lain Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Universitas Negeri Medan (Unimed). Unimed adalah salah satu universitas negeri besar di Sumatera Utara, ini merupakan salah satu alasan mengapa studi mendalam dilakukan di universitas ini.

Beberapa nara sumber yang ditemui antara lain:

1. Fernando (Seksi Data dan Teknologi Informasi - Bidang Bina Program, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)
2. Iwan Setiawan (Seksi Monitoring dan Evaluasi, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)
3. Edward Sinaga (Sekretariat, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)
4. Prof Dr. Sahyan, M.Pd. Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan (Unimed)

Untuk memperoleh informasi dari nara sumber dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan bantuan kuesioner dan alat perekam. Informasi yang dikumpulkan antara lain ketersediaan data dan indikator, mekanisme alur pengumpulan data dan pendapat dari para nara sumber tentang konsep indikator yang dihitung oleh BPS.

2. Proses Pengumpulan Data Pendidikan di Dinas Pendidikan

2.1. Ketersediaan Data dan Indikator

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mengumpulkan data dasar sebagai dasar penghitungan indikator antara lain. Data dasar tersebut dikumpulkan per jenjang pendidikan, antara lain :

1. Tingkat Taman Kanak-Kanak (TK)
 - a. Jumlah taman kanak-kanak
 - b. Jumlah siswa, guru, kelas (rombongan belajar) dan ruang kelas
2. Tingkat Sekolah Dasar (SD)
 - a. Jumlah sekolah, siswa baru tingkat I, siswa, kelas (rombongan belajar), dan rata-rata UAS
 - b. Jumlah lulusan, siswa mengulang, siswa putus sekolah, dan siswa tingkat VI
 - c. Jumlah guru menurut ijazah tertinggi
 - d. Jumlah ruang kelas menurut kondisi dan fasilitas
3. Tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI)
 - a. Jumlah madrasah, siswa baru tingkat I, siswa, kelas (rombongan belajar), dan rata-rata UAS MI
 - b. Jumlah lulusan, siswa mengulang dan siswa putus sekolah
 - c. Jumlah guru menurut ijazah tertinggi
 - d. Jumlah ruang kelas menurut kondisi dan fasilitas
4. Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - a. Jumlah sekolah, siswa baru tingkat I, siswa, kelas (rombongan belajar), dan rata-rata nilai UAN
 - b. Jumlah lulusan, siswa keseluruhan, siswa mengulang dan siswa putus sekolah
 - c. Jumlah guru menurut ijazah tertinggi
 - d. Jumlah guru menurut latar belakang program studi
 - e. Jumlah guru menurut bidang studi yang diajarkan
 - f. Jumlah ruang kelas menurut kondisi, dan fasilitas
5. Tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs)
 - a. Jumlah madrasah, siswa keseluruhan, siswa baru tingkat I, dan rata-rata nilai UAN
 - b. Jumlah lulusan, siswa mengulang dan siswa putus sekolah
 - c. Jumlah guru menurut ijazah tertinggi
 - d. Jumlah ruang kelas menurut kondisi dan fasilitas
 - e. Jumlah dana menurut sumber

6. Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - a. Jumlah sekolah, siswa baru tingkat I, siswa keseluruhan, kelas (rombongan belajar), dan rata-rata nilai UAN
 - b. Jumlah lulusan, siswa mengulang dan siswa putus sekolah
 - c. Jumlah guru menurut ijazah tertinggi
 - d. Jumlah guru menurut latar belakang program studi
 - e. Jumlah guru menurut bidang studi yang diajarkan
 - f. Jumlah ruang kelas menurut kondisi dan fasilitas
 - g. Jumlah siswa menurut jurusan dan sistem penjuruan
7. Tingkat Madrasah Aliyah (MA)
 - a. Jumlah madrasah, siswa baru tingkat I, siswa keseluruhan, dan rata-rata nilai UAN
 - b. Jumlah lulusan, siswa mengulang, siswa putus sekolah dan siswa tingkat III
 - c. Jumlah guru menurut ijazah tertinggi
 - d. Jumlah ruang kelas menurut kondisi dan fasilitas
8. Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - a. Jumlah sekolah, siswa baru tingkat I, siswa menurut jenis kelamin, siswa menurut umur, dan rata-rata UAN
 - b. Jumlah lulusan, siswa mengulang dan siswa putus sekolah
 - c. Jumlah guru menurut ijazah tertinggi
 - d. Jumlah ruang kelas menurut kondisi dan fasilitas
 - e. Jumlah dana menurut sumber
 - f. Jumlah pelaksanaan program sistem ganda, jumlah siswa dan lulusan menurut kelompok program studi
9. Program Paket
Program Paket A, Paket B dan Paket C
10. Data Siswa Miskin per Kabupaten/Kota

Indikator yang dibangun oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan data dasar yang dikumpulkan tersebut terbagi dalam dua kelompok yaitu indikator pemerataan pendidikan dan indikator peningkata mutu pendidikan. Indikator tersebut antara lain :

- a. Indikator Pemerataan Pendidikan
 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan
 2. Angka Partisipasi Kasar menurut jender, desa/kota dan tingkat pendidikan

3. Perbandingan sekolah antarjenjang pendidikan dan rasio pendidikan tingkat SD dan SMP
 4. Rasio pendidikan SMA+MA dan SM
 5. Angka Penyerapan Kasar (ASK) TK dan SD dan Angka Melanjutkan (AM) ke Tingkat SMP dan SM
 6. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) Tingkat SD, SMP dan SM
 7. Kepadatan penduduk dan persentase desa tertinggal
 8. Hubungan antara angka partisipasi dengan keadaan sekolah
 9. Hubungan antara angka partisipasi dengan keadaan daerah
 10. Hubungan antara Angka Melanjutkan (AM) dengan keadaan sekolah dan daerah
- b. Indikator Peningkatan Mutu :
1. Persentase asal siswa SD dan MI serta rata-rata UAS/UAN menurut jenis pendidikan
 2. Angka mengulang, putus sekolah dan lulusan tingkat SD
 3. Angka mengulang, putus sekolah dan lulusan tingkat SMP
 4. Angka mengulang, putus sekolah dan lulusan tingkat SMA dan MA
 5. Kesesuaian mengajar guru SMP dengan jurusan ijazah
 6. Kesesuaian mengajar guru SMA dengan jurusan ijazah
 7. Persentase guru SMP menurut bidang studi yang diajarkan
 8. Persentase guru SMA menurut bidang studi yang diajarkan
 9. Persentase ruang kelas milik SD dan MI menurut kondisi
 10. Persentase ruang kelas milik SMP dan MTs menurut kondisi
 11. Persentase ruang kelas milik SMA, MA, dan SMK menurut kondisi
 12. Persentase ruang kelas milik SMA MA dan SMK menurut kondisi
 13. Persentase ketersediaan fasilitas milik SD dan MI
 14. Persentase ketersediaan fasilitas milik SMP dan MTs
 15. Persentase ketersediaan fasilitas milik SMA dan MA
 16. Persentase ketersediaan fasilitas milik SMK

2.2. Mekanisme Pengumpulan dan Pengolahan Data

Salah satu Sub Dinas yang mengumpulkan dan mengolah data di Dinas Pendidikan Sumatera Utara adalah Sub Dinas Bina Program, yang terbagi menjadi tiga seksi yaitu Seksi Penyusunan Program, Seksi Pengumpulan, Pengolahan Data dan Pelaporan serta Seksi Monitoring dan Evaluasi. Dari ketiga seksi ini yang paling memegang peranan penting dalam mekanisme pengumpulan dan pengolahan adalah Seksi Pengumpulan, Pengolahan Data dan Pelaporan.

Dengan adanya kebijakan desentralisasi, urusan pendidikan menjadi salah satu yang diserahkan urusannya kepada pemerintah kabupaten/kota. Untuk sekolah umum pengolahan dan pengumpulan data pendidikan dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan untuk madrasah oleh Kanwil Depag dan Kandenpag. Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan oleh dinas pendidikan merupakan kegiatan bersama dengan Diknas, dalam hal ini Pusat Statistik Pendidikan (PSP).

Pengumpulan data pendidikan dari masing-masing sekolah di kabupate/kota dilakukan secara rutin setiap tahun menggunakan kuesioner dari PSP. Data yang dikumpulkan terdiri dari identitas sekolah, siswa, guru dan pegawai administrasi, dan sarana prasarana. Untuk data siswa dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Pengumpulan data pendidikan dilakukan oleh Kelompok Kerja Data Pendidikan (KK Datadik) dengan instrumen pendataan dan dukungan dana dari pemerintah pusat. Kuesioner TK dan SD dikirimkan ke cabang dinas pendidikan kecamatan untuk selanjutnya dibagikan ke masing-masing sekolah. Sedangkan kuesioner SMP, SMA dan SMK dikirim langsung dari Dians Pendidikan kabupaten ke masing-masing sekolah.

Penerimaan kuesioner TK dan SD yang sudah diisi oleh sekolah dilakukan oleh petugas di dinas pendidikan kecamatan, sedangkan penerimaan kuesioner SMP, SMA dan SMK yang sudah diisi oleh sekolah dilakukan oleh petugas dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada umumnya dinas memiliki petugas yang bertanggung jawab mencatat dan mengelola instrumen.

Dinas pendidikan kecamatan melakukan perangkuman data TK dan SD menggunakan format rangkuman tingkat kecamatan (RC-TK/RA/BA dan RC-SD/MI). Perekaman data umumnya masih secara manual, meski sudah ada beberapa kecamatan yang melakukan perangkuman dan perekaman data menggunakan komputer yaitu dengan program exel.

2.3. Kendala yang Dihadapi dalam Pengumpulan Data dan Penghitungan Indikator

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara antara lain kondisi geografis yang tidak semuanya mudah terjangkau menambah waktu dalam pengiriman kuesioner ke masing-masing sekolah. Selain itu juga karena keterlambatan pengiriman kuesioner dari PSP mengakibatkan keterlambatan pengiriman kuesioner ke sekolah-sekolah. Kendala lain juga karena jumlah kuesioner yang dikirim oleh PSP biasanya kurang dari jumlah sekolah yang ada.

Sulitnya kuesioner dan kurangnya pemahaman petugas di sekolah juga menjadi kendala dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh dinas pendidikan, hal ini menyebabkan petugas mengalami kesulitan dalam pengisian kuesioner tersebut. Selain

itu juga kurangnya sosialisasi dalam pengisian kuesioner tersebut karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dari dinas pendidikan. Terlalu banyak kuesioner atau instrumen pendataan yang diterima oleh masing-masing sekolah menyebabkan kejenuhan dalam mengisi kuesioner tersebut juga menjadi kendala.

Untuk mengatasi semua masalah atau kendala-kendala tersebut upaya yang telah dilakukan oleh dinas pendidikan antara lain memberikan fasilitas berupa biaya operasional untuk daerah yang sulit dijangkau, melakukan penggandaan kuesioner di daerah untuk menghindari kekurangan dan keterlambatan penyediaan dokumen, diberikan pelatihan/ sosialisasi tentang pengisian kuesioner dan arti pentingnya data bagi para petugas di sekolah, diberikan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pengelola pendidikan tingkat kabupaten dan kecamatan. Melakukan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dan pengumpulan data untuk menghindari duplikasi pengumpulan data.

Sementara permasalahan yang ditemui saat pengolahan data antara lain kurangnya tenaga yang bisa mengoperasikan komputer dan yang bisa program aplikasi dan juga kurangnya jumlah komputer yang tersedia untuk mengolah data. Selain itu karena masalah kualitas data yang kurang baik menyulitkan dalam petugas melakukan pengolahan data.

3. Konsep Indikator Pendidikan

3.1. Angka Melek Huruf dan Angka Buta Huruf

Indikator Angka Melek Huruf merupakan indikator yang penting dalam pencapaian pembangunan pendidikan, karena kemampuan keaksaraan merupakan persyaratan awal untuk memperoleh berbagai kemampuan dasar belajar. Tujuan lain supaya seseorang dapat mencari, memperoleh, menggunakan dan mengelola informasi untuk meningkatkan mutu hidupnya. Angka melek huruf adalah istilah dari BPS sedangkan menurut Dinas Pendidikan adalah persentase penduduk yang memiliki kemampuan keaksaraan.

Konsep melek huruf yang digunakan di Dinas Pendidikan Sumatera Utara sama dengan konsep dari Kementerian Pendidikan Nasional yang mengacu pada konsep keaksaraan yang meliputi membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Adapun konsep membaca adalah melafalkan kata, kalimat, wacana dan lambang bilangan yang tersurat dengan menggunakan huruf Latin dan angka Arab, baik dengan suara nyaring atau dalam hati sehingga dapat dipahami maknanya. Menulis adalah kegiatan menuangkan pikiran dan gagasan secara tersurat dalam bentuk rangkaian kata-kata yang membentuk kalimat dan wacana yang memiliki makna. Berhitung adalah operasi hitung yang terdiri atas mencacah, mengurutkan, menjumlahkan, mengurang, mengkali dan membagi bilangan yang nominalnya tidak lebih dari tiga angka.

Menurut pendapat Prof Dr. Syahyar, M.Pd. Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan (Uimed), konsep melek huruf sebaiknya huruf

yang wajib digunakan atau yang paling utama adalah huruf Latin. Sedangkan untuk huruf lainnya yang bisa masuk dalam kategori melek huruf adalah huruf arab. Dalam hal kemampuan lain, seperti berhitung, seandainya dimasukkan dalam syarat melek huruf, maka harus ada batasannya misalnya mampu berhitung 1-10 atau mampu menghitung uang, karena menghitung uang adalah hal yang umum. Sedangkan syarat untuk memahami mengenai apa yang dibaca/ditulis juga sebaiknya memang harus mengerti minimal kalimat yang sederhana.

3.2. Rata-Rata Lama Sekolah

Untuk menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibutuhkan indikator pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah dihitung dari berapa lama seseorang individu berumur 15 tahun ke atas menjalani masa pendidikan formal, dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun.

Di BPS, rata-rata lama sekolah dihitung dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) terhadap individu yang berumur 15 tahun ke atas. Beberapa informasi yang dikumpulkan untuk menghitung indikator ini antara lain partisipasi sekolah, jenjang dan pendidikan tertinggi yang pernah atau sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki

Dalam konsep internasional rata-rata lama sekolah menggunakan istilah *School Life Expectancy* (SLE), yang artinya adalah lama jumlah tahun sekolah seorang anak pada umur tertentu. Atau dapat diartikan lamanya seorang anak akan menempuh suatu pendidikan dihitung dari mulai anak tersebut berpartisipasi sekolah. Namun konsep ini tidak bisa dihitung secara langsung di Indonesia mengingat adanya kesulitan dalam menganalisis kohort tersebut dari waktu ke waktu. Sehingga penghitungannya dilakukan dengan cara yang disebutkan di atas.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Prof Dr. Syahyar, M.Pd dan Iwan Setiawan, Seksi Monitoring dan Evaluasi, batasan umur 15 tahun sudah cocok sebagai batasan umur dimana usia 15 tahun menunjukkan usia dewasa. Sedangkan pendidikan yang dipersyaratkan adalah pendidikan formal, pendidikan non formal tidak disertakan dalam penghitungan.

3.3. Angka Putus Sekolah

Konsep Angka Putus Sekolah antara Departemen Pendidikan dan BPS sama, yaitu penduduk yang tidak bersekolah lagi dan tingkat/kelas yang pernah/sedang diduduki tidak sampai tamat, dimana tamat di SD adalah kelas 6, di SMP adalah kelas 3 dan di SMA adalah kelas 3 sedangkan di PT adalah sesuai jenjangnya. Angka Putus Sekolah yang dihitung BPS berdasarkan berdasarkan hasil Susenas dengan pendekatan rumah tangga dan respondennya adalah anggota rumah tangga yang bersangkutan. Sedangkan

Dinas Pendidikan menghitung Angka Putus Sekolah melalui hasil registrasi dengan pendekatan sekolah dimana respondennya adalah siswa di sekolah yang bersangkutan. Angka Putus Sekolah yang dihitung oleh Kementerian Pendidikan menggunakan rumus:

$$\text{APS} = \frac{\text{Jumlah siswa putus sekolah}}{\text{Jumlah Siswa pada tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan tertentu}} \times 100$$

Dengan demikian, jika pada tahun ajaran 2008/2009 terdapat 6 siswa SD yang putus sekolah dan jumlah total siswa SD pada tahun ajaran 2007/2008 ada sebanyak 3000 siswa, maka angka putus sekolah (APS) bernilai 0,20 persen.

3.4. Angka Partisipasi Murni

Indikator pemerataan dan perluasan akses pendidikan penting lainnya adalah angka partisipasi yaitu Angka Partisipasi Murni (APM). Konsep dan penghitungan indikator ini sama dengan yang ada di BPS. APM adalah penduduk yang masih sekolah pada tingkat pendidikan tertentu dengan umur sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut dibagi dengan jumlah penduduk pada usia tersebut. Rumus yang digunakan untuk penghitungan APM adalah:

$$\text{APM} = \frac{\text{Jumlah siswa kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100$$

Pengelompokkan usia dalam penghitungan angka partisipasi sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yaitu 7-12 tahun untuk Sekolah Dasar, 13-15 tahun untuk Sekolah Menengah Pertama dan 16-18 tahun untuk Sekolah Menengah Atas. Menurut Edward Sinaga, Sekretariat, Dinas Pendidikan Sumatera Utara, penentuan batas bawah usia sekolah umur 7 tahun sudah pas dimana pada usia tersebut seorang anak sudah siap menerima pelajaran sekolah. Namun menurut pendapat dari Prof Dr. Syahyar, M.Pd, batas bawah usia sekolah sebaiknya 6 tahun dengan alasan supaya terhitung anak yang sudah masuk sekolah pada usia 6 tahun. Menurut pengamatan belia, saat ini banyak sekali anak yang di usia tersebut sudah masuk sekolah formal (SD).

4. Kesimpulan/Rekomendasi

Kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan hasil studi mendalam antara lain sebagai berikut:

Sumatera Utara

1. Konsep mengenai pembentukan atau penghitungan indikator pendidikan sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tidak membuat/melakukan pengembangan mengenai konsep tersebut.
2. Perbedaan konsep melek huruf yang dihitung oleh BPS dan Dinas Pendidikan disebabkan karena konsep Dinas Pendidikan memasukkan kategori kemampuan berhitung dan berkomunikasi sebagai salah satu persyaratan kemampuan penguasaan aksara (melek aksara) dengan konsep yang lebih rinci.

Adapun beberapa hal yang direkomendasikan diantaranya adalah keselarasan data yang dihasilkan meskipun konsep antara BPS dan Dinas Pendidikan berbeda. Selain itu ada masukan untuk penghitungan indikator standard kompetensi untuk PGRI.

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

Profil Indikator Pendidikan di Provinsi Riau

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu tolok ukur untuk mengetahui perkembangan suatu negara. Di samping itu pendidikan yang layak adalah hak warga negara, sehingga pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan pendidikan yang layak bagi setiap warga.

Data pendidikan yang akurat dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan bidang pendidikan. Karena tanpa adanya data, sulit rasanya untuk membangun bidang pendidikan maupun bidang yang lain.

Dengan menggunakan data-data yang tersedia, akan didapatkan beberapa indikator yang mampu untuk mengukur perkembangan di bidang pendidikan. Untuk mendukung hal tersebut, penelusuran indikator baru mutlak diperlukan.

Dalam hal ini provinsi Riau dipilih sebagai salah satu lokasi sampel untuk studi mendalam, karena merupakan salah satu provinsi yang memiliki perkembangan pendidikan yang cukup baik.

1.2 Tujuan

Tujuan dilaksanakan studi mendalam ini adalah untuk ;

1. mengumpulkan indikator-indikator pendidikan yang tersedia di tingkat provinsi
2. mencari indikator baru yang dapat dijadikan sebagai indikator kunci pembangunan dalam bidang pendidikan
3. mengetahui kendala yang dihadapi untuk membangun suatu indikator
4. mengetahui alur/mekanisme pengumpulan data dari sekolah hingga diknas
5. mendapatkan masukan mengenai konsep-konsep indikator pendidikan yang dihitung oleh BPS sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang

1.3 Ruang Lingkup (instansi/unit kerja yang dikunjungi)

Untuk mendukung studi ini, dilakukan wawancara terhadap beberapa narasumber sebagai sampel responden di beberapa instansi. Tujuannya adalah untuk menggali informasi yang terkait dengan maksud dan tujuan dari studi ini dan juga untuk

menanyakan konsep dari beberapa indikator untuk mengantisipasi adanya perbedaan konsep pada indikator yang telah disusun oleh BPS dengan konsep indikator yang ada di Dinas Pendidikan.

2. PENGUMPULAN DATA DAN INDIKATOR PENDIDIKAN

2.1 Data dan Indikator Pendidikan yang Tersedia di Wilayah Studi

Data dan indikator yang telah dikumpulkan dan dihitung di Provinsi Riau antara lain:

1. Data mengenai sekolah, dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) :
 - Jumlah Sekolah, Siswa Baru Tingkat I, Siswa, Kelas, dan Rata-Rata NUAS (untuk SD dan MI) , Rata-Rata UAN (untuk SMP, MTs, SMA, dan SMK), atau NEM (untuk MA)
 - Jumlah Lulusan, Siswa, Mengulang, Putus Sekolah, Siswa Tingkat VI (khusus SD dan MI), dan Siswa Tingkat III (untuk MA)
 - Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi
 - Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi dan Fasilitas Sekolah
 - Jumlah Dana di Sekolah Dasar Menurut Sumber
 - Jumlah Guru Sekolah Menurut Latar Belakang Program Studi (hanya SMP dan SMA)
 - Jumlah Guru Menurut Bidang Studi yang Diajarkan (hanya SMP dan SMA)
 - Jumlah Siswa Menurut Jurusan dan Sistem Penjurusan (hanya SMA)
 - Pelaksanaan Program Sistem Ganda, Jumlah Siswa dan Lulusan Menurut Kelompok Program Studi (hanya SMK)
2. Program Paket :
Program Paket A, Paket B, dan Paket C
3. Verifikasi Data :
 - Persentase Penduduk Kelompok Usia Sekolah Terhadap Total Seluruh Penduduk
 - Persentase Siswa Baru Tingkat I, Siswa Kelompok Usia 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, dan Kenaikan Siswa

- Persentase Siswa Baru Tingkat I, Siswa Kelompok Usia 16-18 Tahun, dan Kenaikan Siswa
 - Rasio Siswa Per sekolah Menurut Jenis Pendidikan
 - Rasio Siswa Per Guru Menurut Jenis Pendidikan
 - Rasio Siswa Per Kelas Menurut Jenis Pendidikan
 - Rasio Kelas Per Ruang Kelas Menurut Jenis Pendidikan
4. Indikator Pendidikan
- Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan
 - Angka Partisipasi Kasar menurut Jender, Desa/Kota dan Tingkat Pendidikan
 - Perbandingan Sekolah Antar Jenjang Pendidikan dan Rasio Pendidikan Tingkat SD dan SMP
 - Rasio Pendidikan SMA+MA dan SMK
 - Angka Melanjutkan (AM) ke Tingkat SMP dan SM
 - Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) Tingkat SD, SMP, dan SM
 - Hubungan Antara Angka Partisipasi dengan Keadaan Sekolah
 - Hubungan Antara Angka Partisipasi dengan Keadaan Daerah
 - Hubungan Antara Angka Melanjutkan (AM) dengan Keadaan Sekolah dan Daerah
5. Indikator Peningkatan Mutu
- Persentase Asal Siswa SD dan MI Serta Rata-Rata UAS/UAN Menurut Jenis Pendidikan
 - Angka Mengulang, Putus Sekolah dan Lulusan (Tingkat SD, SMP, SMA, dan MA)
 - Persentase Guru (Tingkat SD, SMP, SMA, MA, dan SMK) Menurut Kelayakan Mengajar
 - Kesesuaian Mengajar Guru (SMP dan SMA) dengan Jurusan Ijazah
 - Persentase Guru (SMP dan SMA) Menurut Bidang Studi yang Diajarkan
 - Persentase Ruang Kelas Milik SD, MI, SMP, MTs, SMA, Ma, dan SMK Menurut Kondisi
 - Persentase Ketersediaan Fasilitas Milik SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK

Provinsi Riau

- Kekurangan/Kelebihan Fasilitas Milik SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK
 - Kontribusi Biaya Pendidikan Pemerintah Pusat, Pemda, dan Orang Tua Siswa (SD dan MI, SD+MI, serta SMP dan MTs)
 - Kontribusi Biaya Pendidikan Pemerintah Pusat, Yayasan, Pemda, dan Orang Tua Siswa (SMP+MTs, SMA dan MA, SMA+MA, SMK, SM+MA) serta Satuan Biaya
6. Indikator Relevansi Pendidikan
- Persentase Siswa SMA Menurut Jurusan dan Kinerja Penjurusan
 - Persentase SD yang Melaksanakan Sistem Ganda dan Siswa SMK Menurut Kelompok/Rumpun
7. Indikator Efisiensi Internal Pendidikan
- Indikator Efisiensi Internal Sekolah
 - Siswa Bertahan dan Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
 - Hubungan Tahun Siswa Terbuang dengan Biaya Pendidikan
- Jumlah Siswa Mengulang, Putus sekolah, Naik Tingkat, dan Lulusan Menurut Jenis Kelamin (untuk SD, MI, SD+MI, SMP, MTs, SMP+MTs, SMA, MA, SMA+MA, SMK, dan SM+MA) ;
- Kohort Per 1000 Siswa (Laki-laki+Perempuan)
- Kohort Per 1000 Siswa (Perempuan)
- Kohort Per 1000 Siswa (Laki-laki)
- Indikator Efisiensi Internal Pendidikan (untuk SD, MI, SD+MI, SMP, MTs, SMP+MTs, SMA, MA, SMA+MA, SMK, dan SM+MA)

2.2 Mekanisme Pengumpulan dan Pengolahan Data (Sampai Tingkat Provinsi) yang Dilakukan oleh Dinas Pendidikan

Pengumpulan data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Diknas) adalah dengan cara pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Instrumen berupa *dummy table* dari pemerintah pusat didistribusikan sampai ke tingkat kabupaten. Kemudian dari kabupaten diteruskan ke sekolah-sekolah. Setelah pihak sekolah mengisi instrumen tersebut dan mengirimkan ke Diknas Kabupaten/Kota, data akan dikirim ke Diknas Provinsi yang kemudian diteruskan ke Kementerian Pendidikan Nasional.

Data yang disajikan diupdate setiap tahun, tepatnya Bulan Agustus sebulan setelah tahun ajaran baru masuk (Bulan Juli).

2.3 Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data

Salah satu kendala yang sering dijumpai pada proses pengumpulan data adalah sering terjadi keterlambatan pada tahap pengembalian instrumen yang sudah terisi, sehingga berpengaruh pada dimulainya proses pengolahan data, dan akhirnya berdampak pada keterlambatan penyajian data dari target waktu yang direncanakan. Hal ini dikarenakan kemampuan sumber daya tenaga pendata terhadap penguasaan pendataan yang sangat terbatas.

Di samping keterlambatan data, dana juga menjadi kendala dalam pengelolaan data pendidikan.

Upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mengolah data dengan cara pelatihan sudah pernah dilakukan, akan tetapi muncul persoalan baru ketika pegawai yang sudah dilatih dan ahli dalam pengolahan data pindah atau promosi ke subdit lain, atau bahkan ke instansi lain.

3. KONSEP DEFINISI BEBERAPA INDIKATOR PENTING PENDIDIKAN

3.1 Angka Melek Huruf (AMH)

BPS mendefinisikan melek huruf, yaitu bisa membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulis. Orang yang bisa menulis tentu bisa membaca. Orang yang bisa membaca belum tentu bisa menulis. Sementara Konsep internasional, melek huruf (*Adult Literacy Rate*) adalah bisa membaca, menulis dan mengerti apa yang dibaca minimal kalimat sederhana yang ada dalam kehidupan sehari-hari, serta mencakup bisa melakukan penghitungan sederhana.

Konsep melek huruf di Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah "calistung" (baca, tulis, hitung). Penduduk dikatakan melek huruf bila bisa membaca, menulis dan berhitung. Namun Diknas Riau setuju dengan konsep dari BPS, orang sudah bisa dikatakan melek huruf tidak perlu harus mengerti atau memahami apa yang dibaca. Alasannya karena melek huruf merupakan indikator dasar pendidikan. Baik atau buruk pendidikan di suatu daerah pertama kali dilihat dari indikator ini. Jika "harus mengerti" dimasukkan dalam konsep ini, maka angka melek huruf menjadi sangat rendah.

3.2 Putus Sekolah

BPS menghitung Angka Putus Sekolah (APTS) dengan cara membagi penduduk yang putus sekolah dengan jumlah penduduk yang pernah/sedang bersekolah (masih bersekolah, putus sekolah dan tamat sekolah). Konsep putus sekolah tersebut adalah penduduk yang tidak bersekolah lagi dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki tidak sampai tamat. Tamat di SD adalah kelas 6, tamat di SMP adalah kelas 3,

dan tamat di SMA adalah kelas 3, sedangkan Perguruan Tinggi sesuai dengan jenjangnya. Pada konsep internasional mengistilahkan APTS dengan *Drop out rate*, yaitu persentase murid dari suatu kohort dengan jenjang pendidikan tertentu yang tidak lagi mengikuti pendidikan pada jenjang tersebut. Namun konsep ini tidak bisa dihitung secara langsung di BPS mengingat kesulitan dalam menganalisis kohort tersebut dari waktu ke waktu.

Dinas Pendidikan selama ini juga menghitung Angka Putus Sekolah (APS). Konsep Putus Sekolah sama saja dengan konsep BPS, hanya saja pembandingnya jumlah siswa pada tahun sebelumnya. Angka Putus Sekolah dihitung dengan rumus ;

$$\text{APS} = \frac{\text{Jumlah putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah siswa pada tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan tertentu}}$$

Terdapat perbedaan pendekatan pada data yang digunakan untuk menghitung Angka Putus Sekolah dari BPS dan Dinas Pendidikan. Angka Putus Sekolah dari BPS berasal dari data Survei Sosial Ekonomi (Susenas). Sedangkan dari Dinas Pendidikan menggunakan pendekatan sekolah.

3.3 Rata-Rata Lama Sekolah

Berdasarkan konsep BPS, rata-rata lama sekolah dihitung dari berapa lama seseorang individu berumur 15 tahun ke atas menjalani masa pendidikan formal, dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Di konsep internasional menggunakan istilah SLE (*School life expectancy*), lamanya jumlah tahun sekolah seorang anak pada umur tertentu. Atau dapat diartikan lamanya seorang anak akan menempuh suatu pendidikan dihitung dari mulai anak tersebut berpartisipasi sekolah.

Kementerian Pendidikan Nasional sudah memiliki indikator yang mirip dengan Rata-Rata Lama Sekolah, yaitu Rata-Rata Lama Belajar (RLBL). Rata-rata lama belajar diperoleh dengan menggunakan kohort dari 1000 siswa. Seribu siswa ini diikuti perkembangannya dari tingkat I sampai lulus dan mereka diasumsikan boleh mengulang maksimum 2 kali.

3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APM dihitung dari penduduk yang masih sekolah pada tingkat pendidikan tertentu dengan umur sesuai jenjang pendidikan tersebut dibagi dengan jumlah penduduk pada umur tersebut. APS dihitung dari penduduk yang masih sekolah pada tingkat pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur dengan pembagi sama seperti APM. Konsep internasional hampir sama dengan BPS, kelompok umur disesuaikan dengan kebijakan masing-masing negara.

Dalam pembagian kelompok umur, Dinas Pendidikan mengacu pada PP 47 tahun 2007 Wajardikdas Impres tahun 2005. Dengan alasan karena secara psikologis tingkat kesiapan dalam menerima konsep-konsep kognitif adalah umur 7 tahun.

4 KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN SARAN

- Pengumpulan dan pengolahan data pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, dengan menggunakan pendekatan sekolah. Alur data pendidikan berasal dari sekolah, kemudian ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang kemudian diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan pusat.
- Keterlambatan pengumpulan data, dana dan tenaga pengolah data menjadi kendala dalam pengelolaan data pendidikan di Dinas Pendidikan.
- Walaupun mengenai konsep melek huruf sedikit berbeda dengan BPS, yaitu Dinas Pendidikan menggunakan konsep "calistung" (baca, tulis, hitung). Namun mereka sepakat mengenai konsep "mengerti", yaitu penduduk tidak harus mengerti atau memahami apa yang dibaca.

Profil Indikator Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu untuk meningkatkan harkat dan martabatnya. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pengembangan pembangunan di bidang pendidikan agar dapat bersinergi dengan pembangunan di bidang lainnya, sehingga menghasilkan hasil yang produktif serta membawa manfaat yang berarti bagi individu dan menunjang pembangunan di bidang lainnya.

Guna pengembangan di bidang pendidikan, dibutuhkan data pendidikan yang akurat, sah dan mutakhir, sebab data pendidikan merupakan rujukan bagi institusi pemerintah maupun organisasi yang peduli terhadap pendidikan. Tanpa ketersediaan data, maka penetapan parameter terhadap capaian kinerja, analisis kebijakan, strategi, program kegiatan, termasuk pengukuran proses dan hasil pembangunan pendidikan tidak akan terukur dengan baik.

Berdasarkan data yang tersedia, dibentuk data olahan yang menghasilkan indikator-indikator untuk mengukur pembangunan di bidang pendidikan. Indikator yang baik adalah indikator yang dapat menggambarkan perkembangan tingkat pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Oleh karena itu pengembangan indikator-indikator baru perlu terus digali guna lebih menyempurnakan pantauan atau gambaran tentang perkembangan tingkat pembangunan pendidikan di suatu wilayah.

Provinsi Jawa Tengah dipilih sebagai salah satu sampel studi mendalam ini karena merupakan salah satu provinsi yang memiliki perkembangan pembangunan pendidikan cukup baik di Indonesia.

1.2 Tujuan

Tujuan dilaksanakan studi mendalam ini adalah untuk ;

1. mengumpulkan indikator-indikator pendidikan yang tersedia di tingkat provinsi
2. mencari indikator baru yang dapat dijadikan sebagai indikator kunci pembangunan dalam bidang pendidikan
3. mengetahui kendala yang dihadapi untuk membangun suatu indikator
4. mengetahui alur/mekanisme pengumpulan data dari sekolah hingga diknas

5. mendapatkan masukan mengenai konsep-konsep indikator pendidikan yang dihitung oleh BPS sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang

1.3 Ruang Lingkup (instansi/unit kerja yang dikunjungi)

Untuk mendukung studi ini, dilakukan wawancara terhadap beberapa narasumber sebagai sampel responden di beberapa instansi. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan maksud dan tujuan dari studi ini dan kemungkinan terdapat perbedaan rumus atau konsep pada indikator yang sama antara instansi tersebut dengan BPS, atau dengan konsep internasional. Instansi yang berhasil dikunjungi disamping Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Negeri Semarang (UNES). Narasumber dari Dinas Pendidikan diwakili oleh Hari Mulyanto (Kasie) dan Jasman Indradno (Kasubag) Bina Program Dinas Pendidikan. Sementara dari UNES diwakili oleh Harjono (Dosen Teknik Pendidikan, Pembantu Dekan II), Darman (Dosen Pendidikan Luar Sekolah), dan Elyas (Dosen Agama).

2. PENGUMPULAN DATA DAN INDIKATOR PENDIDIKAN

2.1 Data dan Indikator Pendidikan yang Tersedia di Wilayah Studi

Beberapa data dan indikator yang telah dikumpulkan dan dihitung di Provinsi Jawa Tengah meliputi :

1. Data yang Berkaitan dengan Sekolah, dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) :
 - Jumlah Sekolah, Siswa Baru Tingkat I, Siswa, Kelas (Rombongan Belajar), dan Rata-Rata NUAS (untuk SD dan MI) , Rata-Rata UAN (untuk SMP, MTs, SMA, dan SMK), atau NEM (untuk MA)
 - Jumlah Lulusan, Siswa, Mengulang, Putus Sekolah, Siswa Tingkat VI (khusus SD dan MI), dan Siswa Tingkat III (untuk MA)
 - Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi
 - Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi dan Fasilitas Sekolah
 - Jumlah Dana di Sekolah Dasar Menurut Sumber

Provinsi Jawa Tengah

- Jumlah Guru Sekolah Menurut Latar Belakang Program Studi (hanya SMP dan SMA)
 - Jumlah Guru Menurut Bidang Studi yang Diajarkan (hanya SMP dan SMA)
 - Jumlah Siswa Menurut Jurusan dan Sistem Penjurusan (hanya SMA)
 - Pelaksanaan Program Sistem Ganda, Jumlah Siswa dan Lulusan Menurut Kelompok Program Studi (hanya SMK)
2. Program Paket :
- Program Paket A, Paket B, dan Paket C
3. Verifikasi Data :
- Persentase Penduduk Kelompok Usia Sekolah Terhadap Total Seluruh Penduduk
 - Persentase Siswa Baru Tingkat I, Siswa Kelompok Usia 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, dan Kenaikan Siswa
 - Persentase Siswa Baru Tingkat I, Siswa Kelompok Usia 16-18 Tahun, dan Kenaikan Siswa
 - Rasio Siswa Per sekolah Menurut Jenis Pendidikan
 - Rasio Siswa Per Guru Menurut Jenis Pendidikan
 - Rasio Siswa Per Kelas Menurut Jenis Pendidikan
 - Rasio Kelas Per Ruang Kelas Menurut Jenis Pendidikan
4. Indikator Pendidikan
- Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan
 - Angka Partisipasi Kasar menurut Jender, Desa/Kota dan Tingkat Pendidikan
 - Perbandingan Sekolah Antar Jenjang Pendidikan dan Rasio Pendidikan Tingkat SD dan SMP
 - Rasio Pendidikan SMA+MA dan SMK
 - Angka Melanjutkan (AM) ke Tingkat SMP dan SM
 - Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) Tingkat SD, SMP, dan SM
 - Hubungan Antara Angka Partisipasi dengan Keadaan Sekolah

- Hubungan Antara Angka Partisipasi dengan Keadaan Daerah
 - Hubungan Antara Angka Melanjutkan (AM) dengan Keadaan Sekolah dan Daerah
5. Indikator Peningkatan Mutu
- Persentase Asal Siswa SD dan MI Serta Rata-Rata UAS/UAN Menurut Jenis Pendidikan
 - Angka Mengulang, Putus Sekolah dan Lulusan (Tingkat SD, SMP, SMA, dan MA)
 - Persentase Guru (Tingkat SD, SMP, SMA, MA, dan SMK) Menurut Kelayakan Mengajar
 - Kesesuaian Mengajar Guru (SMP dan SMA) dengan Jurusan Ijazah
 - Persentase Guru (SMP dan SMA) Menurut Bidang Studi yang Diajarkan
 - Persentase Ruang Kelas Milik SD, MI, SMP, MTs, SMA, Ma, dan SMK Menurut Kondisi
 - Persentase Ketersediaan Fasilitas Milik SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK
 - Kekurangan/Kelebihan Fasilitas Milik SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK
 - Kontribusi Biaya Pendidikan Pemerintah Pusat, Pemda, dan Orang Tua Siswa (SD dan MI, SD+MI, serta SMP dan MTs)
 - Kontribusi Biaya Pendidikan Pemerintah Pusat, Yayasan, Pemda, dan Orang Tua Siswa (SMP+MTs, SMA dan MA, SMA+MA, SMK, SM+MA) serta Satuan Biaya
6. Indikator Relevansi Pendidikan
- Persentase Siswa SMA Menurut Jurusan dan Kinerja Penjurusan
 - Persentase SD yang Melaksanakan Sistem Ganda dan Siswa SMK Menurut Kelompok/Rumpun
7. Indikator Efisiensi Internal Pendidikan
- Indikator Efisiensi Internal Sekolah
 - Siswa Bertahan dan Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
 - Hubungan Tahun Siswa Terbuang dengan Biaya Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

- Jumlah Siswa Mengulang, Putus sekolah, Naik Tingkat, dan Lulusan Menurut Jenis Kelamin (untuk SD, MI, SD+MI, SMP, MTs, SMP+MTs, SMA, MA, SMA+MA, SMK, dan SM+MA) ;
- Kohort Per 1000 Siswa (Laki-laki+Perempuan)
- Kohort Per 1000 Siswa (Perempuan)
- Kohort Per 1000 Siswa (Laki-laki)
- Indikator Efisiensi Internal Pendidikan (untuk SD, MI, SD+MI, SMP, MTs, SMP+MTs, SMA, MA, SMA+MA, SMK, dan SM+MA)

2.2 Mekanisme Pengumpulan dan Pengolahan Data (Sampai Tingkat Provinsi)

yang Dilakukan oleh Dinas Pendidikan

Pengumpulan data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Diknas) adalah dengan cara pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Instrumen dari pemerintah pusat didistribusikan sampai ke tingkat kabupaten dalam bentuk dummy tabel yang siap diisi. Kemudian dari kabupaten diteruskan ke sekolah-sekolah unit pendataan dengan cara mengisi instrumen yang sudah diberikan.

Instrumen yang sudah diisi dikumpulkan dan diolah di masing-masing kabupaten. Sistem pengolahan data sudah menggunakan software khusus yang diprogram dari pemerintah pusat. Sayangnya narasumber dari Dinas Pendidikan tidak mengetahui nama software tersebut. Cara kerja software tersebut adalah dengan memasukan data-data yang diperlukan, kemudian langsung secara otomatis keluar analisis deskriptifnya.

Data yang disajikan di Dinas Pendidikan diupdate setiap tahun, tepatnya Bulan Agustus sebulan setelah tahun ajaran baru masuk (Bulan Juli). Penghitungan data dengan menggunakan tahun berjalan (sampai bulan tertentu) akan dilakukan jika ada permintaan khusus dari pemerintah pusat atau permintaan khusus dari anggota DPR yang sedang berkunjung ke provinsi ini.

Kelengkapan data yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Nasional tidak diimbangi keberagaman penghitungan indikator yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan di kabupaten/kota tidak memiliki Badan Litbang. Pegawai yang diberi kewenangan penghitungan indikator-indikator pendidikan juga belum memahami cara penghitungannya dan tidak ada tuntutan untuk menghasilkan indikator-indikator lainnya. Selama ini indikator yang digunakan sebagai bahan analisis hanya sebatas Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Buta Huruf. Selama ini belum pernah diadakan penelitian atau kajian, hanya sekedar memenuhi kebutuhan data dari pusat.

2.3 Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data

Kendala yang sering dijumpai pada proses pengumpulan data adalah sering terjadi keterlambatan pada tahap pengembalian instrumen yang sudah terisi, sehingga berpengaruh pada dimulainya proses pengolahan data, dan akhirnya berdampak pada keterlambatan penyajian data dari target waktu yang direncanakan. Salah satu faktor keterlambatan data adalah kemampuan sumber daya tenaga pendata terhadap penguasaan pendataan yang sangat terbatas.

Menurut narasumber Pak Hari Mulyanto, dana yang diperoleh untuk pengolahan data dari APBD provinsi ke Kabupaten sekitar 5 milyar, belum termasuk yang diperoleh dari pusat. Namun karena kepedulian data kurang atau belum *data minded* baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, sehingga banyak data yang sudah dikumpulkan tidak dihitung indikatornya. Disamping itu kemampuan sumber daya manusia dalam pengolahan data juga belum memadai. Personil yang memahami masalah pendataan masih sedikit dan belum banyak yang tertarik pada pendataan. Kegiatan pengolahan data masih dianggap pekerjaan sambil lalu saja. Tenaga yang dibebani tugas pengolahan juga masih terbebani tugas rutin lainnya, sehingga kesempatan untuk mengeksplorasi lebih jauh indikator-indikator pendidikan sangat terbatas.

Upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mengolah data dengan cara pelatihan sudah pernah dilakukan, akan tetapi muncul persoalan baru ketika pegawai yang sudah dilatih dan ahli dalam pengolahan data pindah atau promosi ke subdit lain, atau bahkan ke instansi lain. Sementara sejak otonomi daerah, muncul masalah yang dihadapi di kabupaten, yaitu tidak semua kabupaten memiliki struktur organisasi yang sama. Belum seluruh kabupaten memiliki bidang perencanaan sebagai bidang yang biasanya bertugas melakukan pengolahan dan analisis data, sehingga banyak dilempar ke bidang Tata Usaha yang tidak memiliki kapasitas kemampuan pengolahan dan analisis data. Pada saat Dinas Pendidikan membutuhkan data tertentu, kabupaten tersebut tidak dapat menyediakan.

3. KONSEP DEFINISI BEBERAPA INDIKATOR PENTING PENDIDIKAN

3.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Melek huruf di BPS didefinisikan bisa membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulis. Orang yang bisa menulis tentu bisa membaca. Orang yang bisa membaca belum tentu bisa menulis. Sementara Konsep internasional, melek huruf (*Adult Literacy Rate*) adalah bisa membaca, menulis dan mengerti apa yang dibaca minimal kalimat sederhana yang ada dalam kehidupan sehari-hari, serta mencakup bisa melakukan penghitungan sederhana.

Provinsi Jawa Tengah

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh narasumber setuju dengan konsep melek huruf dari BPS. Orang sudah bisa dikatakan melek huruf tidak perlu harus mengerti atau memahami apa yang dibaca. Alasannya karena melek huruf merupakan indikator dasar pendidikan. Baik atau buruk pendidikan di suatu daerah pertama kali dilihat dari indikator ini. Jika "harus mengerti" dimasukkan dalam konsep ini, maka angka melek huruf menjadi sangat rendah sehingga dapat menurunkan peringkat daerah tersebut pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan dampak secara nasional dapat menghambat target Pencapaian Pembangunan Milenium (MDGs).

Konsep "mengerti" suatu saat dapat ditambahkan apabila negara sudah terbebas dari buta huruf. Menurut Pak Jasman, jika kaitannya berhubungan dengan IPM, indikator yang digunakan cukup indikator dasar saja. Pada tahun 2008 angka melek huruf di Jawa Tengah mencapai sekitar 96 persen, sehingga target bebas buta huruf kira-kira pada tahun 2013. Kegiatan Dinas pendidikan bekerjasama dengan LSM saat ini masih dalam tahap pemberantasan buta huruf yang lebih difokuskan pada penduduk berumur muda, untuk mengantisipasi munculnya buta huruf usia muda. Usia penduduk yang buta huruf di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 sudah lebih dari 45 tahun. Namun pemberantasan terhadap penduduk usia 45 tahun agak tersendat dilakukan. Rata-rata mereka dari kalangan penduduk miskin yang hanya memikirkan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga tidak ada kemauan untuk belajar lagi. Justru petugas yang mengejar mereka untuk belajar. Oleh karena itu dana pemberantasan milyaran rupiah untuk pemberantasan hasilnya kurang memuaskan. Namun demikian mereka bukan ancaman, seiring bertambahnya usia secara alamiah mereka akan berkurang dengan sendirinya.

Menurut narasumber Dinas Pendidikan, huruf "lainnya" dalam konsep melek huruf bisa meliputi huruf daerah atau huruf etnis bangsa lain seperti Arab, China, dan lainnya. Akan tetapi yang diutamakan pada bahasa daerah setempat. Sebagai contoh, di Jawa Tengah lebih diutamakan yang bisa membaca dan menulis huruf Jawa. Mereka juga menambahkan, kemampuan membaca dan menulis mencakup kemampuan berhitung, karena indikator yang dihitung pertama kali adalah membaca, menulis, dan berhitung (calistung). Menurut beliau, sebelum dapat membaca dan menulis, biasanya orang akan terlebih dahulu bisa berhitung.

Narasumber dari UNES berpendapat lain tentang konsep melek huruf. Orang dianggap melek huruf jika bisa membaca dan menulis huruf latin (standar nasional dan internasional). Kategori melek huruf adalah dapat membaca dan menulis, termasuk berhitung (calistung). Seseorang dianggap sudah mahir berhitung jika sudah lulus pada tahap pemberantasan buta huruf tahap pembinaan atau mendapat SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara) II, setara kelas 2 SD. Pada tingkat tersebut, seseorang diharapkan sudah paham arti tanda jumlah (+), pengurangan (-), dan perkalian (x), serta dapat mengerti hitungan sampai angka 100. Huruf lainnya hanya sebagai tambahan, sehingga orang yang hanya mampu membaca dan menulis huruf lainnya tanpa latin, belum dianggap melek huruf.

Melek huruf merupakan indikator yang sangat penting, karena semakin tinggi tingkat melek huruf suatu bangsa maka semakin tinggi persepsi pembangunan pendidikan di negara tersebut. Konsep melek huruf harus menambahkan "mengerti atau memahami" apa yang dibaca atau ditulisnya. Tujuan pemberantasan buta aksarapun jelas-jelas terpampang yaitu agar warga belajar dapat memfungsikan hasil pembelajaran bagi kehidupan mereka sehingga harus memahami apa yang dibaca dan ditulisnya. Data mengenai melek huruf seharusnya mengarah kepada kualitas, bukan sekedar memenuhi kepentingan politis dengan hanya memperhatikan kuantitas.

3.2 Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APTS) dihitung di BPS dengan cara membagi penduduk yang putus sekolah dengan jumlah penduduk yang pernah/sedang bersekolah (masih bersekolah, putus sekolah dan tamat sekolah). Adapun konsep putus sekolah tersebut adalah penduduk yang tidak bersekolah lagi dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki tidak sampai tamat. Tamat di SD adalah kelas 6, tamat di SMP adalah kelas 3, dan tamat di SMA adalah kelas 3, sedangkan Perguruan Tinggi sesuai dengan jenjangnya. Sementara konsep internasional mengistilahkan APTS dengan *Drop out rate*, yaitu persentase murid dari suatu kohort dengan jenjang pendidikan tertentu yang tidak lagi mengikuti pendidikan pada jenjang tersebut. Namun konsep ini tidak bisa dihitung secara langsung di BPS mengingat adanya kesulitan dalam menganalisis kohort tersebut dari waktu ke waktu. Sehingga penghitungannya dilakukan dengan cara yang disebutkan di atas.

Untuk memenuhi indikator peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan, Dinas Pendidikan selama ini juga menghitung Angka Putus Sekolah (APS). Konsep Putus Sekolah sama saja dengan konsep BPS, hanya saja pembandingnya jumlah siswa pada tahun sebelumnya. Angka Putus Sekolah dihitung dengan rumus ;

$$\text{APS} = \frac{\text{Jumlah putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah siswa pada tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan tertentu}}$$

Ada perbedaan pendekatan pada data yang digunakan untuk menghitung Angka Putus Sekolah dari BPS dan Dinas Pendidikan. Angka Putus Sekolah dari BPS berasal dari data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) dengan unit penelitian rumah tangga. Sedangkan dari Dinas Pendidikan menggunakan pendekatan sekolah. Hal ini berlaku juga pada penghitungan Angka Partisipasi Murni dan rata-rata lama belajar.

3.3 Rata-Rata Lama Sekolah

Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan konsep BPS, rata-rata lama sekolah dihitung dari berapa lama seseorang individu berumur 15 tahun ke atas menjalani masa pendidikan formal, dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Sedangkan konsep internasional menggunakan istilah SLE (*School life expectancy*), yaitu lamanya jumlah tahun sekolah seorang anak pada umur tertentu. Atau dapat diartikan lamanya seorang anak akan menempuh suatu pendidikan dihitung dari mulai anak tersebut berpartisipasi sekolah. Namun konsep ini tidak bisa dihitung secara langsung di Indonesia mengingat adanya kesulitan dalam menganalisis kohort tersebut dari waktu ke waktu. Sehingga penghitungannya dilakukan dengan cara yang disebutkan di atas.

Batasan 15 tahun ini sudah dianggap memadai oleh narasumber dari Dinas Pendidikan, karena target wajib belajar 15 tahun, meskipun idealnya menggunakan kohort. Beliau mengusulkan seandainya rata-rata lama sekolah dihitung dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), karena APK PAUD juga dihitung. Tujuannya untuk melihat layanan anak di usia dini. Beliau menganggap usia 0-6 tahun adalah waktu yang cukup bagus dalam perkembangan pendidikan anak (konsep *golden age*). Pendidikan non formal juga perlu dimasukkan dalam penghitungan rata-rata lama sekolah, namun hanya sebatas kesetaraan Paket A dan Paket B. Beliau tidak menyarankan pendidikan informal dihitung dalam rata-rata lama sekolah.

Sebagaimana narasumber dari Dinas Pendidikan, responden dari UNES juga tidak memperlakukan batasan usia 15 tahun ke atas pada penghitungan rata-rata lama sekolah. Mereka juga menyarankan untuk menambahkan pendidikan non formal dalam penghitungan, seperti kursus atau pelatihan yang menunjang pendidikan formal seseorang. Contoh : Seseorang telah melalui pendidikan formal dari SD hingga sarjana selama 16 tahun, sementara dia juga kursus bahasa Inggris selama 3 tahun, sehingga rata-rata lama sekolahnya 19 tahun.

Untuk memenuhi indikator penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik (efisiensi internal pendidikan), Kementerian Pendidikan Nasional sudah memiliki indikator yang mirip dengan Rata-Rata Lama Sekolah, yaitu Rata-Rata Lama Belajar (RLBL). Rata-rata lama belajar diperoleh dengan menggunakan kohort dari 1000 siswa. Seribu siswa ini diikuti perkembangannya dari tingkat I sampai lulus dan mereka diasumsikan boleh mengulang maksimum 2 kali.

Contoh Rata-Rata Lama Belajar lulusan SD (RLBLsd) =

$$\frac{\text{Jumlah (lulusan I x 6) + (lulusan II x 7) + (lulusan III x 8)}}{\text{Jumlah (lulusan I) + (lulusan II) + (lulusan III)}}$$

$$\text{Jumlah (lulusan I) + (lulusan II) + (lulusan III)}$$

Contoh Rata-Rata Lama Belajar lulusan SMP/SM (RLBLsmp/sm) =

Jumlah (lulusan I x 3) + (lulusan II x 4) (lulusan II x 5)

Jumlah (lulusan I) + (lulusan II) + (lulusan III)

Namun Dinas Pendidikan Jawa Tengah belum menghitung indikator ini.

3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Rumus APM dihitung dari penduduk yang masih sekolah pada tingkat pendidikan tertentu dengan umur sesuai jenjang pendidikan tersebut dibagi dengan jumlah penduduk pada umur tersebut. Sedangkan APS dihitung dari penduduk yang masih sekolah pada tingkat pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur dengan pembagi sama seperti APM. Contoh; APM SD dihitung dengan cara membagi penduduk yang masih sekolah SD umur 7-12 tahun dengan jumlah penduduk umur 7-12 tahun, demikian juga dengan SMP 13-15 tahun dan SMA 16-18 tahun. Konsep internasional hampir sama dengan BPS namun kelompok umur tergantung kebijakan di negara masing-masing.

Pendapat narasumber Dinas Pendidikan dan UNES sama dalam hal pembagian kelompok umur untuk penghitungan APM. Menurut mereka, pembagian kelompok APM sudah sesuai dengan undang-undang PP 47 tahun 2007 Wajardikdas Impres tahun 2005. Pembagian umur tersebut sudah mengikuti konsep peka, karena secara psikologis tingkat kesiapan dalam menerima konsep-konsep kognitif adalah umur 7 tahun. Beberapa kegiatan akselerasi terhadap siswa yang dianggap mampu secara akademik hanya memaksakan tahapan-tahapan normal yang seharusnya dilalui oleh siswa. Sehingga siswa kehilangan masa yang seharusnya dilewati dan secara psikologis belum siap, akibatnya matang sebelum waktunya.

Saat ini sudah banyak murid SD kelas 1 masih berusia kurang dari 7 tahun. Namun fenomena ini banyak dijumpai di daerah perkotaan, sehingga penghitungan angka partisipasi masih tetap mengacu pada umur 7-12 tahun. Wacana penghitungan mengarah pada usia kurang dari 7 tahun tetap ada, namun wacana tersebut dapat terealisasi jika sudah tidak ditemukan lagi murid SD kelas 1 usia 7 tahun atau lebih. Hal ini berarti kesadaran masyarakat terhadap pendidikan sudah sangat tinggi.

Selama ini penghitungan APM level universitas di BPS menggunakan kelompok umur 19-24 tahun, karena jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Pendidikan di level universitas tidak terikat oleh usia, oleh sebab itu responden narasumber dari UNES menyarankan agar penghitungan di level universitas dibuka saja, yaitu usia 19 tahun lebih.

4 KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN SARAN

- Pengumpulan dan pengolahan data pendidikan oleh Dinas Pendidikan dilakukan di tingkat Kabupaten, diteruskan ke tingkat provinsi dan pusat.
- Penghitungan indikator pendidikan dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan pusat.
- Kendala yang sering dihadapi dalam pengumpulan data adalah faktor keterlambatan pengembalian instrumen, sedangkan kendala pengolahan data lebih kepada kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya pengetahuan personil yang mengolah data.
- Narasumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah setuju dengan konsep melek huruf dari BPS. Orang sudah bisa dikatakan melek huruf tidak perlu harus mengerti atau memahami apa yang dibaca. Kemampuan membaca dan menulis juga mencakup kemampuan berhitung. Konsep "mengerti" suatu saat dapat ditambahkan apabila negara sudah terbebas dari buta huruf. Huruf "lainnya" dalam konsep melek huruf bisa meliputi huruf daerah atau huruf etnis bangsa lain seperti Arab, China, dan lainnya. Akan tetapi yang lebih diutamakan pada bahasa daerah setempat.
- Narasumber dari UNES berpendapat lain tentang konsep melek huruf. Orang dianggap melek huruf jika bisa membaca dan menulis huruf latin (standar nasional dan internasional) termasuk berhitung (calistung), sehingga orang yang hanya mampu membaca dan menulis huruf lainnya tanpa latin, belum dianggap melek huruf. Konsep melek huruf juga harus menambahkan "mengerti atau memahami" apa yang dibaca atau ditulisnya.
- Untuk memenuhi indikator peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan, Dinas Pendidikan selama ini juga menghitung Angka Putus Sekolah (APS) yang dihitung dengan rumus;

$$APS = \frac{\text{Jumlah putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah siswa pada tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan tertentu}}$$

- Data yang digunakan untuk menghitung Angka Putus Sekolah, Angka Partisipasi Murni, dan Angka Partisipasi Kasar dari BPS berasal dari Survei Sosial Ekonomi (Susenas) dengan unit penelitian rumah tangga. Sedangkan dari Dinas Pendidikan menggunakan pendekatan sekolah. Hal ini berlaku juga pada penghitungan Rata-rata lama sekolah (BPS) dan rata-rata lama belajar (Dinas Pendidikan).
- Narasumber Dinas Pendidikan menyarankan agar rata-rata lama sekolah dihitung dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), karena APK PAUD juga dihitung. Tujuannya

untuk melihat layanan anak di usia dini, karena usia 0-6 tahun adalah waktu yang cukup bagus dalam perkembangan pendidikan anak (konsep *golden age*).

- Pendidikan non formal menurut narasumber dari Dinas Pendidikan maupun dari UNES perlu ditambahkan dalam penghitungan rata-rata lama sekolah. Namun dari Dinas Pendidikan, pendidikan non formal hanya sebatas kesetaraan Paket A dan Paket B, sedangkan menurut narasumber dari UNES pendidikan non formal contohnya seperti kursus atau pelatihan yang menunjang pendidikan formal seseorang.
- Narasumber dari UNES menyarankan agar penghitungan APM di level universitas dibuka saja karena tidak terikat oleh usia, yaitu usia 19 tahun lebih.
- Ada saran dari narasumber UNES untuk pendidikan di tingkat SD. Disamping rasio murid dan guru, di tingkat SD perlu dihitung rasio guru dan rombongan belajar dan dihitung per jenjang. Tujuannya untuk mengetahui penyebaran guru bidang studi.

<https://www.bps.go.id>

DI YOGYAKARTA

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Data sangatlah diperlukan guna mendukung pembangunan, karena data memberikan arah terhadap pembangunan sekaligus menunjukkan hasil pembangunan. Pembangunan paling utama adalah pembangunan manusia disamping pembangunan infrastruktur, karena manusia adalah objek sekaligus pelaku dalam pembangunan. Untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dicapai oleh suatu wilayah pada waktu tertentu di perlukan suatu indikator. Indikator komposit yang dapat mengukur pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia yang menggambarkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Dua dari empat komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia menggunakan indikator pendidikan, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menunjukkan lamanya pendidikan yang telah/sedang di tempuh oleh penduduk suatu wilayah, semakin tinggi rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di wilayah tersebut semakin baik, sedangkan angka melek huruf digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan pendidikan dasar dan program pemberantasan buta huruf untuk meningkatkan kemampuan penduduk dalam berkomunikasi menggunakan bahasa tulisan, hal tersebut merupakan dasar bagi perkembangan intelektualitas yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan budaya penduduk. Indikator pendidikan lain yang sangat penting adalah angka putus sekolah dan angka partisipasi sekolah, baik angka partisipasi kasar maupun angka partisipasi murni. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk melihat perluasan akses dan pemerataan pendidikan.

Indikator pendidikan tersebut selama ini telah dihitung oleh Kementerian Pendidikan Nasional maupun Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun sumber data, metode dan cara penghitungannya berbeda. Konsep yang telah dikembangkan BPS dalam mengukur indikator tersebut memiliki berbagai keterbatasan sebagai akibat dari kelemahan metode, maupun cara pengukuran yang kurang tepat (reliable) dalam melakukan pendekatan pengukuran terhadap indikator yang sesungguhnya ingin diukur.

Oleh sebab itu perlu dilakukan studi mendalam untuk memperbaiki metode atau cara pengukuran yang telah dilakukan BPS tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan dan konsultasi dengan orang yang kompeten. Konsultasi dengan pihak Dinas Pendidikan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai perbedaan konsep, sumber data dan metode penghitungan suatu

indikator. Sedangkan konsultasi dengan orang yang kompeten bertujuan untuk memperoleh masukan yang berarti untuk perbaikan pengukuran indikator yang dilakukan oleh BPS mendatang. Di samping itu, dengan adanya studi mendalam dapat diperoleh masukan mengenai pengukuran indikator baru.

DI Yogyakarta dipilih sebagai salah satu tempat dilakukannya studi mendalam. Hal ini disebabkan karena DI Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki pencapaian pembangunan pendidikan yang paling baik diantara provinsi lainnya. Di samping itu Kota Yogyakarta dijuluki sebagai Kota Pendidikan juga menjadikan alasan DI Yogyakarta terpilih dalam studi mendalam ini.

1.2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam studi mendalam ini antara lain:

1. mengumpulkan indikator-indikator pendidikan yang tersedia di Dinas Pendidikan di Propinsi DI Yogyakarta
2. mencari indikator baru yang dapat dijadikan sebagai indikator kunci pembangunan dalam bidang pendidikan
3. mengetahui kendala yang dihadapi untuk membangun suatu indikator di Dinas Pendidikan di Propinsi DI Yogyakarta
4. mengetahui alur/mechanisme pengumpulan data dari sekolah hingga Dinas Pendidikan
5. mendapatkan masukan dalam rangka perbaikan konsep-konsep indikator pendidikan yang dihitung oleh BPS sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang

1.3. Ruang Lingkup

Instansi yang dikunjungi dalam studi mendalam ini antara lain Dinas Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Pemilihan UNY sebagai tempat tujuan studi mendalam karena UNY merupakan salah satu universitas negeri terbesar di Yogyakarta dan memiliki peranan besar dalam pengembangan pendidikan.

Beberapa nara sumber yang ditemui antara lain:

1. Kuncoro (Seksi Data dan Teknologi Informasi - Bidang Bina Program, Dinas Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta)
2. Dra. Sumirah, M.Pd (Seksi Kesetaraan - Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal, Dinas Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta)

3. Prof Dr. Anik Ghufron, M.Pd. Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Metode yang digunakan dalam memperoleh informasi dari nara sumber adalah metode wawancara, sedangkan instrumen yang digunakan diantaranya kuesioner dan alat perekam. Adapun informasi yang ingin didapatkan diantaranya mengenai mekanisme alur data, ketersediaan data dan indikator serta pendapat mengenai konsep indikator yang dihitung oleh BPS.

2. Proses Pengumpulan Data Pendidikan di Dinas Pendidikan

2.1. Ketersediaan Data dan Indikator

Data dasar yang dikumpulkan Dinas Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta sebagai dasar penghitungan indikator antara lain:

1. Tingkat Taman Kanak-Kanak (TK)
Jumlah Taman Kanak-Kanak, Siswa, Lulusan, Guru, Kelas (Rombongan Belajar), dan Ruang Kelas
2. Tingkat Sekolah Dasar (SD)
 - a. Jumlah sekolah, siswa baru tingkat I, siswa keseluruhan, kelas (rombongan belajar), dan rata-rata nilai UAS
 - b. Jumlah lulusan, siswa mengulang, siswa putus sekolah, dan siswa tingkat VI
 - c. Jumlah guru menurut ijazah tertinggi
 - d. Jumlah ruang kelas menurut kondisi dan fasilitas
 - e. Jumlah dana menurut sumber
3. Tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI)
 - a. Jumlah madrasah, siswa baru tingkat I, siswa keseluruhan, kelas (rombongan belajar), dan rata-rata nilai UAS
 - b. Jumlah lulusan, siswa mengulang dan siswa putus sekolah
 - c. Jumlah guru menurut ijazah tertinggi
 - d. Jumlah ruang kelas menurut kondisi dan fasilitas
 - e. Jumlah dana menurut sumber
4. Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- a. Jumlah sekolah, siswa baru tingkat I, siswa, kelas (rombongan belajar), dan rata-rata nilai UAN
 - b. Jumlah lulusan, siswa keseluruhan, siswa mengulang dan siswa putus sekolah
 - c. Jumlah guru menurut ijazah tertinggi
 - d. Jumlah guru menurut latar belakang program studi
 - e. Jumlah guru menurut bidang studi yang diajarkan
 - f. Jumlah ruang kelas menurut kondisi, dan fasilitas
 - g. Jumlah dana menurut sumber
5. Tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs)
- a. Jumlah madrasah, siswa keseluruhan, siswa baru tingkat I, dan rata-rata nilai UAN
 - b. Jumlah lulusan, siswa mengulang dan siswa putus sekolah
 - c. Jumlah guru menurut ijazah tertinggi
 - d. Jumlah ruang kelas menurut kondisi dan fasilitas
 - e. Jumlah dana menurut sumber
6. Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)
- a. Jumlah sekolah, siswa baru tingkat I, siswa keseluruhan, kelas (rombel), dan rata-rata nilai UAN
 - b. Jumlah lulusan, siswa mengulang dan siswa putus sekolah
 - c. Jumlah guru menurut ijazah tertinggi
 - d. Jumlah guru menurut latar belakang program studi
 - e. Jumlah guru menurut bidang studi yang diajarkan
 - f. Jumlah ruang kelas menurut kondisi dan fasilitas
 - g. Jumlah dana menurut sumber
 - h. Jumlah siswa menurut jurusan dan sistem penjurusan
7. Tingkat Madrasah Aliyah (MA)
- a. Jumlah madrasah, siswa keseluruhan, siswa baru tingkat I, dan rata-rata nilai UAN

- b. Jumlah lulusan, siswa mengulang, siswa putus sekolah, dan siswa tingkat III
- c. Jumlah guru menurut ijazah tertinggi
- d. Jumlah ruang kelas menurut kondisi dan fasilitas
- e. Jumlah dana menurut sumber

8. Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

- a. Jumlah sekolah, siswa baru tingkat I, siswa menurut jenis kelamin, siswa menurut umur, dan rata-rata UAN
- b. Jumlah lulusan, siswa mengulang dan siswa putus sekolah
- c. Jumlah guru menurut ijazah tertinggi
- d. Jumlah ruang kelas menurut kondisi dan fasilitas
- e. Jumlah dana menurut sumber
- f. Jumlah pelaksanaan program sistem ganda, jumlah siswa dan lulusan menurut kelompok program studi

9. Program Paket

Program Paket A, Paket B dan Paket C

Selain data mengenai pendidikan formal, Dinas Pendidikan DI Yogyakarta melalui Seksi Pendidikan Masyarakat (Dikmas) mengumpulkan data mengenai lembaga kursus dan Bimbingan Belajar (Bimbel), Taman Bacaan, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), dll.

Berdasarkan data dasar yang dikumpulkan di atas maka beberapa indikator yang dibangun oleh Dinas Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta dapat terbagi ke dalam 4 Kelompok, antara lain:

1. Indikator Pemerataan

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan
- b. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan
- c. Perbandingan sekolah antar jenjang pendidikan
- d. Rasio pendidikan menurut jenjang pendidikan (Siswa/Sekolah, Siswa/Kelas, Siswa/Guru, Kelas/RKM, Kelas/Guru)
- e. Angka Penyerapan Kasar (ASK) TK dan SD,
- f. Angka Melanjutkan (AM) Ke tingkat SMP dan SM

- g. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) tingkat SD, SMP dan SM
- h. Hubungan antara Angka Partisipasi dengan keadaan sekolah dan daerah (persentase desa terpencil, kepadatan penduduk dan tingkat kesulitan menuju sekolah)

2. Indikator Mutu

- a. Persentase asal siswa SD dan MI menurut jenis pendidikan
- b. Rata-rata UAS/UAN menurut jenis pendidikan
- c. Angka mengulang, putus sekolah dan lulusan menurut jenjang pendidikan
- d. Persentase guru menurut kelayakan mengajar
- e. Kesesuaian mengajar guru SMP/SMA dengan jurusan ijazah
- f. Persentase guru SMP dan SMA menurut bidang studi yang diajarkan
- g. Persentase ruang kelas menurut kondisi
- h. Persentase ketersediaan fasilitas
- i. Kekurangan/kelebihan fasilitas
- j. Kontribusi biaya pendidikan pemerintah pusat, pemda, dan orangtua serta satuan biayanya

3. Indikator Relevansi

- a. Persentase siswa SMA menurut jurusan dan kriteria penjurusan
- b. Persentase SMK yang melaksanakan sistem ganda dan siswa SMK menurut kelompok/rumpun

4. Indikator Efisiensi Internal Pendidikan

- a. Indikator efisiensi internal sekolah
- b. Siswa bertahan dan putus sekolah per 1.000 siswa menurut jenjang pendidikan
- c. Hubungan tahun siswa terbuang dengan biaya pendidikan

2.2. Mekanisme Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan oleh Dinas Pendidikan DI Yogyakarta baik pada tingkat SD/MI, SMP, SMA/SMK maupun SLB dilakukan secara rutin setiap akhir tahun. Adapun penanggungjawab pengumpulan dan pengolahan data tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang melakukan imputasi data secara komputerisasi dengan menggunakan program Profil04 yang merupakan aplikasi

MS Excel 1997. Sedangkan untuk SLB penanggung jawab/pengolah data ditangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Instrumen yang digunakan untuk registrasi tersebut berupa kuesioner terstruktur dengan format baku yang berasal dari Kementerian Pendidikan Nasional. Kuesioner tersebut diisi dan ditandatangani oleh masing-masing kepala sekolah. Dengan demikian alur pengumpulan datanya dimulai dari sekolah kemudian dikumpulkan ke dinas kecamatan, setelah terkumpul maka di entry di dinas kabupaten/kota hingga akhirnya sampai di dinas provinsi dan nasional.

Pengumpulan data lain dapat berupa survei khusus atau pendataan secara sensus. Namun kegiatan tersebut tidak dilakukan secara rutin. Misalnya untuk menghitung Angka Buta Huruf, Dinas Pendidikan melakukan pendataan dibawah pengawasan Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI). Pendataan tersebut dilakukan oleh TLD (Tenaga Lapangan Dinas) yaitu ketua RT yang mendata seluruharganya. Survei lain diantaranya Survei Keaksaraan Fungsional (KF), di bawah unit kerja yang bersangkutan.

2.3. Kendala yang Dihadapi dalam Pengumpulan Data dan Penghitungan Indikator

Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan data relatif tidak ditemui, hanya saja terkadang pengkoordinasiannya memakan waktu cukup lama. Tidak semua sekolah memberikan data pada batas waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan kendala dalam hal survei khusus antara lain masalah dana, sehingga tidak dapat dilakukan secara rutin.

Adapun kendala dalam penghitungan indikator adalah keterbatasan dalam pengembangannya karena selama ini indikator yang dihitung mengacu pada apa yang dibuat oleh Pusat (dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Nasional), sehingga indikator lain tidak dihitung. Jikalau dilakukan penghitungan indikator lain, itu hanya terbatas pada ada tidaknya permintaan khusus.

3. Konsep Indikator Pendidikan

3.1. Angka Melek Huruf dan Angka Buta Huruf

Menurut Kepala Seksi Kesetaraan Dirjen PNFI, konsep melek huruf yang digunakan di Dinas Pendidikan DI Yogyakarta tidak terlepas dari konsep yang dikembangkan oleh Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional yang mengacu pada konsep keaksaraan yang bermakna kepemilikan kemampuan beraksara yang meliputi membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia secara fungsional yang memungkinkan seseorang untuk secara terus menerus mengembangkan kompetensinya sehingga dapat meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya. Adapun konsep membaca adalah melafalkan kata, kalimat, wacana dan lambang bilangan yang tersurat dengan menggunakan huruf Latin dan angka Arab, baik dengan suara nyaring atau dalam hati sehingga dapat difahami maknanya. Menulis adalah kegiatan menuangkan fikiran dan gagasan secara tersurat dalam bentuk rangkaian kata-kata yang membentuk kalimat dan wacana yang memiliki makna. Berhitung adalah operasi hitung yang terdiri atas

mencacah, mengurutkan, menjumlahkan, mengurangi, mengkali dan membagi bilangan yang nominalnya tidak lebih dari tiga angka.

Untuk mengetahui seseorang memiliki kompetensi keaksaraan, dapat dilihat dari indikator keaksaraan yang terbagi dalam tiga tingkatan kompetensi keaksaraan, yaitu:

1. Tingkat dasar, dengan ciri-ciri mempunyai kemampuan dalam hal:
 - a. Membaca
 - 1) Mampu membaca kalimat sederhana (terdiri dari atas subjek, predikat dan objek) dengan menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia
 - 2) Mampu membaca dan memahami petunjuk sederhana/pendek dengan menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia
 - 3) Mampu membaca angka 1 sampai 100 dengan menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia
 - b. Menulis
 - 1) Mampu menulis kalimat sederhana (terdiri dari atas subjek, predikat, objek) dengan menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia
 - 2) Mampu menulis identitas diri dan alamat
 - 3) Mampu menulis angka 1 sampai 100
 - c. Berhitung
 - 1) Mengenal angka 1 sampai 100
 - 2) Mampu melakukan perhitungan penjumlahan dan pengurangan sekurang-kurangnya angka 1-100
 - 3) Mengenal satuan waktu
 - d. Berkomunikasi

Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara lisan
2. Tingkat lanjut, dengan ciri-ciri mempunyai kemampuan:
 - a. Membaca
 - 1) Mampu membaca kalimat dalam 1 paragraf dengan menggunakan bahasa Indonesia

- 2) Mampu membaca dan memahami berita/tulisan sederhana/pendek dalam koran, majalah atau selebaran yang menggunakan bahasa Indonesia
 - 3) Mampu membaca petunjuk, resep masakan, dan label aturan pemakaian obat
- b. Menulis
- 1) Mampu menulis kalimat dalam 1 paragraf dengan menggunakan bahasa Indonesia
 - 2) Mampu mengisi daftar isian/formulir sederhana
 - 3) Mampu menulis surat pemberitahuan
 - 4) Mampu menulis cerita dalam satu alinea/paragraf yang terdiri atas 3-5 kalimat
 - 5) Mampu menulis angka 101-1.000
- c. Berhitung
- 1) Mampu melakukan perhitungan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian angka 101-1.000
 - 2) Mengenal satuan waktu dan menggunakannya dalam pemecahan masalah sehari-hari
 - 3) Mengenal jenis-jenis ukuran berat dan panjang, melakukan pengukuran panjang dan berat
- d. Berkomunikasi
- Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia secara tertulis
3. Tingkat mandiri, dengan ciri-ciri mempunyai kemampuan:
- a. Membaca
- 1) Mampu membaca dan memahami karangan atau cerita pendek
 - 2) Mampu membaca dan memahami isi bacaan dalam majalah, koran atau selebaran
 - 3) Mampu membaca tabel, garis waktu, grafik, bagan, atau denah peta
- b. Menulis
- 1) Mampu menulis cerita dan pengalaman pribadi
 - 2) Mampu menulis surat permohonan/ Pernyataan/keterangan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari

- 3) Mampu menulis kembali proses dan hasil kegiatan
 - 4) Mampu menulis angka 1.000-10.000
- c. Berhitung
- 1) Mampu menjumlah, mengurangi, mengalikan dan membagi bilangan ratusan, ribuan, puluhan ribu atau lebih
 - 2) Mengenal bilangan pecahan sederhana dan menggungkannya dalam pemecahan masalah sehari-hari
 - 3) Mampu menggunakan penghitungan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian dalam kegiatan ekonomi sehari-hari
 - 4) Mampu menentukan keliling dan luas bidang datar
 - 5) Menggunakan satuan isi dalam kehidupan sehari-hari
- d. Berkomunikasi
- 1) Mampu menyampaikan dan menanggapi pendapat lisan dan tulisan dalam kalimat bahasa Indonesia yang benar
 - 2) Mampu menyampaikan dan menanggapi informasi atau pendapat lisan menggunakan alat komunikasi.

Berdasarkan standarisasi kemampuan keaksaraan tersebut, maka penduduk yang buta aksara adalah penduduk yang tidak memiliki kemampuan kompetensi keaksaraan pada tingkat dasar. Sehingga bila dibandingkan dengan konsep BPS, dari segi huruf, yang dicakup hanya huruf latin dan angka arab. Dari segi kemampuan, berhitung dan berkomunikasi juga menjadi syarat seseorang dikategorikan buta aksara atau tidak, dengan kata lain tidak hanya mencakup mampu membaca dan menulis saja. Dari segi makna, pemahaman akan apa yang baca juga harus masuk dalam syarat. Pemahaman tersebut batasannya hanya berupa petunjuk sederhana/pendek dalam bahasa daerah atau bahasa Indonesia.

Perbedaan terminologi yang digunakan BPS maupun Dinas Pendidikan menyebabkan adanya perbedaan angka buta aksara di DI Yogyakarta. Menurut pendapat Kepala Seksi Kesetaraan dirjen PNFI Dinas Pendidikan DI Yogyakarta, jika terminologi melek huruf BPS lebih luas dari Dinas Pendidikan maka seharusnya angka buta huruf BPS lebih rendah dari angka buta aksara yang dihitung Dinas Pendidikan, namun kenyataannya angka buta huruf yang dihitung BPS justru lebih tinggi.

Pada tahun 2006, jumlah buta aksara menurut BPS ada sekitar 217.262 orang (tanpa Kabupaten Bantul), sedangkan menurut hasil pencacahan TLD (Tenaga Lapangan Dinas) buta aksara pada tahun tersebut ada sebanyak 103.141 orang. Pengumpulan data buta aksara oleh Dinas Pendidikan tersebut dilakukan dengan cara sensus dengan

menggunakan tenaga RT sebagai petugas pencacah, dengan asumsi bahwa ketua RT adalah orang yang mengetahui keadaan penduduk di wilayahnya.

Indikator Angka Melek Huruf (yang diistilahkan oleh BPS) atau persentase penduduk yang memiliki kemampuan keaksaraan dalam istilah Dinas Pendidikan, merupakan indikator yang penting dalam pencapaian pembangunan pendidikan, karena kemampuan keaksaraan merupakan prasyarat untuk memperoleh berbagai kemampuan dasar belajar agar siapapun dapat mencari, memperoleh, menggunakan dan mengelola informasi untuk meningkatkan mutu hidupnya.

Sedangkan menurut pendapat Prof Dr. Anik Ghufron, M.Pd. Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), konsep melek huruf dilihat dari segi huruf, sebaiknya huruf yang umum digunakan yaitu huruf Latin. Kalaupun ada penduduk yang mampu membaca huruf lain, seperti huruf Jawa, maka artinya orang tersebut memiliki kemampuan lebih saja. Sehingga yang utama adalah huruf Latin (yang digunakan dalam Bahasa Indonesia). Dalam hal kemampuan lain, seperti berhitung, seandainya dimasukkan dalam syarat melek huruf, maka harus ada batasannya misalnya mampu berhitung 1-10, atau mampu mengkalkulasi uang, karena menghitung uang adalah hal yang umum dan paling banyak diketahui oleh orang pada umumnya. Sedangkan syarat akan adanya pemahaman mengenai apa yang dibaca atau yang ditulis, tidak diperlukan, kecuali menyangkut hal-hal yang umum dan paling sederhana.

3.2. Angka Putus Sekolah

Di Departemen Pendidikan, Angka Putus Sekolah disingkat dengan APS, sedangkan di BPS disingkat APTS. Tidak terdapat perbedaan mengenai konsep Angka Putus Sekolah yang di hitung oleh BPS maupun Departemen Pendidikan, konsep tersebut adalah persentase siswa/murid dengan jenjang pendidikan tertentu yang tidak lagi mengikuti pendidikan pada jenjang tersebut. Namun perbedaannya adalah sumber data dan unit analisis yang digunakan. Jika BPS menghitungnya berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional dengan pendekatan rumah tangga dan unit observasinya adalah anggota rumah tangga yang bersangkutan. Maka Dinas Pendidikan menghitung Angka Putus Sekolah melalui hasil registrasi dengan pendekatan sekolah dan unit observasinya adalah siswa yang bersekolah di sekolah yang bersangkutan. Angka Putus Sekolah yang dihitung oleh Kementerian Pendidikan menggunakan rumus:

$$APS = \frac{\text{Jumlah siswa putus sekolah}}{\text{Jumlah Siswa pada tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan tertentu}} \times 100$$

Dengan demikian, jika pada tahun ajaran 2008/2009 terdapat 8 siswa SD yang putus sekolah dan jumlah total siswa SD pada tahun ajaran 2007/2008 ada sebanyak 3200 siswa, maka angka putus sekolah (APS) bernilai 0,25 persen.

Di Provinsi DI Yogyakarta, Angka Putus Sekolah tidak disajikan secara khusus dalam sebuah publikasi khusus meskipun indikator tersebut dihitung. Penghitungan indikator tersebut hanya untuk laporan ke Kementerian Pendidikan Nasional.

3.3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator pendidikan yang sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh sebab itu, indikator ini digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari aspek pendidikan. Di BPS, rata-rata lama sekolah dihitung dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) terhadap individu yang berumur 15 tahun ke atas. Untuk menghitung rata-rata lama sekolah, diperlukan beberapa informasi, diantaranya:

1. Partisipasi sekolah
2. Jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah atau sedang diduduki
3. Ijazah tertinggi yang dimiliki
4. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki

Sementara itu, dalam konsep internasional rata-rata lama sekolah menggunakan istilah *School Life Expectancy (SLE)*, yang artinya adalah lama jumlah tahun sekolah seorang anak pada umur tertentu. Atau dapat diartikan lamanya seorang anak akan menempuh suatu pendidikan dihitung dari mulai anak tersebut berpartisipasi sekolah. Namun konsep ini tidak bisa dihitung secara langsung di Indonesia mengingat adanya kesulitan dalam menganalisis kohort tersebut dari waktu ke waktu. Sehingga penghitungannya dilakukan dengan cara yang disebutkan di atas.

Dari segi batasan umur, 15 tahun menunjukkan usia dewasa sehingga sudah tepat jika digunakan sebagai batasan umur. Adapun pendidikan yang dipersyaratkan adalah pendidikan formal, pendidikan non formal tidak disertakan dalam penghitungan. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, indikator ini tidak dihitung, sehingga data yang digunakan adalah data dari BPS.

3.4. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah

Seperti halnya rata-rata lama sekolah, angka partisipasi pendidikan juga merupakan indikator yang sangat penting yang termasuk dalam Indikator Pemerataan Dan Perluasan Akses Pendidikan. Indikator tersebut diantaranya Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Murni Usia Sekolah (APMus). Konsep maupun penghitungan indikator tersebut tidak jauh berbeda dengan BPS, hanya saja istilah untuk APMus di BPS disebut dengan APS. Rumus yang digunakan untuk penghitungan indikator tersebut adalah:

$$\text{APMus} = \frac{\text{Jumlah siswa kelompok usia sekolah di beberapa jenjang pendidikan}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100$$

$$\text{APM} = \frac{\text{Jumlah siswa kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100$$

$$\text{APK} = \frac{\text{Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100$$

Pengelompokkan usia dalam penghitungan angka partisipasi adalah 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Hal tersebut sudah menjadi acuan penghitungan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional sejak lama. Menurut Kuncoro, Seksi Data dan Teknologi Informasi, penentuan batas bawah usia sekolah umur 7 tahun mungkin disesuaikan dengan ilmu psikologi yang menyatakan bahwa pada umur tersebut seorang anak siap menjalani pendidikan formal maupun non formal.

Data APM dan APK disajikan dalam publikasi yang diterbitkan Dinas Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta, yang berjudul: Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DIY, buku tersebut di terbitkan setiap tahun. Data yang disajikan diantaranya APK dan APM pada jenjang pendidikan SD, MI, Paket A, SMP, MTs, SMP terbuka, Paket B, SMA, SMK, MA, dan Paket C. Sedangkan APK dan APMK untuk perguruan tinggi tidak dihitung karena keterbatasan data. Khusus untuk data APMus meskipun sebetulnya dapat dihitung, akan tetapi tidak di sajikan dalam publikasi tersebut.

4. Kesimpulan/Rekomendasi

Berdasarkan hasil studi mendalam, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta tidak mengembangkan ataupun membuat konsep sendiri mengenai pembentukan/penghitungan indikator pendidikan karena semuanya telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
2. Perbedaan konsep melek huruf yang dihitung oleh BPS dan Dinas Pendidikan disebabkan karena konsep Dinas Pendidikan memasukkan kategori kemampuan berhitung dan berkomunikasi sebagai salah satu persyaratan kemampuan penguasaan aksara (melek aksara) dengan konsep yang lebih rinci.
3. Rata-rata lama sekolah tidak dihitung oleh Dinas Pendidikan DI Yogyakarta karena unit analisis yang digunakan adalah siswa yang sedang bersekolah bukan penduduk secara keseluruhan.

Adapun beberapa hal yang direkomendasikan antara lain:

1. Meskipun memiliki konsep yang berbeda, sebaiknya data yang dihasilkan BPS dan Dinas Pendidikan harus sinkron/selaras.
2. Untuk membangun indikator pendidikan yang baru memerlukan pengkajian lebih dalam agar konsep dan metode jelas sehingga hasilnya reliable.

<https://www.bps.go.id>

Profil Indikator Pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kebodohan dan kemiskinan merupakan musuh terbesar dalam setiap upaya pembangunan suatu bangsa. Keduanya saling terkait bagaikan dua sisi mata uang. Kebodohan dapat menjadi sumber kemiskinan, dan kemiskinan dapat menjadi sumber kebodohan. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan di Indonesia diselenggarakan sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang ditetapkan dalam UU No. 20 tahun 2003 sebagai pengganti UU No. 2 tahun 1989 yang tidak memadai lagi.

Kementerian Pendidikan Nasional sebagai instansi yang berwenang dalam bidang pendidikan senantiasa dan selalu melakukan kebijakan-kebijakan yang mengarah kearah pembangunan pendidikan dan perbaikan mutu pendidikan. Telah disusun serangkaian kebijakan meliputi pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; pembinaan pendidikan menengah umum dan kejuruan; pembinaan pendidikan tinggi; pembinaan pendidikan luar sekolah; pembinaan guru dan tenaga kependidikan lainnya; pengembangan kurikulum; pengembangan buku, pembinaan sarana dan prasarana pendidikan; peningkatan peran serta masyarakat termasuk dunia usaha, dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas pendidikan. Kebijakan pemerataan pendidikan dimaksud untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan pembangunan, dan yang dikelola secara efisien. Dengan demikian, program kesempatan belajar akan berhasil jika mutu, relevansi, dan efisiensi ditingkatkan pula pada waktu yang sama. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya.

Secara nasional pembangunan di bidang pendidikan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian sasaran program Millenium Development Goals (MDGs). Target dari agenda MDGs di bidang pendidikan yaitu: penghapusan buta huruf, selain itu pendidikan juga menjadi salah satu aspek dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pendidikan yang digunakan dalam penghitungan IPM adalah rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf (AMH).

BPS selaku instansi yang berwenang dalam pengumpulan data, juga melakukan penghitungan beberapa indikator pendidikan termasuk indikator pendidikan untuk penghitungan IPM. Indikator pendidikan tersebut selama ini telah dihitung pula oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Dari indikator tersebut ternyata terjadi perbedaan dalam konsep, metode dan cara penghitungannya. Karena data yang dikumpulkan oleh BPS melalui survei yaitu Susenas dan pendekatannya adalah rumah tangga sehingga dalam menghitung atau mengukur indikator otomatis tidak tepat dan memiliki keterbatasan.

Untuk mengetahui perbedaan konsep dan metode penghitungan beberapa indikator tersebut dan dapat memperbaiki dalam metode penghitungan serta dapat menggali informasi tambahan dan informasi yang penting maka dilakukan studi mendalam. Sebagai narasumber studi mendalam tersebut adalah dengan mengunjungi Dinas Pendidikan serta dinas/instansi lain yang berhubungan dengan bidang pendidikan di wilayah studi untuk melakukan wawancara dan konsultasi dengan orang-orang yang berkompeten atau orang yang mengetahui dan faham dalam pengumpulan data pendidikan dan dalam penghitungan indikator pendidikan.

Di pilihnya Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu wilayah studi mendalam karena Provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi di luar Jawa yang letaknya di wilayah timur Indonesia namun cukup baik dalam pembangunan di bidang pendidikan. Angka putus sekolah di provinsi ini cukup rendah, begitu pula dengan angka melek huruf untuk penduduk usia 15 tahun keatas di provinsi Sulawesi Utara sangat tinggi sudah diatas 99 persen.

1.2. Tujuan

Tujuan dalam indept studi yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara antara lain:

1. untuk memperoleh dan mengumpulkan data dasar dan indikator-indikator pendidikan apa saja yang sudah dihitung atau yang tersedia di dinas pendidikan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.
2. mencari indikator baru yang dapat dijadikan sebagai indikator kunci pembangunan dalam bidang pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara
3. mengetahui kendala yang dihadapi untuk membangun suatu indikator
4. mengetahui alur/mekanisme pengumpulan data dari sekolah hingga di dinas
5. mendapatkan masukan mengenai konsep-konsep indikator pendidikan yang dihitung oleh Dinas Pendidikan dan perbedaan yang terjadi antara konsep definisi Dinas Kesehatan dengan BPS sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang

1.3. Ruang lingkup (instansi/unit kerja yang dikunjungi, jenis indikator)

Instansi/unit kerja yang dikunjungi sebagai nara sumber pengumpulan data dasar dan indikator Pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara

1. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, meliputi bidang/seksi
 - Bidang Pengolahan data dan informasi, sebagai pusat data dan informasi maka seluruh data dasar dan indikator pendidikan untuk Provinsi Sulawesi Utara dihitung dan diolah di bidang ini

- Bidang FSDP (Fasilitas Sumberdaya Pendidikan)
 - Pendidikan Non Formal dan Informal (salah satu seksinya adalah seksi pendidikan masyarakat (Dikmas))
2. Dinas Pendidikan Kota Manado (Bidang data dan informasi)
 3. LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan)

2. Cara Pengumpulan data Pendidikan

2.1. Indikator pendidikan yang tersedia di wilayah studi

Setiap tahun Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara melalui bidang Data dan Informasi selalu melakukan kegiatan pengumpulan data dasar mengenai pendidikan di tingkat provinsi berdasarkan hasil laporan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dimana data yang dikumpulkan sudah standar ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan hasilnya harus dilaporkan sampai ke Kementerian Pendidikan Nasional. Data dasar yang dikumpulkan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara antara lain:

1. Tingkat Taman Kanak-Kanak (TK)
Jumlah Taman Kanak-Kanak, Siswa, Lulusan, Guru, Kelas (Rombongan Belajar), dan Ruang Kelas
2. Tingkat Sekolah Dasar (SD)
 - a. Jumlah Sekolah, Siswa Baru Tingkat I, Siswa, Kelas (Rombongan Belajar), dan Rata-Rata UAS
 - b. Jumlah Lulus, Siswa, Mengulang, Putus Sekolah, dan Siswa Tingkat VI
 - c. Jumlah Guru menurut Ijazah Tertinggi
 - d. Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi dan Fasilitas
 - e. Jumlah Dana menurut Sumber
3. Tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI)
 - a. Jumlah Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Baru Tingkat I, Siswa, Kelas (Rombongan Belajar), dan Rata-Rata UAS

- b. Jumlah Lulus, Siswa Mengulang dan Putus Sekolah
 - c. Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi
 - d. Jumlah Ruang Kelas menurut Kondisi dan Fasilitas
 - e. Jumlah Dana menurut Sumber
4. Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- a. Jumlah Sekolah, Siswa Baru Tingkat I, Siswa, Kelas (Rombongan Belajar), dan Rata-Rata UAN
 - b. Jumlah Lulus, Siswa, Mengulang dan Putus Sekolah
 - c. Jumlah Guru menurut Ijazah Tertinggi
 - d. Jumlah Guru Latar Belakang Program Studi
 - e. Jumlah Guru menurut Bidang Studi yang Diajarkan
 - f. Jumlah Ruang Kelas menurut Kondisi, dan Fasilitas
 - g. Jumlah Dana menurut Sumber
5. Tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs)
- a. Jumlah Madrasah Tsanawiyah, Siswa, Siswa Baru Tingkat I, dan Rata-Rata UAN
 - b. Jumlah Lulus, Siswa Mengulang dan Putus Sekolah
 - c. Jumlah Guru menurut Ijazah Tertinggi
 - d. Jumlah Ruang Kelas menurut Kondisi dan Fasilitas
 - e. Jumlah Dana menurut Sumber
6. Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)
- a. Jumlah Sekolah, Siswa Baru Tingkat I, Siswa, Kelas (Rombel), dan Rata-Rata UAN
 - b. Jumlah Lulus, Siswa, Mengulang dan Putus Sekolah
 - c. Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas Menurut Ijazah Tertinggi
 - d. Jumlah Guru SMA menurut Latar Belakang Program Studi
 - e. Jumlah Guru SMA menurut Bidang Studi yang Diajarkan
 - f. Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi dan Fasilitas

- g. Jumlah Dana menurut Sumber
- h. Jumlah Siswa menurut Jurusan dan Sistem Penjurusan

7. Tingkat Madrasah Aliyah (MA)

- a. Jumlah Madrasah Aliyah, Siswa, Siswa Baru Tingkat I, dan Nem
- b. Jumlah Lulus, Siswa, Mengulang, Putus Sekolah, dan Siswa Tingkat III
- c. Jumlah Guru Madrasah Aliyah Menurut Ijazah Tertinggi
- d. Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi dan Fasilitas Madrasah Aliyah
- e. Jumlah Dana Madrasah Aliyah menurut Sumber

8. Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

- a. Jumlah Sekolah, Siswa Baru Tingkat I, Siswa Menurut Jenis Kelamin, Siswa Menurut Umur, Dan Rata-Rata Uan Sekolah Menengah Kejuruan
- b. Jumlah Lulus, Siswa Mengulang dan Putus Sekolah
- c. Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan Menurut Ijazah Tertinggi
- d. Jumlah Ruang Kelas menurut Kondisi Dan Fasilitas Sekolah Menengah Kejuruan
- e. Jumlah Dana Sekolah Menengah Kejuruan menurut Sumber
- f. Pelaksanaan Program Sistem Ganda, Jumlah Siswa dan Lulusan menurut Kelompok Pogram Studi Sekolah Menengah Kejuruan

9. Program Paket

Program paket A, Paket B dan Paket C

10. Verifikasi Data

- a. Persentase penduduk kelompok usia sekolah terhadap total seluruh penduduk
- b. Persentase siswa baru Tingkat I, siswa kelompok usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan kenaikan siswa
- c. Persentase siswa baru Tingkat I, siswa kelompok usia 16-18 tahun, dan kenaikan siswa
- d. Rasio siswa per sekolah menurut jenis pendidikan
- e. Rasio siswa per guru menurut jenis pendidikan

- f. Rasio siswa per kelas menurut jenis pendidikan
 - g. Rasio kelas per ruang kelas menurut jenis pendidikan
11. Efisiensi Internal meliputi
- 1. Data yang dibutuhkan
 - a. Siswa mengulang, putus sekolah, naik tingkat dan lulusan menurut jenis kelamin, SD, MI dan SD + MI
 - b. Siswa mengulang, putus sekolah, naik tingkat dan lulusan menurut jenis kelamin, SMP, MTs dan SMP + MTs
 - c. Siswa mengulang, putus sekolah, naik tingkat dan lulusan menurut jenis kelamin, SMA, MA, SMA + MA, SMK dan SM + MA
 - 2. Kohort Siswa
 - a. Kohort per 1000 siswa (laki-laki + perempuan) SD, MI dan SD + MI
 - b. Kohort per 1000 siswa (laki-laki + perempuan) SMP, MTs dan SMP + MTs
 - c. Kohort per 1000 siswa (laki-laki + perempuan) SMA, MA, SMA + MA, SMK dan SM + MA

3. Indikator

Berdasarkan data dasar yang dikumpulkan oleh Dinas pendidikan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Utara, setelah di laporkan ke Dinas pendidikan Provinsi dan diolah maka dapat dijabarkan menjadi indikator pendidikan sebagai berikut yang meliputi empat kelompok yaitu Indikator Pemerataan, Indikator Mutu, Indikator Relevansi dan Indikator Efisiensi Internal, dimana masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Pemerataan

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK) yang di hitung menurut jenis dan jenjang pendidikan
- b. Angka Partisipasi Murni (APM) yang dihitung menurut jenis dan jenjang pendidikan
- c. Angka Partisipasi Kasar menurut jender
- d. Perbandingan Sekolah Antar jenjang Pendidikan
- e. Rasio Pendidikan menurut Jenjang Pendidikan (Siswa/Sekolah, Siswa/ Kelas, Siswa/Guru, Kelas/RKM, Kelas/Guru)
- f. Angka Penyerapan Kasar (ASK) TK dan SD,

- g. Angka Melanjutkan (AM) Ke Tingkat SMP dan SM
- h. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) Tingkat SD, SMP dan SM
- i. Hubungan antara Angka Partisipasi dengan Keadaan Sekolah dan Daerah (persentase desa terpencil, kepadatan penduduk dan tingkat kesulitan ke sekolah)

2. Indikator Mutu

- a. Persentase Asal Siswa SD dan MI serta rata-rata UAS/UAN menurut Jenis Pendidikan
- b. Angka Mengulang, putus sekolah dan lulusan menurut jenjang pendidikan (SD, SMP serta SMA dan MA)
- c. Angka Mengulang, Putus Sekolah dan Lulusan menurut Jenjang Pendidikan
- d. Persentase Guru menurut Kelayakan Mengajar berdasarkan jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, SM dan SMK)
- e. Kesesuaian Mengajar Guru SMP / SMA Dengan Jurusan Ijazah
- f. Persentase Guru SMP dan SMA menurut Bidang Studi Yang Diajarkan
- g. Persentase Ruang Kelas milik sekolah menurut kondisi berdasarkan jenjang pendidikan
- h. Persentase Ketersediaan Fasilitas milik sekolah berdasarkan jenjang pendidikan
- i. Kekurangan/Kelebihan Fasilitas milik sekolah berdasarkan jenjang pendidikan
- j. Kontribusi Biaya Pendidikan Pemerintah Pusat, Pemda, dan Orangtua berdasarkan jenjang pendidikan

3. Indikator Relevansi

- a. Persentase Siswa SMA Menurut Jurusan dan Kriteria Penjurusan
- b. Persentase SMK Yang Melaksanakan Sistem Ganda dan Siswa SMK Menurut Kelompok/Rumpun

4. Indikator Efisiensi Internal Pendidikan

- a. Indikator Efisiensi Internal Sekolah
- b. Siswa Bertahan Dan Putus Sekolah Per 1.000 Siswa Menurut Jenjang Pendidikan
- c. Hubungan Tahun Siswa Terbuang Dengan Biaya Pendidikan

Data dan indikator yang dibentuk ini setiap tahun disajikan secara rutin setiap tahun dalam publikasi tahunan "Profil Pendidikan". Format publikasi ini sudah standar sesuai yang telah ditetapkan oleh Pusat dan setiap tahun seluruh provinsi harus menyajikan/menerbitkannya.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) merupakan lembaga formal yang dibentuk dengan tanggung jawab utama untuk meningkatkan penjaminan mutu pendidikan. Jaminan mutu pendidikan harus lebih banyak dilakukan dengan berbagai studi dan evaluasi tentang faktor-faktor apa yang besar pengaruhnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai contoh, pemetaan kompetensi guru melalui uji kompetensi. Pemetaan ini akan menghasilkan data yang amat diperlukan untuk melakukan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi guru. Hasil kajian dan evaluasi tersebut harus dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait. Inilah salah satu bentuk jaminan mutu pendidikan yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Salah satu data yang disajikan dan selalu dilaporkan sampai ke Kementerian Pendidikan Nasional adalah Data Guru yang telah lulus mengikuti sertifikasi

Selain data pendidikan formal, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara melalui Bidang Pendidikan Formal dan Informal juga mengumpulkan data yang berhubungan dengan pendidikan non formal, data yang dikumpulkan antara lain data lembaga kursus/keterampilan yang bersertifikat dan Bimbingan Belajar (Bimbel), Taman Bacaan, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), dan Kelompok Pendidikan Usia Dini (PAUD), dll.

Selain itu juga dilakukan survei-survei yang sifatnya temporer sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan dana yang tersedia. Survei-survei ini biasanya dana langsung dari pusat dan tidak semua provinsi, kabupaten/kota melakukan survei tersebut. Berdasarkan wilayah yang terkena sampel yang sudah dipilih atau ditetapkan oleh pusat saja yang melakukan survei tersebut.

2.2. Mekanisme pengumpulan data yang dilakukan oleh dinas pendidikan

Registrasi sekolah dilakukan rutin setiap tahun dan dilakukan per jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan. Untuk sekolah yang baru berdiri harus melakukan registrasi terlebih dahulu di Dinas Pendidikan Kecamatan. Karena setiap sekolah memiliki nomor induk yang unik sehingga tidak mungkin satu sekolah tercatat dua kali atau dua sekolah memiliki nomor induk yang sama itu tidak mungkin terjadi. Selain registrasi sekolah setiap tahun dilakukan pula pengumpulan data identitas pendidik dan tenaga pendidikan atau pengajar/guru. Pengumpulan data tersebut dilakukan oleh Dinas Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota. Pengumpulan datanya adalah dengan cara menyebarkan kuesioner ke setiap sekolah yang ada di wilayahnya baik

sekolah negeri maupun sekolah swasta. Format kuesioner sudah baku dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Kuesioner yang diterima Sekolah harus segera diisi, lalu disyahkan atau ditandatangani oleh kepala sekolah bersangkutan serta setempel sekolah, lalu kuesioner tersebut dikembalikan ke Dinas Pendidikan tingkat Kecamatan. Setelah kuesioner dari tiap sekolah perjenjang pendidikan sudah lengkap masuk di Dinas Pendidikan Kecamatan. Selanjutnya Dinas Pendidikan tingkat Kecamatan mengirim kuesioner yang telah terisi ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab pengumpulan data.

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) juga melakukan pengumpulan data yang dikhususkan pada tenaga kependidikan dan sertifikasi guru. Kuesioner di sebar kesemua sekolah berdasarkan tingkat pendidikan untuk mendata jumlah guru/pengajar termasuk kepala sekolah disetiap kabupaten, serta mendata jumlah guru disetiap kabupaten yang sudah mengikuti sertifikasi yang lulus dan yang tidak lulus/mengulang. Seluruh kuesioner yang sudah terisi dikumpulkan di dinas pendidikan kabupaten/kota setelah lengkap langsung dikirim ke LPMP.

Bidang pendidikan Non Formal dan Informal juga pernah melakukan survei khusus yaitu mengumpulkan data penduduk yang buta huruf, tetapi pengumpulan data tersebut sifatnya tidak rutin. Pengumpulan data bertujuan untuk menghitung Angka Buta Huruf. Mekanisme pengumpulan data, dilakukan oleh Tenaga lapangan dinas (TLD) bekerja sama dengan Rw/RT dan karang taruna setempat untuk mendata warga di wilayahnya yang buta aksara. Setelah diperoleh angka buta huruf maka untuk memberantasnya dilakukan program kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF).

Berdasarkan hasil Laporan kegiatan KF dari TLD ke Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal, maka untuk melihat berjalan atau tidaknya program KF tersebut, maka dilakukan survei kembali, yaitu survei KF yang terbagi menjadi beberapa tingkatan dari mulai warga belajarnya, penyelenggara KF, sampai pada Tenaga Lapangan Dinas (TLD) ikut di survei.

2.3. Pengolahan data (sampai tingkat provinsi)

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota selain sebagai penanggung jawab pengumpul data juga bertanggung jawab sebagai pengolah data. Pengolahan data sudah dilakukan secara komputerisasi, jadi kuesioner yang sudah masuk ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota selanjutnya akan dientry sesuai dengan tingkat pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Program yang digunakan masih cukup sederhana yaitu memakai program excel.

Dari kuesioner yang sudah dioleh nantinya disajikan data per kecamatan dan perjenjang tingkat pendidikan, lalu data tersebut harus dilaporkan ke Dinas Pendidikan

Provinsi bidang pengolahan data dan informasi, serta dilaporkan pula ke Kementerian Pendidikan Nasional. Data pendidikan yang masuk ke Dinas Provinsi dari setiap kabupaten/kota selanjutnya akan direkap dan diolah kembali di dinas provinsi, hingga akhirnya menjadi publikasi "Profil Pendidikan". Publikasi tersebut nantinya harus dikirim ke Kementerian Pendidikan Nasional sebagai bahan laporan. Demikian alur pengumpulan data dibidang pendidikan.

Begitu pula survei khusus yaitu mengumpulkan data penduduk yang buta huruf yang dilakukan oleh TLD setelah informasi terkumpul maka seluruh kuesioner dikirim ke Bidang PNFI dan lalu diolah secara komputerisasi. Hasil atau data yang diperoleh lalu dilaporkan ke Dirjen PNFI pusat.

Sedangkan untuk kegiatan pendataan identitas pendidik dan tenaga kependidikan serta pendataan sertifikasi guru setelah daftar kuesioner diisi lalu dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota lalu kuesioner tersebut dikumpulkan berdasarkan tingkat pendidikan per kecamatan. Kemudian baru dikirim kembali ke LPMP dan diolah di LPMP bidang pengolahan data.

2.4. Mekanisme dan Kendala dalam Pengumpulan Data dan Penghitungan Indikator

Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan data di tingkat dinas pendidikan Kabupaten/Kota relatif tidak ditemui, karena kegiatan pengumpulan data ini sifatnya rutin setiap tahun, biasanya hanya waktu pengembalian/pengiriman kuesioner dari tingkat kecamatan terkadang terlambat/bergeser dari waktu yang telah ditetapkan. Karena disebabkan oleh kesibukan guru dan kepala sekolah, teruma sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar sehingga telat atau lambat dalam mengisi dan mengembalikan kuesioner ke dinas pendidikan kecamatan.

Kendala yang terjadi dalam penghitungan indikator tidak ada karena semuanya sudah baku ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan data data yang sudah dikumpulkan oleh masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kecuali kendala dalam hal survei khusus antara lain masalah dana, sehingga tidak dapat dilakukan secara rutin dan biasanya juga tidak dilakukan oleh semua kabupaten/kota hanya kabupaten/kota yang terpilih sampel saja yang melakukan.

Pada saat ini kendala pengumpulan data terjadi di Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi, hal ini terjadi sejak diberlakukannya sistem otonomi daerah. Dinas Provinsi mengalami kesulitan dalam melakukan pengumpulan data pendidikan dari masing-masing Kabupaten/Kota. Sehingga dalam menerbitkan publikasi "Profil Pendidikan selalu mengalami keterlambatan, seperti yang terjadi pada tahun 2009 ini sampai bulan November 2009 masih ada 3 kabupaten/kota yang belum memberikan laporan data pendidikan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Hal ini dikarenakan sistem otonomi daerah, dimana setiap kegiatan yang sifatnya rutin, estandar, dana yang diperoleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota langsung dikirim dari pusat. Sehingga untuk mendapat

penilaian yang baik di Pusat banyak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang langsung mengirim laporan ke pusat. Karena sudah mengirim ke pusat mereka tidak mau mengirim lagi ke Dinas Pendidikan Provinsi. Sehingga saat ini Dinas Pendidikan Provinsi mulai melakukan jemput bola ke setiap kabupaten/kota.

3. Konsep Definisi

3.1 Konsep AMH dan Buta Huruf

Menurut Kasubag PNFI angka melek huruf orang dewasa dapat memberikan gambaran tentang kemajuan pendidikan suatu bangsa, serta adanya pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Semakin besar angka melek huruf orang dewasa, berarti semakin banyak penduduk yang mampu dan mengerti baca tulis yang akan berpengaruh terhadap penerimaan informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih banyak.

Dinas Pendidikan tidak menghitung angka melek huruf, namun Dinas pendidikan memiliki konsep mengenai melek huruf yang berbeda dengan konsep yang dipakai oleh BPS. Menurut Kabag PNFI adalah kemampuan seseorang dalam mengerti aksara atau huruf latin yaitu huruf yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia. Jika seseorang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin tetapi memiliki kemampuan membaca dan menulis dalam bentuk huruf lain seperti arab atau daerah maka orang tersebut dikatakan memiliki kemampuan atau keahlian lain dan orang tersebut termasuk dalam buta huruf/aksara. Batasan seseorang dikatakan melek huruf adalah mampu membaca dan menulis kata-kata atau membuat kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia dan tidak ada syarat apakah orang tersebut paham atau mengerti makna mengenai apa yang dibaca atau yang ditulis. Termasuk dalam melek huruf adalah kecakapan dalam berhitung artinya orang tersebut dapat mengenal angka 1-100 dan dapat berhitung sederhana (tambah dan kurang) untuk kehidupan sehari-hari.

Buta aksara adalah penduduk yang tidak mengerti akan keaksaraan pada tingkat dasar. Untuk konsep AMH dan buta aksara terjadi sedikit perbedaan antara BPS dan Dinas Pendidikan. Konsep BPS mengenai melek huruf adalah kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Walaupun tidak dapat membaca dan menulis huruf latin tetapi dapat membaca atau menulis huruf lainnya dianggap melek huruf, sedangkan menurut Dinas pendidikan untuk orang seperti ini dianggap buta huruf. Sehingga bila konsep itu dibandingkan perbedaannya dari segi huruf latin dan huruf lainnya dapat menghasilkan angka melek huruf yang berbeda.

Defenisi; Persentase penduduk yang melek huruf terhadap penduduk seluruhnya di suatu daerah.

Rumus :

$$\text{AMH} = \frac{\text{Jumlah penduduk melek huruf}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya}} \times 100$$

Dari AMH yang dihitung menunjukkan makin tinggi angka melek huruf berarti makin baik mutu penduduk di suatu daerah. Selain itu kegunaan dari indikator tersebut adalah untuk mengetahui banyaknya penduduk yang melek huruf di suatu daerah.

Sebab-sebab langsung yang dapat mempengaruhi AMH dan buta huruf disuatu daerah/wilayah adalah ketersediaan sarana dan fasilitas belajar dimasyarakat seperti ketersediaan gedung sekolah, koran/media massa, televisi yang dapat digunakan sebagai saran belajar bagi penduduk. Selain itu juga pengaruh status ekonomi penduduk yang rendah/miskin dan faktor budaya yang menghambat kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan bagi anak-anaknya.

3.2. Rata-Rata Lama Sekolah

Beberapa program pembangunan sumber daya manusia berkaitan pula dengan pencapaian sasaran program Millenium Development Goals (MDGs). Salah satu agenda penting yang terkait dalam MDGs yaitu bidang pendidikan. Indikator pendidikan yang digunakan dalam MDGs salah satunya adalah Rata-rata lama sekolah. Berdasarkan konsep BPS, rata-rata lama sekolah dihitung dari berapa lama seseorang individu berumur 15 tahun ke atas menjalani masa pendidikan formal, dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

Rata-rata lama sekolah konsep internasional menggunakan istilah SLE (*School life expectancy*) yaitu lamanya jumlah tahun sekolah seorang anak pada umur tertentu. Atau dapat diartikan lamanya seorang anak akan menempuh suatu pendidikan dihitung dari mulai anak tersebut berpartisipasi sekolah. Namun konsep ini tidak bisa dihitung secara langsung di Indonesia mengingat adanya kesulitan dalam menganalisis kohort tersebut dari waktu ke waktu.

Untuk indikator rata-rata lama sekolah Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara tidak menghitung. Namun menurut Salah satu nara sumber di Dinas Pendidikan Provinsi, Rata-rata Lama Sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Berdasarkan konsep yang dipakai oleh BPS menurut salah satu nara sumber dari Dinas Pendidikan Provinsi dan nara sumber dari LPMP setuju dengan konsep tersebut, batasan umur yang dipakai 15 tahun menurut mereka sudah mewakili. Karena menurut beliau untuk data rata-rata lama sekolah memakai data langsung dari BPS.

Namun Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/kota untuk memantau sampai sejauh mana program wajar 9 tahun dilaksanakan apakah sudah tercapai target yang telah ditetapkan oleh Diknas. Caranya dengan menghitung indikator Rata-Rata Lama

Belajar (RLBL). Rata-rata lama belajar diperoleh dengan menggunakan kohort dari 1000 siswa. Jadi siswa dipantau dari tingkat I sampai lulus pada suatu jenjang tertentu.

3.3. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah menggambarkan kemampuan penduduk usia SD, SLTP atau SM untuk menyelesaikan pendidikan dijenjang pendidikan SD, SLTP atau SM. Angka putus sekolah menurut Diknas adalah proporsi dari penduduk berusia antara 7 hingga 15 tahun yang tidak terdaftar pada berbagai tingkatan pendidikan dan tidak menyelesaikan Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau Sekolah Menengah atau tidak melanjutkan ke Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau Sekolah Menengah dan anak usia 15 tahun keatas yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan SM. Angka Putus Sekolah yang dihitung oleh Kementerian Pendidikan menggunakan rumus:

Rumus yang digunakan oleh Diknas adalah :

$$\text{APS} = \frac{\text{Jumlah siswa yang putus sekolah}}{\text{Jumlah siswa pada tahun sebelumnya menurut jenjang pendidikan tertentu}} \times 100$$

Dinas Pendidikan Provinsi menyajikan Angka Putus Sekolah berdasarkan jenjang pendidikan yaitu angka putus sekolah SD, SMP dan SM menunjukkan tingkat putus sekolah di tingkat/jenjang pendidikan SD, SMP dan SM. Indikator ini menggambarkan kemampuan penduduk usia SD, SMP dan SM untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan SD, SMP dan SM.

Contoh: Di daerah X pada tahun 2008, jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang putus SD adalah 8.000 orang, jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang masih sekolah SD adalah 230.000 orang dan yang tidak sekolah lagi di SD 10.000 orang, sehingga angka putus sekolah SD adalah 3,33 persen.

Ada perbedaan dalam menghitung indikator Angka Putus Sekolah yang di hitung oleh BPS dengan Kementerian Pendidikan Nasional, perbedaannya adalah Jika BPS menghitungnya berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional dengan pendekatan rumah tangga dan unit observasinya adalah anggota rumah tangga yang terkena sampel. Sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional menghitung Angka Putus Sekolah melalui hasil registrasi sekolah dengan pendekatan sekolah dan unit observasinya adalah jumlah siswa yang bersekolah di sekolah yang bersangkutan.

3.4. APM dan APS

APK, APM dan APS merupakan indikator proses, Indikator ini sebenarnya lebih tepat dikategorikan sebagai statistik atau informasi dasar karena belum dipersentasekan atau dibandingkan dengan variabel pendidikan lain. Tetapi data dasar ini bisa digunakan untuk memperkirakan kebutuhan sarana pendidikan seperti gedung sekolah, bangku, dan kebutuhan lain. APM merupakan proporsi dari anak yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya dibagi dengan penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APS adalah proporsi dari semua anak pada satu kelompok umur tertentu yang masih sekolah dibagi dengan penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan APK adalah proporsi semua anak yang masih sekolah di jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut

Pengelompokan umur yang dipakai oleh BPS sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yaitu kelompok umur untuk usia Sekolah Dasar 7-12 tahun, SLTP 13-15 tahun, SM 16-18 tahun, dan perguruan tinggi di atas 18 tahun. Semua penyebut dalam menghitung indikator ini sama yaitu jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu (7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun). Menurut definisinya bahwa APM, APS selalu lebih rendah dibandingkan APK dan nilai APK bisa lebih besar dari 100 persen karena adanya siswa pada jenjang pendidikan tertentu yang usianya diluar kelompok usia sekolah. Sejak lama Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan batas usia sekolah formal atau anak masuk sekolah SD kelas satu adalah usia 7 tahun. Seperti halnya angka putus sekolah, BPS dan Diknas sama-sama menghitung indikator tersebut dan berdasarkan konsep tidak ada perbedaan.

Perbedaan terjadi pada sumber data untuk menghitung APK, APS dan APM, dimana BPS menggunakan data Susenas dengan pendekatannya adalah rumah tangga dengan ART yang berusia 7-18 tahun. Sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional dalam menghitung indikator tersebut berdasarkan hasil registrasi atau pelaporan dari masing-masing sekolah berdasarkan tingkat/jenjang pendidikan tertentu dan umur siswa. Jadi setiap sekolah melaporkan jumlah siswa menurut usia pada tahun ajaran tertentu. Sedangkan untuk jumlah penduduk menurut kelompok umur Diknas memakai data dari BPS.

4. Kesimpulan / Rekomendasi di wilayah masing-masing

4.1. Kesimpulan

- Dari hasil studi pengumpulan data dasar dan indikator di bidang pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara bahwa Dinas Pendidikan Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tidak pernah menghitung indikator baru yang dapat digunakan sebagai indikator kunci pembangunan dalam bidang pendidikan. Semua indikator yang dihitung atau yang dihasilkan adalah

indikator baku sesuai yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

- Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara tidak menghitung indikator rata-rata lama sekolah dan angka putus sekolah. Untuk dua indikator tersebut biasanya data yang dipakai adalah data BPS
- Dinas pendidikan juga tidak menghitung Angka Melek Huruf, namun diknas memiliki konsep yang berbeda dengan BPS. Menurut Dinas Pendidikan Melek huruf adalah dapat membaca dan menulis kata-kata dan kalimat sederhana dengan huruf latin **tidak termasuk** huruf lainnya dan dapat mengenal angka 1-10 dan berhitung sederhana (+ dan -).
- APM untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi diatas SM tidak pernah menghitung. Karena Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota hanya membawahi jenjang pendidikan dari SD-SM saja, sedangkan untuk tingkat diatasnya adalah wewenang DIKTI dan masing-masing Universitas atau Sekolah Tinggi.
- Dalam menghitung angka melek huruf, konsep yang dipakai oleh Dinas Pendidikan dengan BPS berbeda, walaupun anghka yang dihasilkan tidak berbeda jauh

4.2. Rekomendasi

Rekomendasi dari instansi yang dikunjungi di Provinsi Sulawesi Utara antara lain:

1. Dalam membangun suatu indikator pendidikan yang baru sangat sulit, karena harus dapat menyediakan anggaran dana yang tidak sedikit nilainya, sampel yang diambil sebagai bahan penelitian harus tepat untuk itu harus dikaji berkali-kali atau berulang kali untuk memastikan apakah indikator tersebut dapat menjadi indikator kunci yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan bidang pendidikan.
2. Untuk saat ini Kementerian pendidikan Nasional dan seluruh jajarannya di daerah fokus pada peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan menerapkan standar nasional pendidikan sebagai acuan dan rambu-rambu hukum untuk meningkatkan mutu berbagai aspek pendidikan nasional termasuk mutu pendidik dan mutu sarana dan prasarana pendidikan, tenaga kependidikan, kompetensi lulusan, pembiayaan pendidikan dan penilaian pendidikan.
3. Untuk indikator-indikator yang dihitung oleh BPS dan Dinas Pendidikan juga menghitung meskipun memiliki konsep yang berbeda, sebaiknya data yang dihasilkan oleh BPS dan Dinas Pendidikan haruslah wajar dan selaras, jadi walaupun data berbeda tetapi tidak terlalu jauh perbedaannya.

Buku

BPS; *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2006*, Jakarta, 2006

BPS; *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2007*, Jakarta, 2007

BPS; *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2008*, Jakarta, 2009

BPS; *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2009*, Jakarta, 2010

BPS; *Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2008*, Jakarta 2008

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DI. Yogyakarta, Tahun 2008

Education Indicators Technical Guidliner, UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Institute for Statistics, November 2009

Ikhtisar Data Pendidikan Nasional, Tahun 2007/2008, Depdiknas, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Statistik Pendidikan, 2008

Pedoman cacah Podes 2008

Pedoman Pencacah Sensus Penduduk (SP) 2010

Pedoman Pentahapan Program KF, 1998

Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 2007/2008

Profil Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara 2007/2008

Statistik Pendidik 2006

Susenas, Pedoman KOR 2009

Susenas, Pedoman Modul Sosial Budaya dan Pendidikan 2009

Situs Web

<http://www.bps.go.id>

Angka Melek Huruf

adalah kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.

Angka Partisipasi Kasar

adalah rasio semua anak yang masih sekolah di jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Adalah rasio anak yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya dibagi dengan penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Adalah rasio semua anak pada satu kelompok umur tertentu yang masih sekolah dibagi dengan penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka putus sekolah

adalah proporsi dari penduduk berusia antara 7 hingga 15 tahun yang tidak terdaftar pada berbagai tingkatan pendidikan dan tidak menyelesaikan Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau Sekolah Menengah atau tidak melanjutkan ke Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau Sekolah Menengah.

Bekerja

adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.

Buta huruf/aksara

adalah penduduk yang tidak mengerti akan keaksaraan pada tingkat dasar.

Keaksaraan fungsional (KF)

adalah metode pemberantasan buta aksara dengan suatu pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, mengamati dan menganalisis yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari serta memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya.

Kursus

adalah penyelenggaraan pendidikan non formal yang mempunyai kurikulum tertentu, jangka waktu tertentu, dan tempat tertentu, yang dikelola oleh suatu lembaga/yayasan.

Istilah Teknis

Penganggur

adalah mereka yang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Rata-rata lama sekolah

adalah rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai oleh penduduk pada umur tertentu.

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>